



LKIP 2025

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Kementerian Perhubungan RI
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
BPTD Kelas II Kalimantan Barat





HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	14-01-2026	
2.	Diperiksa	Agung Wibowo, SH	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan	14-01-2026	
3.	Disetujui	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15-01-2026	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	14-01-2026	
2.	Diperiksa	Dodi Frenky, S.Si.T, M.Si	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan	14-01-2026	
3.	Disetujui	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15-01-2026	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Kalimantan Barat

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMETERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	14-01-2026	
2.	Diperiksa	Didik Setiyawan, M.Sc.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan	14-01-2026	
3.	Disetujui	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15-01-2026	



Kata Pengantar



KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta Tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Pontianak, 15 Januari 2026

Kepala Balai,



I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.

NIP. 19710619 199602 1 001



Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025 memuat 7 (Tujuh) tujuan pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK;
2. Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Peyebrangan;
3. Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan;
4. Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP;
5. Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*;
6. Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan;
7. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025, ditetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dan 16 (Enam Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sudah baik.

Dari 16 (Enam Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat tahun 2025, terdapat 16 (Enam Belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IKK1.1.1.A Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan terealisasi 6 trayek (target 6 trayek) tercapai 100%;



2. IKK1.2.1A Jumlah pelabuhan penyebrangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi 1 unit (target 1 unit) tercapai 100%;
3. IKK2.1.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terealisasi 1 unit (target 1 unit) tercapai 100%;
4. IKK2.1.4 Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi 4 unit (target 4 unit) tercapai 100%;
5. IKK2.1.5 Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas pokok dan fungsi LLAJ terealisasi 24 kegiatan (target 24 kegiatan) tercapai 100%;
6. IKK2.2.2 Jumlah operasional layanan pelabuhan penyebrangan sesuai SPM terealisasi 2 unit (target 2 unit) tercapai 100%;
7. IKK3.2.1 Jumlah kegiatan pemeriksaan rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman terealisasi 48 laporan (target 48 laporan) tercapai 100%;
8. IKK3.2.2 Jumlah alat uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB terealisasi 2 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 100%;
9. IKK3.3.1 Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis terealisasi 90% (target 90%) tercapai 100%;
10. IKK3.3.2 Jumlah lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
11. IKK4.1 Kegiatan perencanaan pembangunan ditjen perhubungan darat terealisasi 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 100%;
12. IKK4.2 Peningkatan akuntabilitas kinerja BPTD (nilai SAKIP) terealisasi dengan nilai 1 (target 1 nilai) tercapai 100%;
13. IKK4.3 Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dit teknis (nilai IKPA) terealisasi dengan nilai 1 (target 1 nilai) tercapai 100%;
14. IKK4.4 Tindak lanjut rekomendasi opini BPK (skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) terealisasi 1% (target 1%) tercapai 100%;
15. IKK4.7 Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa terealisasi 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
16. IKK4.10 Kegiatan terkait sistem merit SDM Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 100%.



Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), Pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA	ii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
I.2.1 Balai Pengelola Transportasi Darat	1
I.3 Sumber Daya Manusia	3
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	13
I.4.1 Kewenangan	13
I.4.2 Sumber Daya Manusia	14
I.4.3 Anggaran.....	14
I.4.4 Isu Strategis	15
I.4.5 Ruang Lingkup	15
I.5 Sistematika Laporan	15
BAB II URAIAN SINGKAT PERENCANAN STRATEGIS	28
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	28
II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.....	30
II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
II.2.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	34
II.2.2 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	38
BAB III TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	42
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	42
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja	42



III.3	Realisasi Anggaran	151
III.3.1	Alokasi Anggaran Tahun 2025.....	151
III.3.2	Realisasi Anggaran	162
III.3.3	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	170
III.3.4	Hambatan dan Kendala	172
BAB IV	PENUTUP	174
IV.1	Penutup.....	174
IV.1.1	Ringkasan Capaian	174
LAMPIRAN		182



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia	3
Tabel III. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	46
Tabel III. 2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	54
Tabel III. 3 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Pada Tahun 2025	61
Tabel III. 4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	69
Tabel III. 5 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	76
Tabel III. 6 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	82
Tabel III. 7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	88
Tabel III. 8 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	95
Tabel III. 9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	100
Tabel III. 10 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	106
Tabel III. 11 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	112
Tabel III. 12 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	119
Tabel III. 13 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada Tahun 2025	125
Tabel III. 14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	131
Tabel III. 15 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	136
Tabel III. 16 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025	142
Tabel III. 17 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Pada Tahun 2025	147
Tabel III. 18 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025	151
Tabel III. 19 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025	151
Tabel III. 20 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2025	151
Tabel III. 21 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2025	152
Tabel III. 22 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A 2025.....	154
Tabel III. 23 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A 2025.....	155
Tabel III. 24 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A 2025	157
Tabel III. 25 Rincian Program-Program Kegiatan DIPA TA 2025.....	158
Tabel III. 26 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-Tahun 2025	160
Tabel III. 27 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA.....	162
Tabel III. 28 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	164
Tabel III. 29 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana 2025.....	165
Tabel III. 30 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	167
Tabel III. 31 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025	167
Tabel III. 32 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2025.....	168
Tabel III. 33 Efisiensi Anggaran	170
Tabel IV. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	176



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas II Kalimantan Barat.....	3
Gambar III. 1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	50
Gambar III. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.....	56
Gambar III. 3 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas.....	58
Gambar III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.....	63
Gambar III. 5 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	66
Gambar III. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.....	72
Gambar III. 7 Grafik Capaian IKK Jumlah Fasilitas Peimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	73
Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.....	78
Gambar III. 9 Grafik Capaian IKK Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ.....	79
Gambar III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.....	84
Gambar III. 11 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM.....	86
Gambar III. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	91
Gambar III. 13 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	92
Gambar III. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.....	97



Gambar III. 15 Grafik Capaian IKK Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB	98
Gambar III. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Alat Uji yang telah Dikalibrasi di UPUBKB Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	102
Gambar III. 17 Grafik Capaian IKK Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	104
Gambar III. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	109
Gambar III. 19 Grafik Capaian IKK Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	110
Gambar III. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	115
Gambar III. 21 Grafik Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	117
Gambar III. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	122
Gambar III. 23 Grafik Capaian IKK Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	123
Gambar III. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	128
Gambar III. 25 Grafik Capaian IKK Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (NILAI IKPA)	129
Gambar III. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	133
Gambar III. 27 Grafik Capaian IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	134
Gambar III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	139
Gambar III. 29 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	140
Gambar III. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	144



Gambar III. 31 Gambar Grafik Capaian IKK Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor).....	145
Gambar III. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.....	150
Gambar III. 33 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025	160
Gambar III. 34 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Tahun 2025	166



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;**
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;**
- 3. Rencana Aksi Tahun 2025;**
- 4. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025;**
- 5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2025;**
- 6. Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025;**
- 7. Revisi II Rencana Aksi Tahun 2025;**
- 8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;**
- 9. Lain - lain yang dianggap perlu.**



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1 Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLASDP, KOPP, Pelabuhan Penyebrangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) Terdiri atas:

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dan pelabuhan sungai, danau, penyebrangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyebrangan disebut BPTD Kelas I;



- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan perintis yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan komersial dan perintis yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

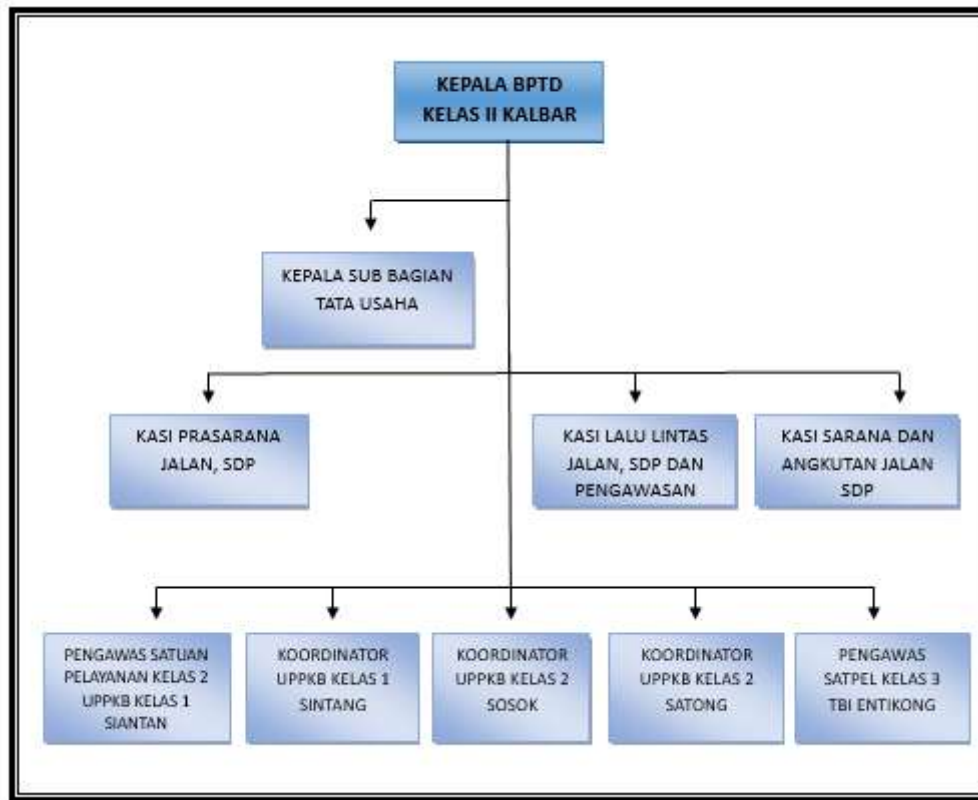
- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bagan organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas II Kalimantan Barat

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat menaungi sebanyak 347 Pegawai, yang terdiri dari PNS sebanyak 125 orang, PPPK sebanyak 183 dan Outsorcing sebanyak 39 dengan rician sebagai berikut:

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NIP / PANGKAT (GOLONGAN) / NOMOR INDUK	JABATAN SK
KANTOR INDUK				
1	I KETUT SUHARTANA, S.SiT., MT	L	NIP. 19710619 199602 1 001	Kepala BPTD Kelas II Kalbar



2	ADI TEMPO, A. Md	L	NIP. 19830206 201104 1 001	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
3	NADYA NAFTAH BERLIANA, A.Md.Ak	P	NIP. 19970517 201812 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan
4	DEWI SINTA PERWITA SARI, S. Tr. Tra	P	NIP. 19980424 202203 2 015	Penelaah Teknis Kebijakan
5	ANNAS NUR RIDWAN, S.Tr.Tra	L	NIP. 20010716 202310 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan
6	DIMAS ASYANING TIAGARA, S.Tr.T.	L	NIP. 20000627 202310 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan
7	MUHAMMAD ERZA HAIKAL, S.Tr.T.	L	NIP. 20000511 202412 1 001	Pengawas Transportasi Darat
8	MUHAMMAD IQBAL NAVIS ALVIANNUS, S.Tr.Tra.	L	NIP. 20001019 202412 1 001	Pengawas Transportasi Darat
9	RIDHO FEBRIAN, A.Md. Ak	L	NIP. 19960205 201801 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan
10	BAGUS SURYA NUGRAHA, A.Md PKB	L	NIP. 19971215 202012 1 005	Pengolah Data dan Informasi+
11	LABIBUROHMAN IRSYAD MAULANA, A.Md.Tra	L	NIP. 20000729 202112 1 001	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
12	ERRICA AZISAH, A.Md.T	P	NIP. 19970907 202203 2 018	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
13	M. AFIF GRIALDI, A.Md.T	L	NIP. 19980415 202203 1 011	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
14	IRAWAN TRI UTOMO, A.Md.T	L	NIP. 19990803 202203 1 007	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi



15	EKA SATRIA PUTRA, A.Md.T	L	NIP. 19980525 202203 1 009	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
16	FADEL MUHAMMAD, A.Md.Tra	L	NIP. 20000702 202210 1 002	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
17	SHAFIRA RAMADHANTI, A.Md.Tra	P	NIP. 20001215 202210 2 001	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
18	AHMAD CAHYO MADANI, A.Md. T	L	NIP. 19981122 202310 1 001	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
19	GRENDYS TYAR DWI KURNIAWAN, A.Md.Log.	L	NIP. 20010315 202310 1 001	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
20	NAZWA ALAYDA AZZAHRA, A.Md.Tra	P	NIP. 20020921 202310 2 001	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi
21	NI KADEK ANGGIE RISTHI, A.Md.Tra.	P	NIP. 20030423 202412 2 001	Petugas Transportasi Darat
22	ANDRE FAIZ DWI YUDHOYONO, A.Md.Tra.	L	NIP. 20020403 202412 1 001	Petugas Transportasi Darat
23	MOHAMMAD RENALDO FIRDAUS MUSTOFA, A.Md.T.	L	NIP. 20020827 202412 1 002	Petugas Transportasi Darat
24	BAGUSTYAR DWI WICAKSONO, A.Md.Log.	L	NIP. 20010625 202412 1 002	Petugas Transportasi Darat
25	SENDY FARIZ RAMADHAN, A.Md.Tra.	L	19991213 202412 1 001	Petugas Transportasi Darat



26	Azhar Hidayah Nursasono, S.I.Kom	L	199506252025211009	Penata Layanan Operasional
27	Bella Qatrunnada, S.A.P	P	199502142025212017	Penata Layanan Operasional
28	Khairunnisa Nurliah, S.P	P	198308202025212019	Penata Layanan Operasional
29	Klemensia Freddy, S.Ag	P	198711232025212014	Penata Layanan Operasional
30	Ninis Ariska, S.Pd	P	199212192025212023	Penata Layanan Operasional
31	Vintari Pakarwati, S.T	P	198908222025212026	Penata Layanan Operasional
32	Yogi, S.E	L	199201072025211028	Penata Layanan Operasional
33	Abu Asypairi, A.Md	L	198501142025211022	Pengelola Layanan Operasional
34	Syarif Maulana Ibrahim, A.Md	L	199001152025211026	Pengelola Layanan Operasional
35	Desi Metriani	P	199512152025212026	Pengadministrasi Perkantoran
36	Jemmi Yenrik Kabangnga	L	198410182025211024	Pengadministrasi Perkantoran
37	Norman	L	198611042025211006	Pengadministrasi Perkantoran
38	Ria Rizki	P	199606062025212040	Pengadministrasi Perkantoran
39	Taufik	L	198801302025211018	Pengadministrasi Perkantoran
40	Trisna Wardani	P	199804122025212014	Pengadministrasi Perkantoran
41	Yuda Ardyansyah	L	199812162025211009	Pengadministrasi Perkantoran
42	Febry Yanty	P	-	Operator Layanan Operasional



43	Mustofi	L	-	Operator Layanan Operasional
44	Ridduan Syabandi	L	-	Operator Layanan Operasional
45	Syarif Ishak	L	-	Operator Layanan Operasional
46	Syarif Nizar	L	-	Operator Layanan Operasional
47	Rosnawati	P	-	Pengelola Umum Operasional
48	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	P	-	Pramubakti
49	Ridwan, A.Md	L	-	Pramubakti
50	Nyoman Mustika, S.Pd	L	-	Driver/Pengemudi
51	Irfan Tirto Pambudi	L	-	Petugas Keamanan
52	Ni Luh Sukerti	P	-	Petugas Kebersihan
53	Sandalangi	L	-	Keamanan Khusus
54	AGUNG WIBOWO, SH	L	NIP. 19800207 200812 1 001	KASI Prasarana
55	MUHAMMAD GHIFAN ARSELAN, S.Tr.Tra	L	NIP. 19990525 202505 1 002	Pengawas Transportasi Darat
56	ROMI CHANDRA JAYA HUTABARAT, A.Md.T.	L	NIP. 19980529 202203 2 010	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
57	NURHAYATI OHORELLA, A.Md.LLASDP	P	NIP. 19950101 202203 2 020	Pengolah Data dan Informasi
58	YUEYI ANDARA, A.Md. Tra	P	NIP. 20000711 202203 2 002	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
59	SYAHVIRA PRAMADHANI WIDYASWARA, A.Md.T.	P	NIP. 19980307 202203 2 023	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi



60	ERFIRA DINDA PUTRI, A.Md.Tra	P	NIP. 20000324 202210 2 001	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
61	FRENGKY, A.M.d.Tra.	L	NIP. 20000506 202412 1 001	Petugas Transportasi Darat
62	Widya Pratiwi, S.Ars	P	199601102025212020	Penata Layanan Operasional
63	Petrumeila Widisubriyanto, S.M	P	199705212025212026	Penata Layanan Operasional
64	Rudi Antartikawan, S.T	L	-	Pramubakti
65	Arga Aprynanda Arsa Jusaim, A.Md.T	L	-	Pramubakti
66	DIDIK SETIAWAN, M.Sc.	L	NIP. 19850531 200912 1 003	KASI Sarana
67	MELKISEDEK IMANUEL TOTO, A.Md, S.S.T (TD)	L	NIP. 19900514 201503 1 005	Penelaah Teknis Kebijakan
68	PRIANTAMA DJATWATIKA, S.Tr.Tra	L	NIP. 20010226 202310 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan
69	MISBAHUDDIN BASYARAHIL, A.Md Pkb	L	NIP. 19960302 201902 1 002	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
70	HANISA YUSTRIA ABIDAH, A.Md.T.	P	NIP. 19991123 202112 1 001	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
71	HESKEY FAHREVI RAMADHAN, A.Md.Tra.	L	NIP. 20001209 202112 1 001	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
72	RACHMAD HIDAYAT, A.Md.Tra	L	NIP. 20000403 202210 1 002	Petugas Telkompel
73	RAFLY PAIZAR, A.Md.Tra	L	NIP. 20011019 202210 1 001	Petugas Telkompel



74	FIRMAN MAULANA, A.Md. T	L	NIP. 20010412 202310 1 001	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
75	NINDYA AYUDIA PUTRI, A.Md.Tra	P	NIP. 20000117 101310 2 001	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
76	FATIHAH HUSNA MOERTIANI, A.Md.Tra	P	NIP. 20010619 202412 2 001	Petugas Transportasi Darat
77	FAUZAN FATCHUROCHMAN, A.Md.Tra	L	20030223 202412 1 001	Petugas Transportasi Darat
78	AGUS SETIYAWAN RIYANTO, A.Ma PKB	L	NIP. 19970808 202012 1 004	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
79	Esra Yanto, S.Pd	L	199305232025211025	Penata Layanan Operasional
80	Pandi, S.H	L	198908022025211028	Penata Layanan Operasional
81	DODI FRENKY, S.Si.T., M.Si	L	NIP. 19870208 201101 1 004	KASI LLJSDP dan Pengawasan
82	RENI ZUMA, S.E.	P	NIP. 19890314 201503 2 007	Penelaah Teknis Kebijakan
83	MUHAMMAD ANSHARI, S.ST (TD)., M.T.	L	NIP. 19911021 201503 1 002	Pengawas Transportasi Darat
84	DANANG HERU PRASETYO, S.T	L	NIP. 19861209 201101 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan
85	RAHMATIA NASYA GUSMAN, S.T	P	NIP. 19960815 202203 2 019	Penilik Kelaiklautan Kapal
86	ZAENAL ABIDIN, S.Tr.Tra	L	NIP. 19990618 202210 1 001	Pengawas Transportasi Darat



87	ROHMAN KHAFIDZI, S.Tr.Tra	L	NIP. 19990216 202412 1 001	Pengawas Transportasi Darat
88	FAHRIL MAHESA HENDRI, S.Tr.Tra.	L	NIP. 20010423 202412 1 001	Pengawas Transportasi Darat
89	FARHAN ARYADINATHA, S.Tr.T.	L	NIP. 20020729 202412 1 004	Pengawas Transportasi Darat
90	TRI WAHYU PRIBADI, A.Md.Tra	L	NIP. 20000126 202112 1 001	Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
91	WAHYU FAJRIAN, A.Md.T	L	NIP. 19970306 202203 1 009	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
92	ENGELBERTUS WATULONGA, A.Md.Tra	L	NIP. 19930410 202203 1 008	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
93	M. IZZULHAQ S ALAM, A.Md.Tra.	L	NIP. 20000117 292310 2 001	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
94	MAULANA MUHAMMAD RIDHO SIREGAR, A.Md.Tra.	L	NIP. 20011123 202412 1 002	Petugas Transportasi Darat
95	ALDHI STIFANI CAHYA, A.Md.Log.	L	NIP. 20010528 202412 1 001	Petugas Transportasi Darat
96	Andi Muhammad Nabil, S.H	L	199212232025211024	Penata Layanan Operasional
97	Fenny Widiarsari, S.E	P	199502132025212018	Penata Layanan Operasional
98	Samuel Liberty Purba Tondang, S.Kom	L	198708172025211032	Penata Layanan Operasional



99	Botari	L	199408152025211033	Pengadministrasi Perkantoran
100	Soni Zakarsih	L	198306222025211022	Pengadministrasi Perkantoran
101	Andi Pranata, S.Tr.T	L	-	Pramubakti
102	BANI IRSYAD	L	-	-
103	HASNA AULIA RAHMA	P	-	-
104	ILHAM ABDURRAZZAAQ	L	-	-
105	RAUDINA RILAWANI PUTRI	P	-	-
106	ANNISA PUTRI SETYANI	P	-	-
107	DEVA PRATAMA	L	-	-
108	RAKA PUTRA RAMADHAN	L	-	-
109	RUSYDI AHMAD RAMADHAN	L	-	-
110	TARTILA VEGA LESTARI	P	-	-
111	YAMADAFFA FUSHSHILAT WASIS	L	-	-
112	ZULFATUL AZKIYA	P	-	-
113	ERZA ZIDAN A'LAUDIN ZULFA	L	-	-
114	MOHAMAD ZAINUS SYIFA	L	-	-
115	NUR INDAH PUJILESTARI	P	-	-
116	ALDINO ELRAMADANI SOFIYANNNNNN	L	-	-
117	ARUM PUPUT AMALIA	P	-	-
118	MUHAMMAD HENDRI ARDIANSYAH	L	-	-
119	SITI NUR AISYAH	P	-	-
120	DHITO PHANDU DEWANATA	L	-	-
121	HAIDAR DZAKI	L	-	-
122	ISTIQOMAH UMMA AFIFAH	P	-	-
123	NIKEN ANDIKA OKTASARI	P	-	-
124	ANISA NOVITA SARI	P	-	-



125	IFFAN BAGUS DWI SAPUTRA	L	-	-
126	INTAN ISTIANA	P	-	-
127	SANDI FATURRAHMAN	L	-	-
128	ANGGITA CAHYADEWI PRIYANTO	P	-	-
129	FARRAS HAKIM PRASETYO	L	-	-
130	I PUTU RADITYA BIMATARA	L	-	-
131	MOHAMMAD ALDI ANSYAH	L	-	-
132	MOHAMMAD ALFIAN PUTRA	L	-	-
133	NADHIRA QURRATA AYUN	P	-	-
134	SIDNAN IMAM HANAFI	L	-	-
135	TORIQ EKA RAHMAN	L	-	-
136	BELLA PUTRI AGUSTIN	P	-	-
137	DEVI NURHIDAYATI	P	-	-
138	DEWA GEDE SATRIA WIBAWA RESIARTHA	L	-	-
139	FEBRIAN DWI RIZKA PRAYUDHI	L	-	-
140	LUCKY AULIA AFIFI	P	-	-
141	ALVON BINAZIER TABARANI	L	-	-
142	LUTHFIA AZIZAH KUMAURA	P	-	-
143	RISKA AYU PRAMUDITA	P	-	-
144	TRISTAN SIWI PRATAMA	L	-	-



No	Satuan Pelayanan	Jumlah PNS (orang)	Jumlah PPPK (orang)	Jumlah OS (orang)	Jumlah Total (orang)
1	Kantor Induk BPTD Kelas II Kalimantan Barat	104	31	9	144
2	TBI Entikong	1	17	1	19
3	TBI Aruk	-	2	2	2
4	TBI Badau	-	2	2	2
5	Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang	10	63	16	89
6	UPPKB Siantan	3	43	4	50
7	UPPKB Sosok	1	9	-	10
8	UPPKB Satong	1	6	4	11
9	UPPKB Sintang	1	8	-	9
10	UPPKB Sedau	-	-	1	1
11	PLBN Aruk	2	-	-	2
12	Pelabuhan Sintete	-	2	-	2
13	Pelabuhan Rasau Jaya	2	4	-	6

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Perkerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun



demikian masih terdapat petunjuk teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintahan Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyebrangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2 Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat. Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD.

I.4.3 Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat



hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4 Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah:

1. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyebrangan;
2. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
3. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
4. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
5. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

I.4.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.3 Sumber Daya Manusia



I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025**

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- **Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025**
- **Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

SK 1.1.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK

- **Uraian Sasaran Program**

IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025



- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

SK 1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan

- **Uraian Sasaran Program**

IKK 1.2.1A Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

- **Uraian Sasaran Program**

IKK 2.1.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

- A.1 Definisi Indikator Kinerja



- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

IKK 2.1.4 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029



IKK 2.1.5 Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

SK 2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

- **Uraian Sasaran Program**

IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025

A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

SK 3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*

- **Uraian Sasaran Program**

IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

A.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025

A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB

A.1 Definisi Indikator Kinerja



- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

SK 3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

- **Uraian Sasaran Program**

IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029



IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029.

SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

- **Uraian Sasaan Program**

IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025

A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

IKK4.2 Kegiatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

A.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025

A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

IKK4.3 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)

A.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan



- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

**IKK4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor)
Kemneterian Perhubungan (tindak lanjut sampai
tahap proses)**

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- A.1 Definisi Indikator Kinerja



- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029

IKK4.10 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025
- A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029



III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2025

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian



IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2025;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2025;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
9. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sesuai Rencana Strategis BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	11
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
			IKK7.a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	11
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal Tipe-A	%	100
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Idea	%	90
			IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
			IKK7.a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat merupakan kontrak kinerja antara BPTD Kelas II Kalimantan Barat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dengan Total Anggaran Rp. 96.725.759.000 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	11
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90
			IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
			IKK7.a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100



4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 28.018.111.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 19.022.922.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 23.440.258.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6.677.041.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 8.644.969.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 10.922.458.000
	JUMLAH	Rp. 96.725.759.000

II.2.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun berjalan dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan nomenklatur Ortaker sesuai PM 6 Tahun 2023 maka mengakibatkan disesuaikan kembali Perjanjian Kinerja pada bulan Agustus berdasarkan nomenklatur baru BPTD Kelas II Kalimantan Barat dan penyesuaian anggaran berdasarkan Revisi DIPA ke-06 tanggal 20 Agustus 2025.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dengan Total Anggaran Rp 100.755.214.000 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transasportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2.	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1
3.	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM	Tahun	4
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	24
4.	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Tahun	2



5.	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	48
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Kalbar	Paket	2
6.	SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	8
7.	SK 12	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	2400
			IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendamping Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	30
8.	IKP 3.3	Penurunan Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	7



9.	IKP 4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
			IKK4.3	Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
			IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
			IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1



			IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 28.018.111.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 17.879.604.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 21.407.574.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6.677.041.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 8.075.309.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 18.697.575.000
	JUMLAH	Rp. 100.755.214.000

II.2.2 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 maka dengan ini mengakibatkan disesuaikannya kembali anggaran Perjanjian Kinerja Revisi II pada bulan Desember berdasarkan Revisi DIPA ke-14 tanggal 12 Desember 2025.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dengan Total Anggaran Rp. 103.219.737.000 Adalah sebagai berikut:

**Tabel II.5** Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 1.2.1A	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1
3.	SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1
			IKK 2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	Unit	4
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	24
4.	SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan	Unit	2



		Sektor Transportasi ASDP		Penyebrangan Sesuai SPM		
5.	SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Laporan	48
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	2
6.	SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	%	90
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4
7.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	3
			IKK4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	85,11
			IKK4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	81,92



			IKK4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	100
			IKK4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK4.10	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 25.107.033.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 17.879.604.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 26.428.155.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 7.577.041.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 8.275.309.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 17.952.595.000
	JUMLAH	Rp. 103.219.737.000

BAB III TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu



diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 7 (Tujuh) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam



Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

**Tabel III. 1** Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN PROGRAM /		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1.1.1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK					0%			100 %			100 %			100 %
IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	6	0	0%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
SK 1.2.1	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan					0%			100 %			100 %			100 %
IKK 1.2.1A	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan					75%			83,3 3%			91,6 6%			100 %
IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	Unit	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	24	24	6	25%	24	12	50%	24	18	75%	24	24	100%
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP					0%			100 %			100 %			100 %
IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Unit	2	2	0	0%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
SK 3.2	Meningkatnya Kapatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>					12,5 %			25%			37,5 %			100 %



SASARAN PROGRAM /		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Laporan	48	48	12	25%	48	24	50%	48	36	75%	48	48	100%
IKK 3.3.2	Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	2	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	2	100%
SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan					0%			0%			0%			100%
IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	%	90%	90	0	0%	90	0	0%	90	0	0%	90	90	100%
IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	4	100%
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat					0%			38,88%			52,77%			100%
IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	3	3	0	0%	3	1	33,33%	3	2	66,67%	3	3	100%
IKK4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	85,11	85,11	0	0%	85,11	85,11	100%	85,11	85,11	100%	85,11	85,11	100%
IKK4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	81,92	81,92	0	0%	81,92	81,92	100%	81,92	81,92	100%	81,92	81,92	100%
IKK4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	100	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%	100	100	100%
IKK4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%



SASARAN PROGRAM /		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKK4.1 0	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	2	2	0	0%	2	0	0%	2	1	50%	2	2	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						12,5 %			63,8 8%			68,8 4%			100 %
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						9,72 %			45,7 4%			50,6 4%			100 %
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						2			7			7			16
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						14			9			9			0



Selama Tahun 2025, ada 7 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 16 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1.1.1: Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat megawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan membberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (Satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

A.1 Definisi Indikator Kinerja

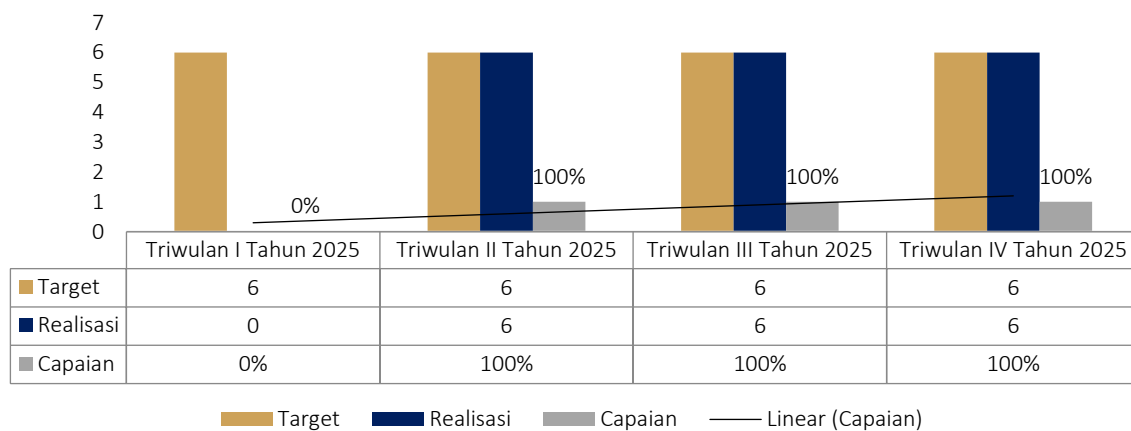
Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberi subsidi untuk angkutan umum peritis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dihitung berdasarkan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung indikator kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan tahun 2025 sebesar 6 trayek jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 6 trayek maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1** Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.



Gambar III. 1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi angkutan Jalan Perintis;



3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;
- Kronologi Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan memiliki target 6 trayek yang diperoleh dari capaian terhadap Draft Renstra 2025-2029.
 - Faktor Keberhasilan
Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:
 1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan.
 2. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan perintis;
 3. Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan;
 4. Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
 5. Minat masyarakat yang tinggi terhadap angkutan perintis tersebut.
 - Faktor Kegagalan
Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:
 1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
 2. *Load factor* yang rendah;



3. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh;
 4. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.
- Realisasi Kinerja
Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Capaian Kinerja
Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen. Rincian lokasi trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rincian Lokasi
1	Ketapang - Simpang Siduk – Sukadana - Teluk Batang
2	Putussibau – Lintas Timur - Nanga Raun
3	Sambas – Aruk
4	Sintang – Nanga Mau – Nanga Tebidah
5	Terminal Sui Durian Sintang – Tempunak
6	Putussibau – Jongkong - Selimbau

- Realisasi Anggaran
Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan tahun 2025 yaitu Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) Subsidi Angkutan Jalan Perintis (6 Trayek) senilai Rp. 1.959.715.000;-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

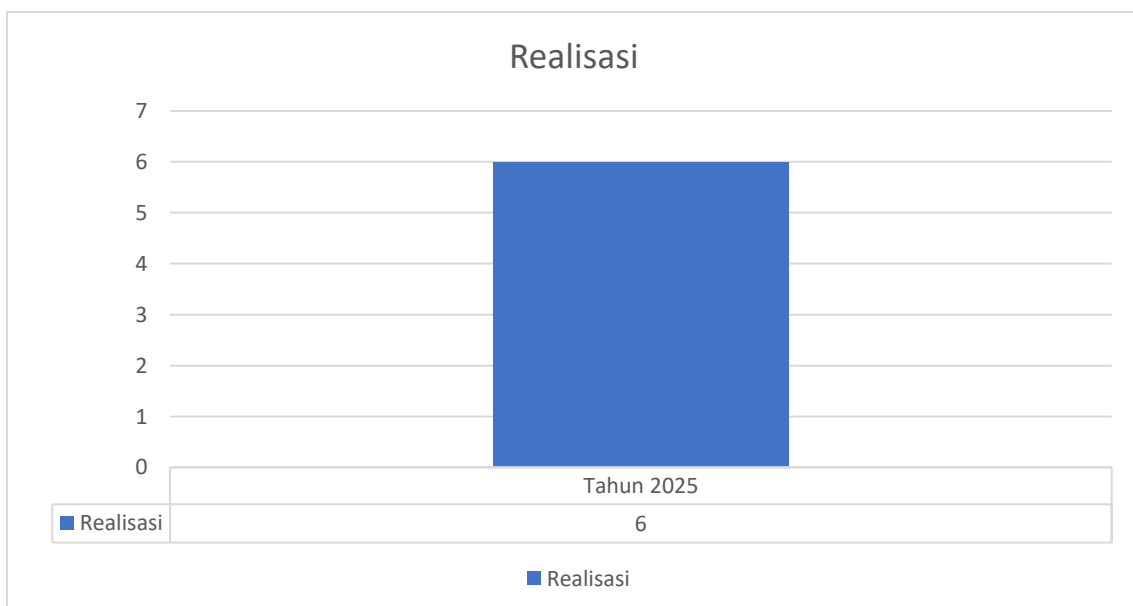
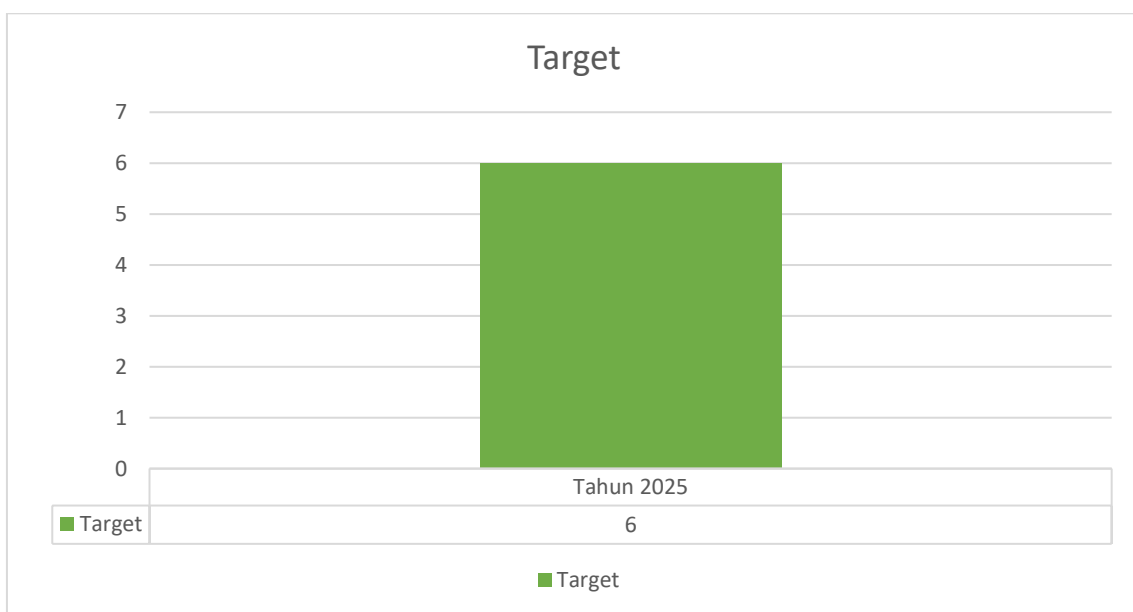
1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute/trayek angkutan perintis di Provinsi Kalimantan Barat dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
3. Dapat terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat.
5. Dapat terus mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
6. Selalu menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.
7. Dapat mewujudkan konektivitas transportasi darat.

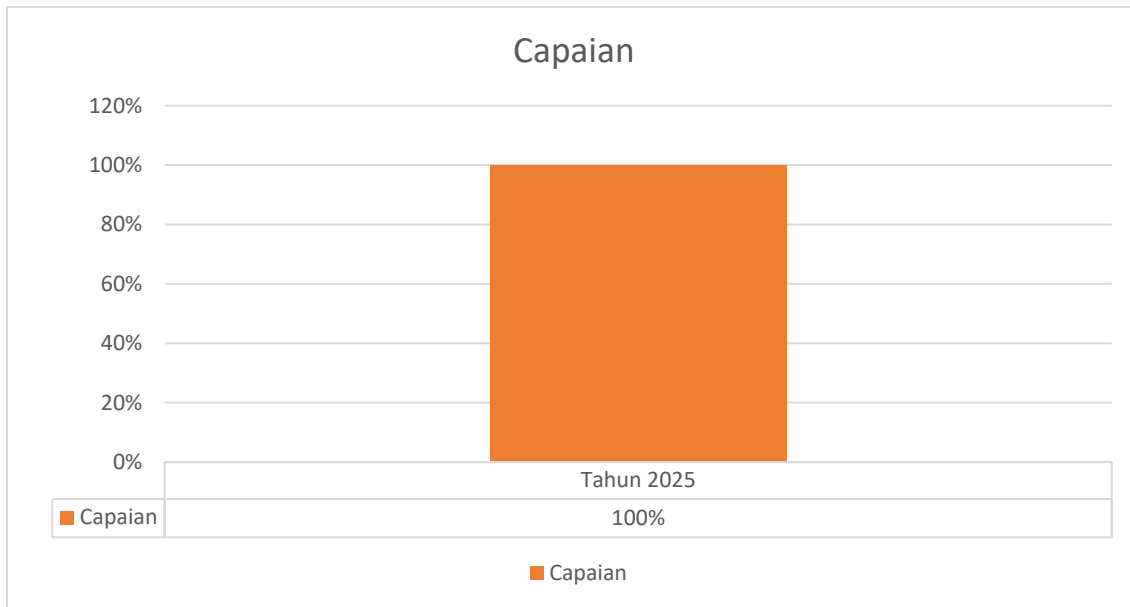
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan tahun 2025 sebesar 6 trayek jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 6 trayek maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

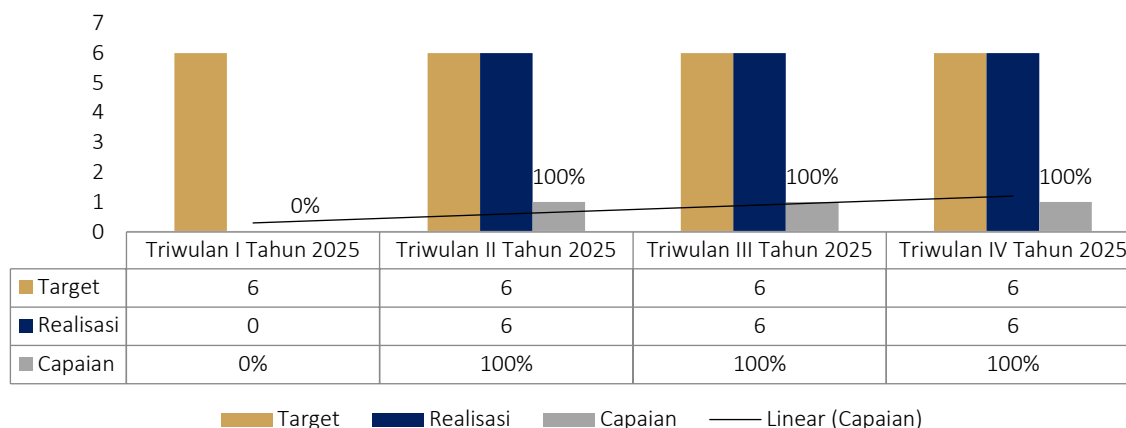
SK 1.1.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 1.1.1.A	6	6	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan tahun 2025 sebesar 6 trayek jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 6 trayek maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.2** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan 1.2.1: Meningkatnya Raso Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal perhubungan Darat maupun pada Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah dengan



mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memiliki nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian sasaran kegiatan 1.2.1 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu:

2. IKK 1.2.1A Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

IKK 1.2.1A Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

A.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Barat memiliki satuan pelayanan pelabuhan penyebrangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyebrangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;

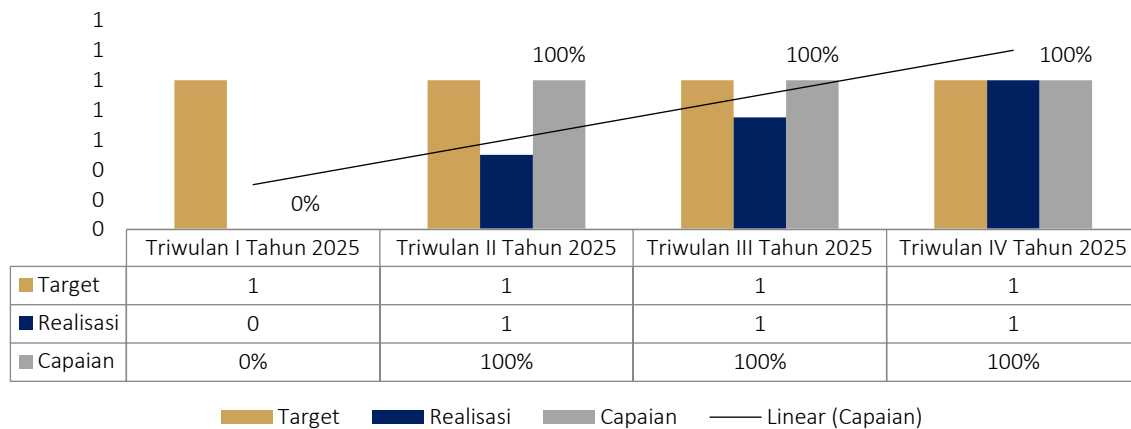
Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas tahun 2025 sebesar 1 unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 1 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3** Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas.



Gambar III. 3 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

1. PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas PM No 6 Tahun 2023 bahwa BPTD memiliki tugas untuk melakukan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
2. PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau maka dengan ini ditetapkan dasar untuk pengawasan dan pelayanan terhadap pelabuhan penyebrangan yang dibangun dan beroperasi dalam rangka mendukung konektivitas.



- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas memiliki target 1 Unit yang diperoleh dari capaian terhadap Draft Renstra 2025-2029.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat;
2. Jalur yang dilayani memang untuk masyarakat yang terisolir;
3. Kepastian jam operasional Keperintisan Angkutan Penyebrangan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor Kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas antara lain:

1. Faktor cuaca seperti tingginya ombak laut.
2. Jadwal operasional tidak terlalu banyak.
3. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan.



- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas triwulan IV tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas tahun 2025 yaitu Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang Tahap IV senilai Rp. 3.269.905.000,-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyebrangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki moda transportasi lain secara memandai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat.

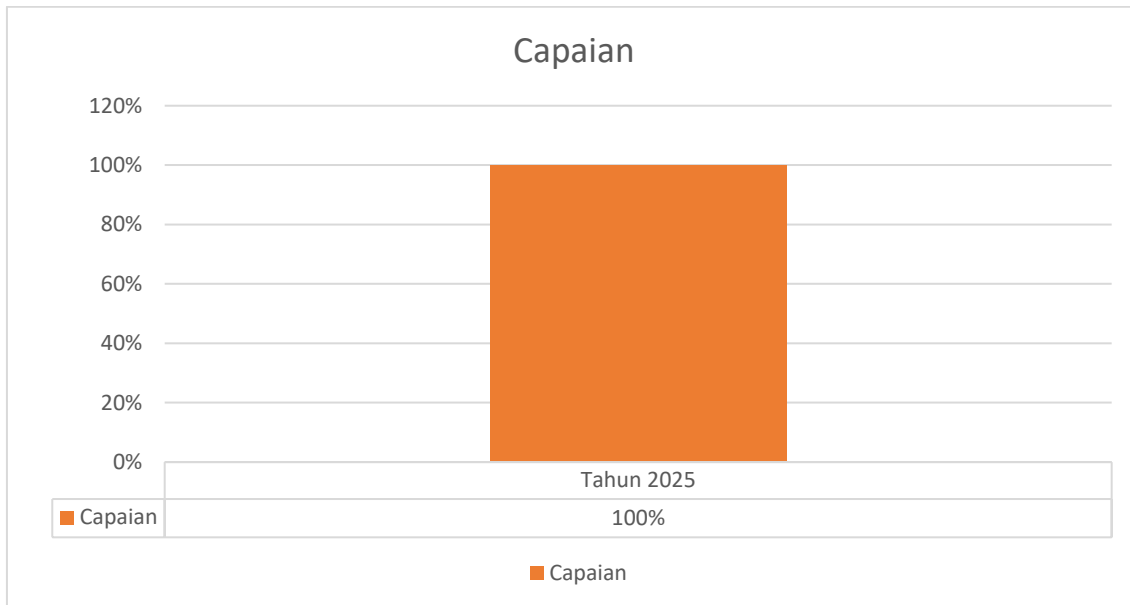
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas tahun 2025 sebesar 1 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 1 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III. 3** Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Pada Tahun 2025

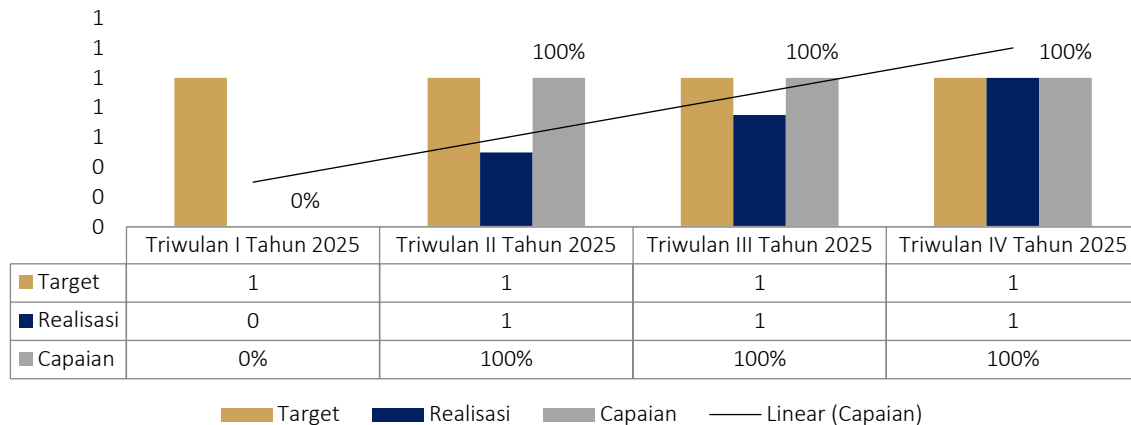
SK 1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 1.2.1A	1	1	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas tahun 2025 sebesar 1 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 1 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.4** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 diukur melalui 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM
2. IKK 2.1.4 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM
3. IKK 2.1.5 Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

IKK 2.1.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

A.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Barat memiliki 1 (satu) Satuan Pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi yaitu Terminal Tipe-A Sei Ambawang. Terminal Tipe-A Sei Ambawang memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagai berikut:

- Fasilitas Utama
 - a. Jalur Keberangkatan



- b. Jalur Kedatangan
 - c. Ruang Tunggu Penumpang
 - d. Area Parkir Penjemput/Pengantar
 - e. Perlengkapan Jalan
 - f. Loker Penjualan Tiket
 - g. Pusat Informasi
 - h. Media Informasi
 - i. Gedung Utama/Kantor Terminal
 - j. Toilet Umum
 - k. Gudang
- Fasilitas Penunjang
- a. Klinik
 - b. Fasilitas Keamanan
 - c. Gerai ATM
 - d. Pool Bus
 - e. Kios/Kantin
 - f. Masjid
 - g. Wi-Fi
 - h. Tempat bermain anak

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Sei Ambawang terhadap calon penumpang. Penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- a. Aspek Pelayanan Publik
Petugas memberikan informasi aah, lokasi terkait situasi di terminal. Mengarahkan bus sebagai petugas pengatur lalu lintas, memberikan pelayanan kepada sopir dan penumpang.
- b. Aspek Keamanan
Petugas ditempatkan di beberapa pos pemantauan situasi di terminal upaya menjaga keamanan disekitar terminal, melakukan rampcheck untuk pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum sebelum



berangkat, dan sistem di terminal sudah dilengkapi dengan CCTV untuk keamanan pengguna terminal.

c. Aspek Kenyamanan

Sudah tersedia fasilitas-fasilitas penunjang di terminal seperti toilet, ruang tunggu, tempat ibadah, tempat bermain anak, kantin/kios dan klinik agar kenyamanan pengguna terminal tetap di utamakan.

d. Aspek Sosial

Sifat dan sikap terhadap masyarakat sebagai pengguna terminal harus diterapkan oleh setiap petugas, pelayanan yang ramah dan sopan oleh petugas Terminal Tipe-A Sei Ambawang agar terjalin hubungan harmonis.

e. Aspek Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas utama dan penunjang sudah tersedia di Terminal Tipe-A Sei Ambawang, meskipun beberapa kondisi fasilitas ada yang rusak ringan.

f. Aspek Inovasi dalam bekerja

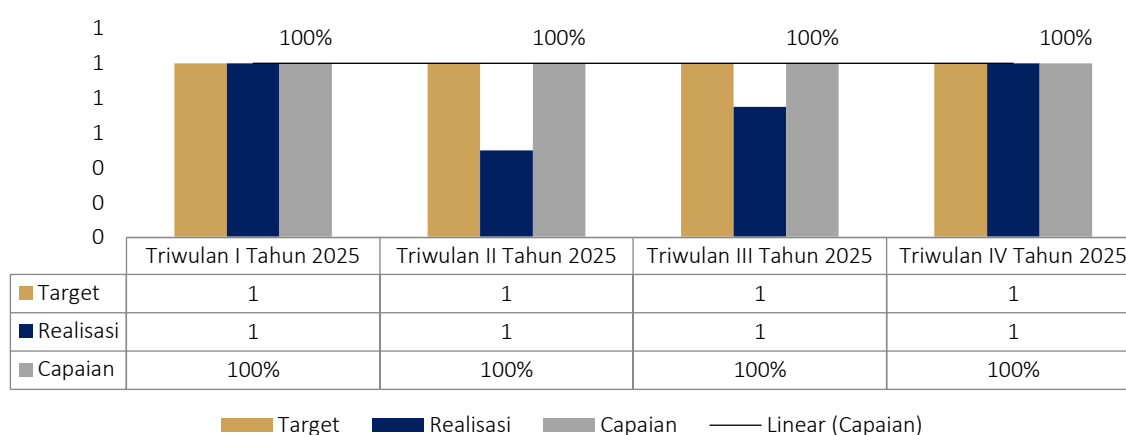
Setiap petugas terminal disaat bertugas sudah memiliki inovasi-inovasi dalam bekerja, seperti aktif dalam memeberikan informasi terkait keselamatan dalam penggunaan transportasi umum juga informasi keberangkatan maupun kedatangan kendaraan dan penumpang, dan mengupload beberapa kagiatan-kegiatan terminal di media sosial.

Capaian kinerja Jumlah terminal tipe-A yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM tahun 2025 sebesar 1 unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 1 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5** Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM.



Gambar III. 5 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang angkutan Jalan;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Kronologi target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM memiliki target 1 unit yang diperoleh dari capaian terhadap Draft Renstra 2025-2029.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meramaikan terminal Tipe-A Sei Ambawang dalam tahun 2025 sebagai berikut:

No	Upaya Yang Dilakukan	Tujuan	Capaian
1	Sosialisasi kepada PO yang masih melakukan penjualan tiket diluar terminal	Agar PO berkantor dan menjual tiket di dalam Terminal	Beberapa PO sudah melakukan kerjasama sewa loket di terminal
2	Edukasi dan himbauan kepada penumpang dan masyarakat tentang aturan terminal	Menjadikan fungsi terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang	Masyarakat mulai sadar memahami dan mematuhi aturan
3	Penegakan hukum dan penindakan terhadap angkutan umum yang melanggar aturan	Menertibkan Angkutan Umum agar tertib dan masuk ke terminal	Masih banyak angkutan umum yang melakukan pelanggaran (tidak masuk ke terminal dan masih menurunkan penumpang di loket luar terminal)



No	Upaya Yang Dilakukan	Tujuan	Capaian
4	Promosi dan ekspos lingkup terminal lewat media sosial dan media cetak	Agar masyarakat mengetahui lingkup dan mengfungsikan terminal	Postingan kegiatan terminal lewat facebook, Instagram dan TV Nasional.

Capaian kerja terhadap aspek sebagai indikator di Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Sei Ambawang sudah mencapai 100% (maksimal) di triwulanannya.

- Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu;
2. Tersedianya anggaran kegiatan;
3. Memiliki sistem dan prosedur yang jelas.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM antara lain:

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

- Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM tahun 2025 adalah 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM yang beroperasi tahun 2025 yaitu Operasional Terminal Tipe-A Sei Ambawang senilai Rp. 4.050.056.000;.



A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

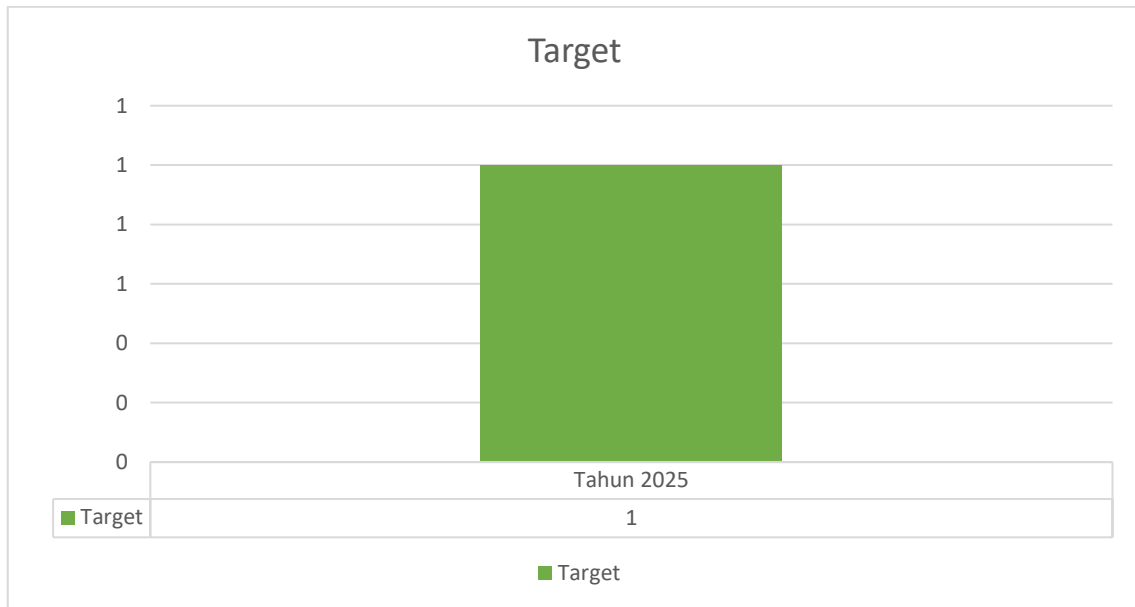
1. Melaksanakan sosialisasi kepada organda serta masyarakat pengguna angkutan umum untuk turut serta meramaikan terminal yang sudah ada;
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
5. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
6. Meningkatkan minta masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
7. Meningkatkan pendapatan PNBPN di Terminal Tipe-A.

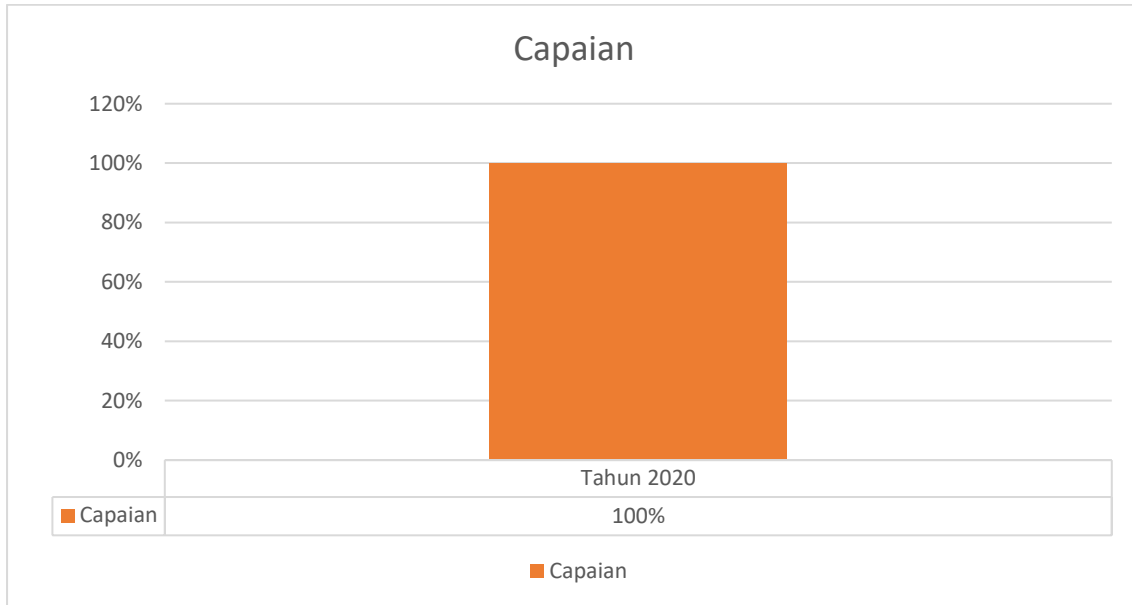
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM tahun 2025 sebesar 1 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 1 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

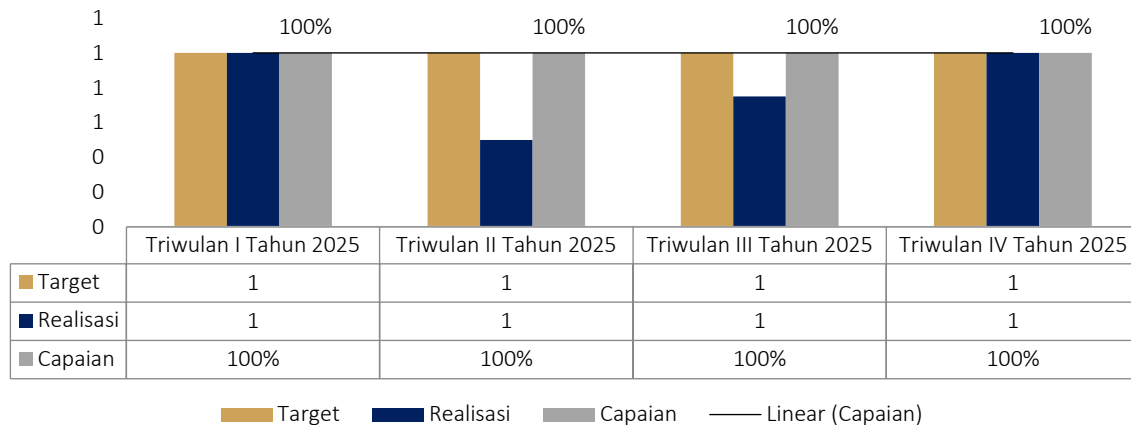
SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 2.1.2	1	1	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM tahun 2025 sebesar 1 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 1 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.6** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

IKK 2.1.4 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM

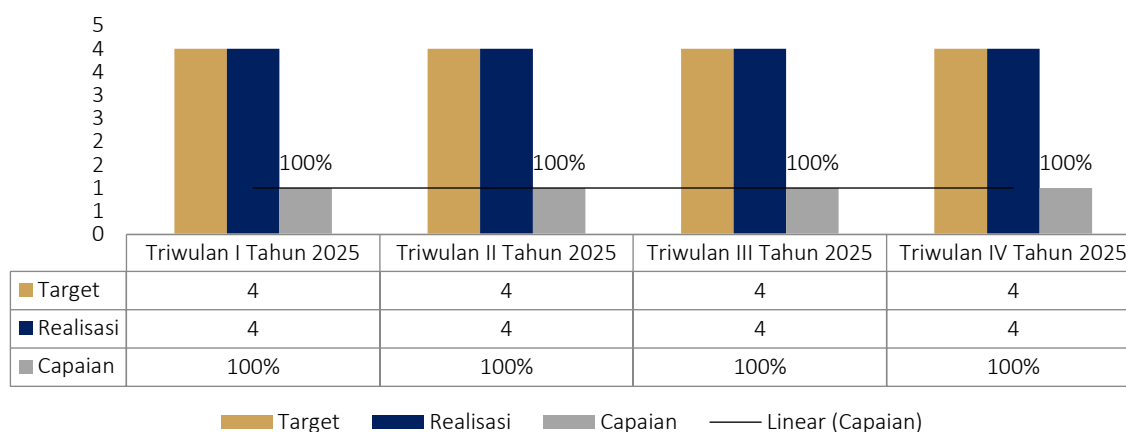
A.1 Definisi Indikator Kinerja

UPPKB adalah unit di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap muatan kendaraan bermotor, khususnya terkait berat kendaraan dan muatannya, untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan. IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM memiliki target 4 Unit. Adapun jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM, yaitu:

1. UPPKB Siantan (Beroperasi);
2. UPPKB Sosok (Beroperasi);
3. UPPKB Sintang (Beroperasi);
4. UPPKB Satong (Beroperasi);
5. UPPKB Sedau (Tidak Beroperasi/Jaga Aset);
6. UPPKB Sekadau (Tidak Beroperasi/Jaga Aset).

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 4 unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 4 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7** Grafik Capaian IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM.



Gambar III. 7 Grafik Capaian IKK Jumlah Fasilitas Peimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

1. Peraturan menteri Perhubungan RI Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Taat Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM memiliki target 4 Unit.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM tahun 2025 terdapat target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM antara lain:

1. Ketersediaan dan Keandalan Sarana dan Prasarana;
2. Dukungan Teknologi Informasi;
3. Petugas penimbang yang memahami standar operasional prosedur (SOP).

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM antara lain:

1. Alat Penimbang Tidak Akurat/Rusak;
2. Kurangnya SDM atau Petugas Tidak Kompeten;
3. Sistem Manual, Tidak Terintegrasi.



- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM Tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen.

- **Realisasi Kinerja**

Adapun anggaran terkait Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM Tahun 2025 yaitu Operasional UPPKB senilai Rp. 4.630.820.000;-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

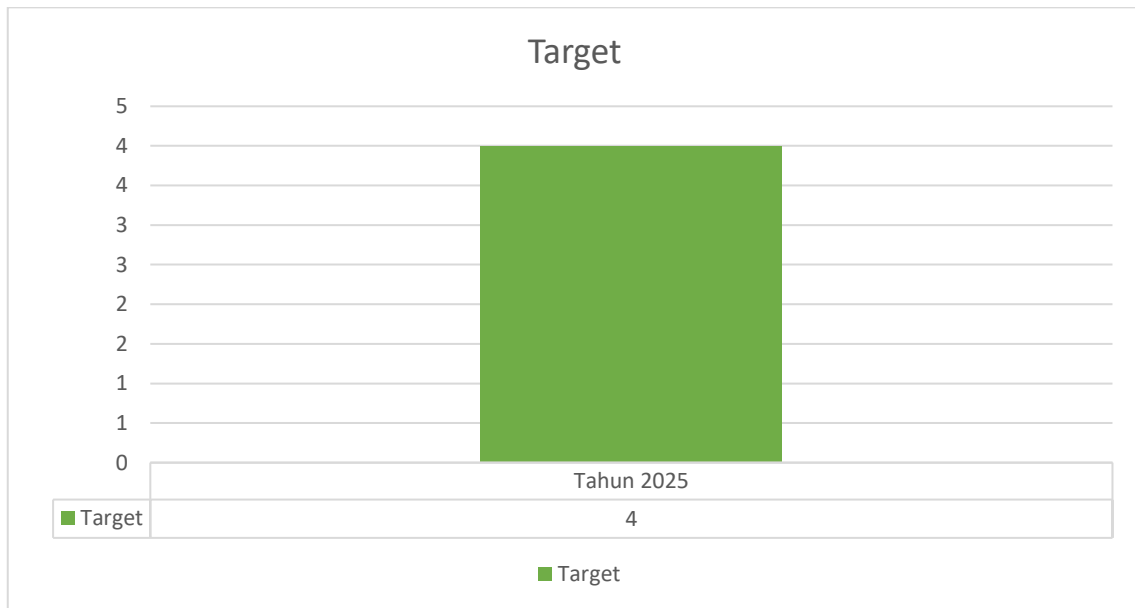
1. Modernisasi Peralatan dan Infrastruktur;
2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem;
3. Pelatihan berkala untuk petugas tentang teknis penimbangan, peraturan dan etika pelayanan publik.

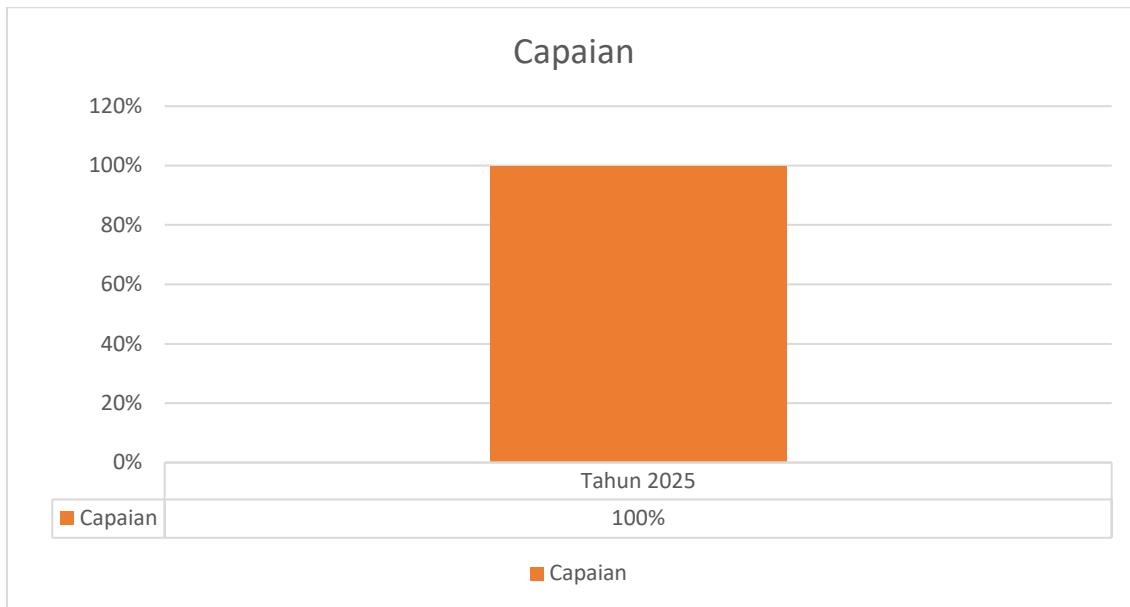
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 4 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 4 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 5 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

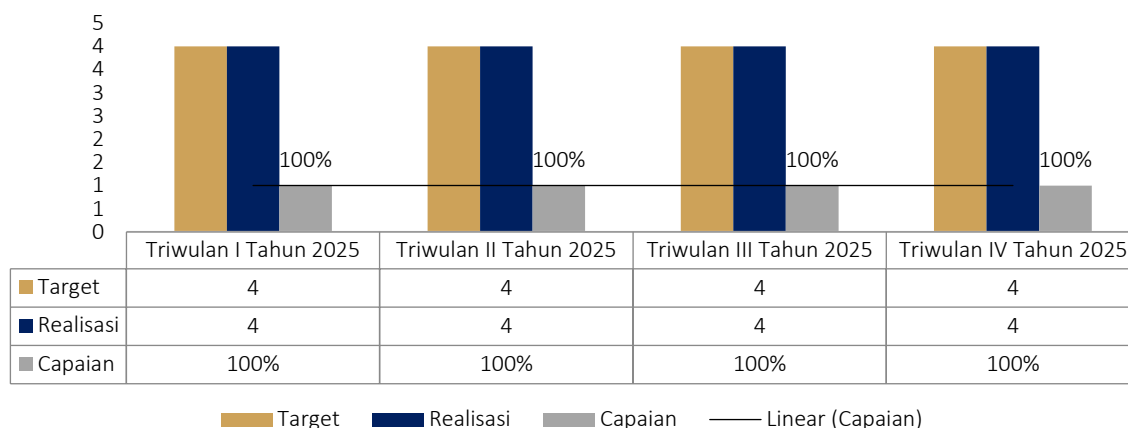
SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 2.1.4	4	4	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 4 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 4 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.8** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

IKK 2.1.5 Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi

A.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ merupakan proses pengamatan, pencatatan dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas, program atau kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, standar operasional dan target yang ditetapkan. Adapun tujuan dari kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu:

1. Mengetahui apakah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dijalankan dengan baik;
2. Mengukur capaian kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan;
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

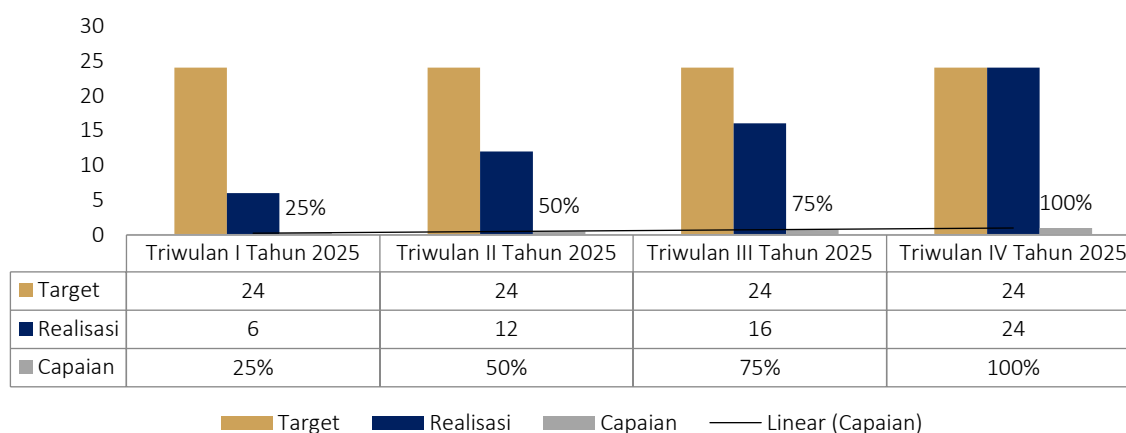
Adapun pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan pokok, yaitu:

1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan;

2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan;
3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana;
4. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ tahun 2025 sebesar 24 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 24 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9** Grafik Capaian IKK Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok.



Gambar III. 9 Grafik Capaian IKK Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;



2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Kronologi Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ memiliki target 24 Kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap Draft Renstra Tahun 2025-2029.
 - Faktor Keberhasilan
Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi antara lain:
 1. Kejelasan Tujuan dan Indikator Kinerja;
 2. Keterlibatan pihak terkait (*Stakeholder*);
 3. Sistem Pelaporan dan Monitoring yang Efisien.
 - Faktor Kegagalan
Adapun faktor kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ antara lain:
 1. Data tidak akurat, tidak lengkap atau tidak tersedia;
 2. Tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP), kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara tidak konsisten dan tidak profesional;
 3. Rekomendasi hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen atas unit kerja terkait.
 - Realisasi Kinerja
Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator kinerja Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ pada triwulan IV tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai Realisasi dibagi nilai terget dikali 100 persen.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ yaitu Monitoring Pengelola Sarana dan Angkutan, Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan, Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana dan Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas senilai Rp. 3.017.105.000,-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan SOP dan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
2. Peningkatan Keterlibatan *Stakeholder*;
3. Tindak lanjut rekomendasi secara nyata

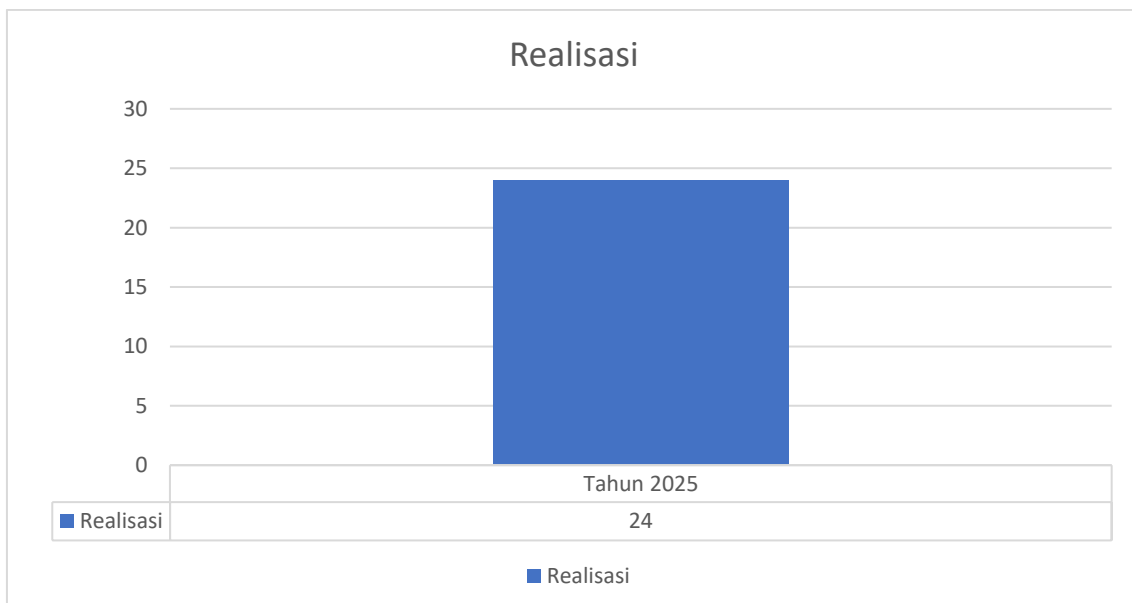
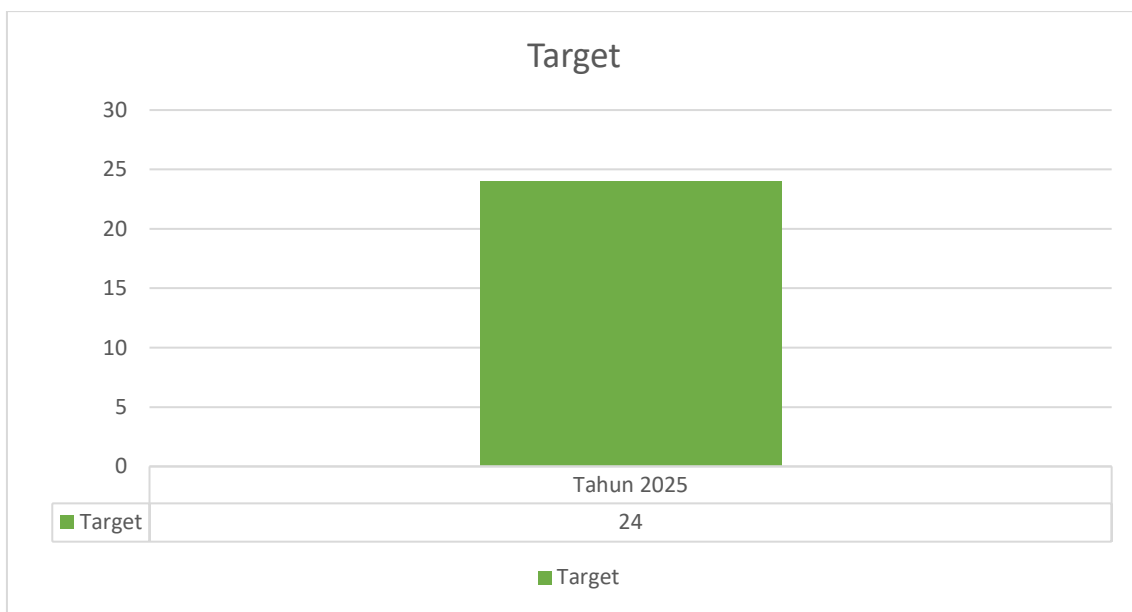
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

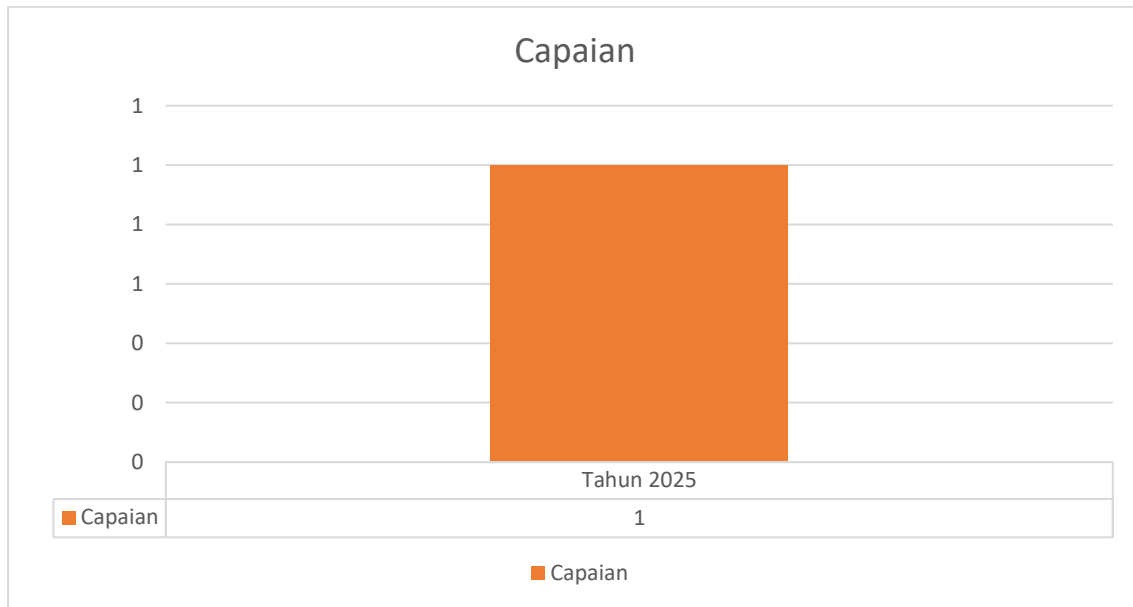
Realisasi kinerja Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 24 Kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 24 Kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%.

Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 6 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

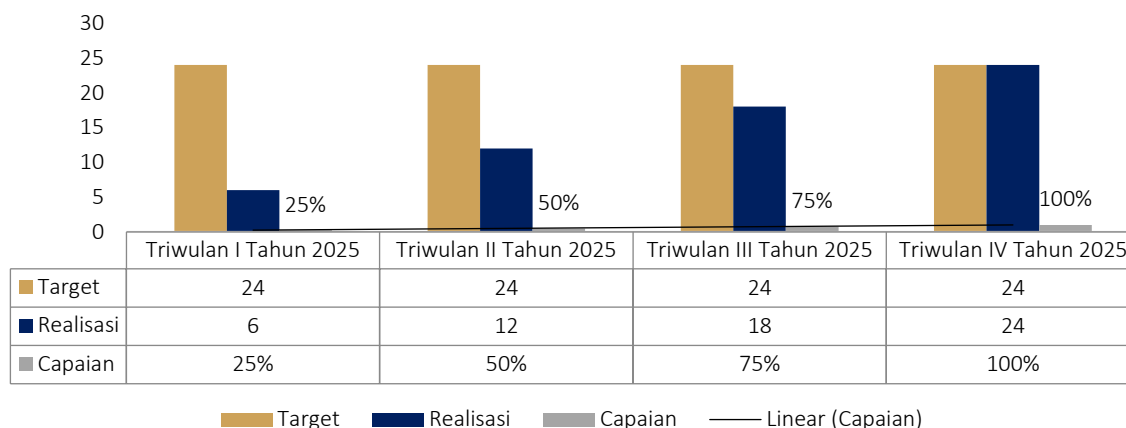
SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transporasi Jalan						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 2.1.5	24	24	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ tahun 2025 sebesar 24 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 24 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan 2.2: Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal perhubungan Darat maupun pada Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah dengan



mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memiliki nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (Satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM

IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM

A.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Barat memiliki satuan pelayanan pelabuhan penyebrangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyebrangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;

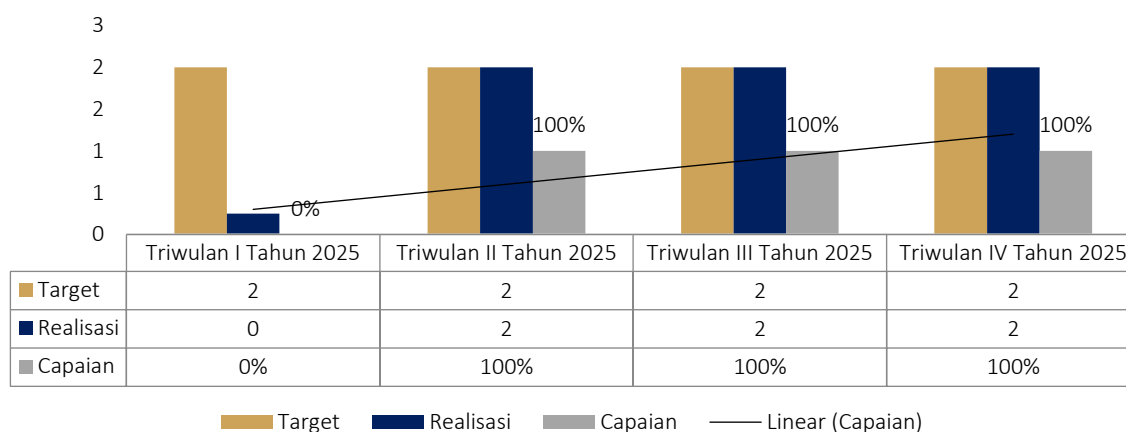
Capaian kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM tahun 2025 sebesar 2 unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 2 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6** Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM.



Gambar III. 11 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Kalimantan Barat terdata 4 (Empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2025 ada 2 (Dua) Pelabuhan SPD yang beroperasi sesuai dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Peyebangan Sesuai SPM memiliki target 2 unit.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Peyebangan Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebangan Sesuai SPM antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Koordinasi yang selalu terjalin dengan *stakeholder* terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

- Faktor Kendala

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Peyebangan Sesuai SPM antara lain:

1. Kurangnya SDM yang ada;
2. Keadaan alam seperti pasang air laut yang sering terjadi di sekitar kantor;
3. Masih perlu peningkatan fasilitas kantor.

- Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Peyebangan Sesuai SPM triwulan IV tahun 2025 adalah 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM senilai Rp. 865.338.023,-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai, danau dan penyebrangan;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
4. Peningkatan fasilitas kantor.

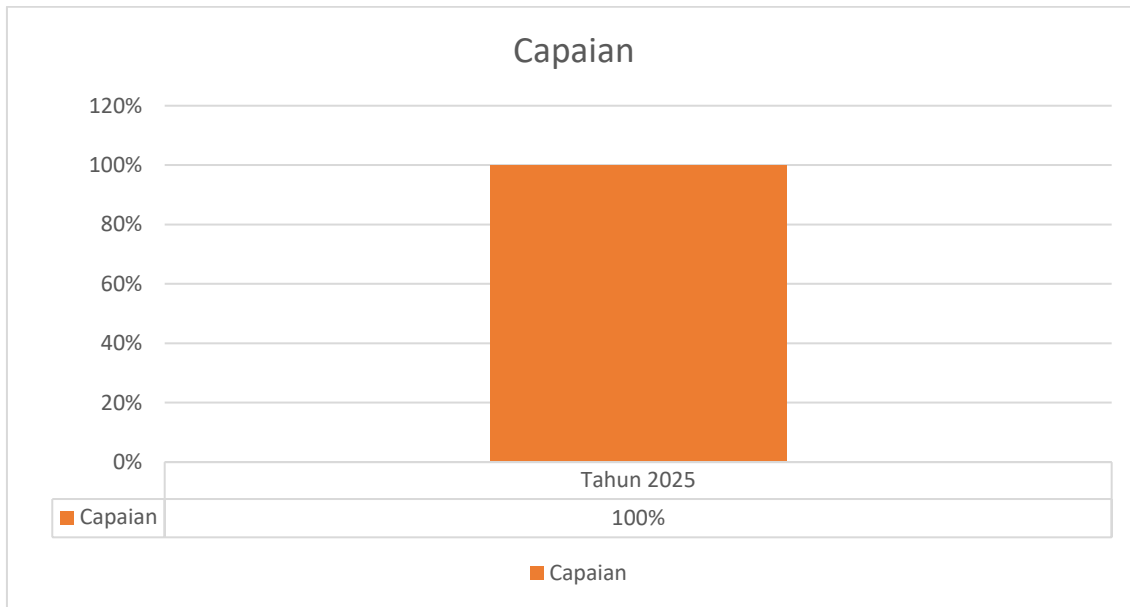
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM tahun 2025 sebesar 2 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 2 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

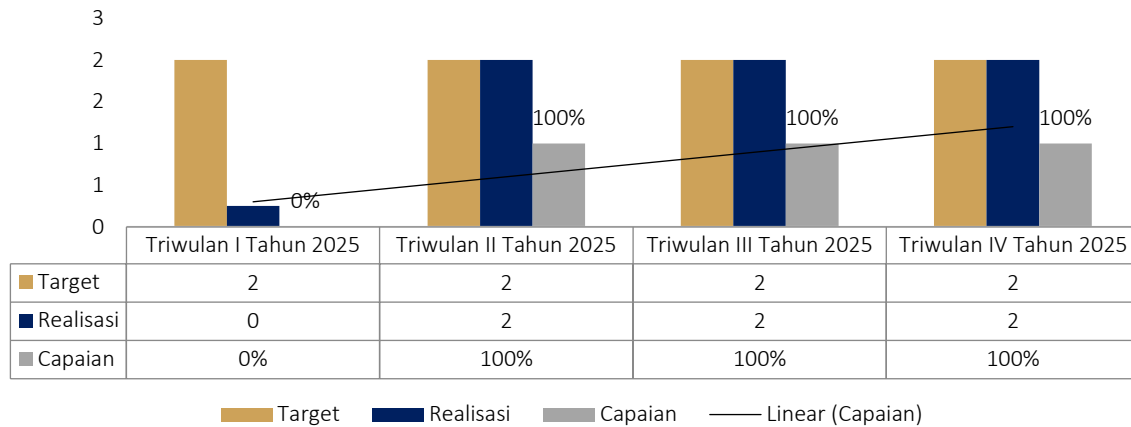
SK 2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 2.2.2	2	2	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM tahun 2025 sebesar 2 unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 2 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.12** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan 3.2 Meningkatkan Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3.2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan pedoman
2. IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB

IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

A.1 Definisi Indikator Kinerja

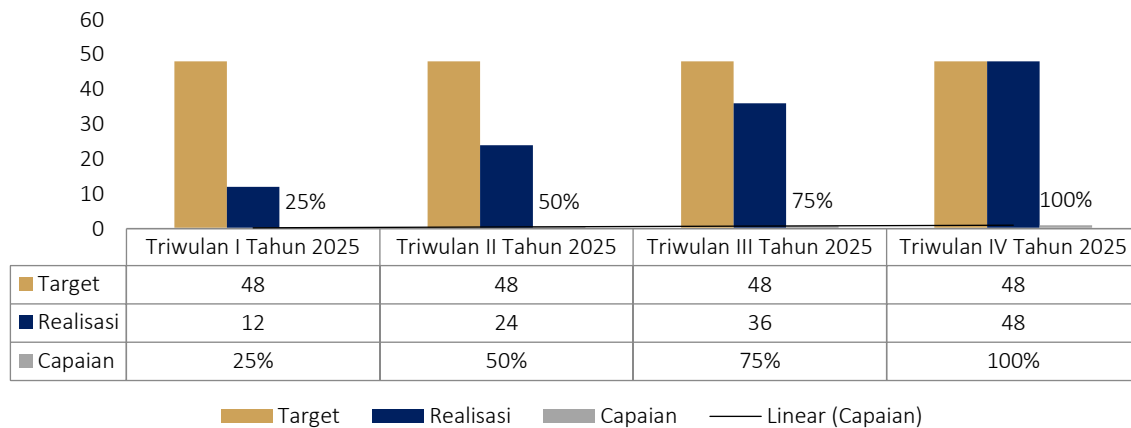
Kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan adalah serangkaian proses pemeriksaan langsung terhadap fisik kendaraan bermotor hasil produksi, untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut sesuai dengan desai teknis atau rancang bangun yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman tahun 2025 sebesar 48 laporan jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 48 laporan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.13** Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman.



Gambar III. 13 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;



2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Taat Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Kronologi Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman memiliki target 48 laporan yang diperoleh dari capaian terhadap Draft Renstra tahun 2025-2029.
 - Faktor Keberhasilan
Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun kendaraan Sesuai dengan Pedoman antara lain:
 1. SDM penguji yang kompeten dan bersertifikasi;
 2. Tersedianya peralatan dan fasilitas uji yang lengkap dan akurat;
 3. Standar pemeriksaan dan SOP yang terpadu.
 - Faktor Kegagalan
Adapun faktor kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman antara lain:
 1. Kurangnya kompetensi SDM;
 2. Tidak tersedianya peralatan dan fasilitas uji yang lengkap dan akurat;
 3. Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan.
 - Realisasi Kinerja
Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 70.000.000,-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

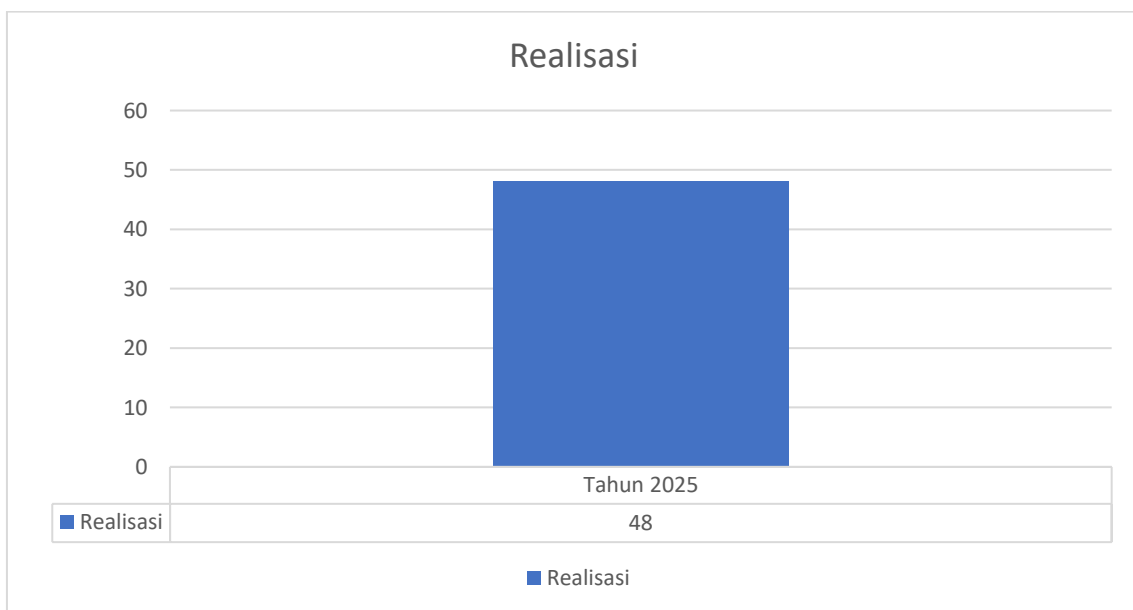
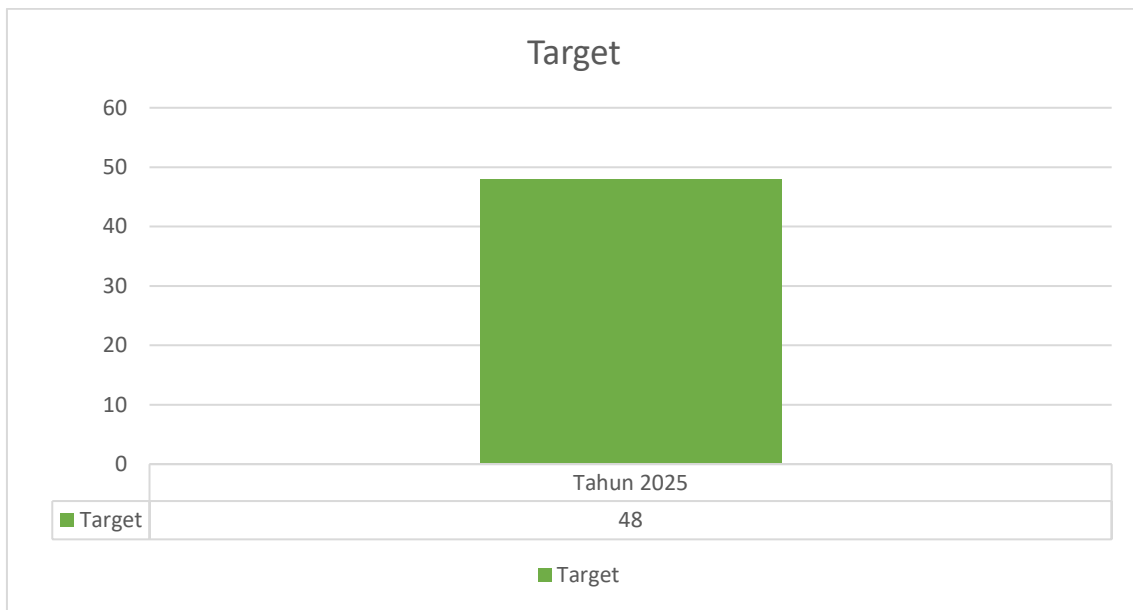
1. Penguatan kompetensi SDM;
2. Penguatan prosedur pemeriksaan;
3. Kolaborasi dan koordinasi dengan Instansi terkait.

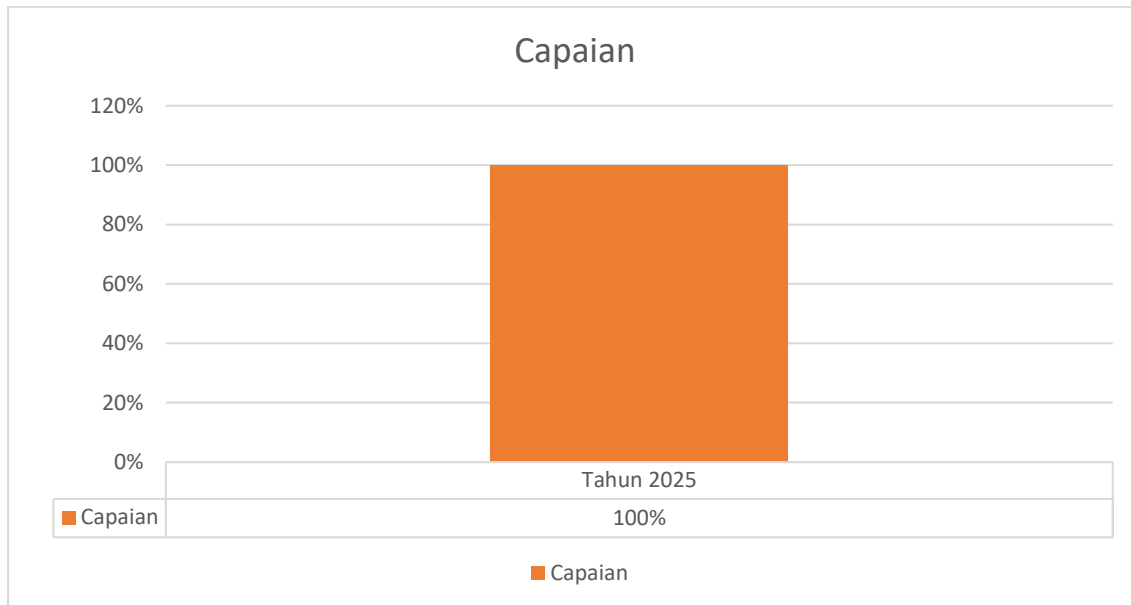
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman tahun 2025 sebesar 48 laporan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 48 laporan maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III. 8** Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

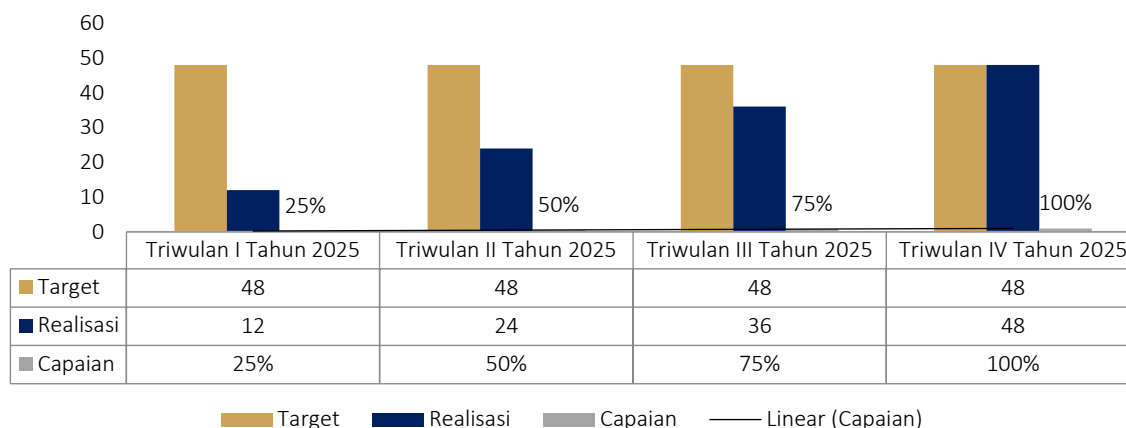
SK3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 3.2.1	48	48	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman tahun 2025 sebesar 48 laporan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 48 laporan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.14** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB

A.1 Definisi Indikator Kinerja

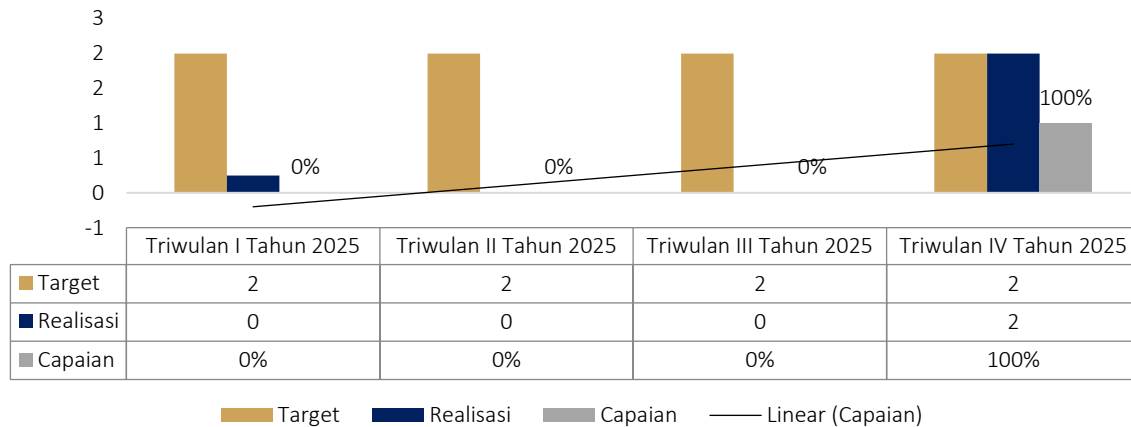
Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di daerah adalah kegiatan untuk memastikan bahwa alat-alat uji yang digunakan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah daerah (UPUBKB) memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini dilakukan secara berkala oleh lembaga kalibrasi terakreditasi agar hasil pengujian kendaraan dapat diandalkan dan sah secara hukum. Adapun pelaksanaan kegiatan indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota dan Kabupaten wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan target 1 Kegiatan.
2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor dengan target 1 Kegiatan.

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II

PK 2025 sebesar 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.15** Grafik Capaian IKK Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB.



Gambar III. 15 Grafik Capaian IKK Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB memiliki target 2 kegiatan yang diperoleh dari target Draft Renstra 2025-2029.
- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB antara lain:

 1. Ketersediaan alat uji sesuai standar;



2. Tersedianya anggaran kegiatan;
3. Koordinasi dengan instansi terkait.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB antara lain:

1. Keterlambatan atau tidak dilakukan kalibrasi;
2. Kondisi alat uji yang tidak layak;
3. Kurangnya kompetensi Petugas;
4. Keterbatasan anggaran kegiatan.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB Tahun 2025 yaitu Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor senilai Rp. 410.000.000;-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penjadwalan kalibrasi yang terencana dan terintegrasi;

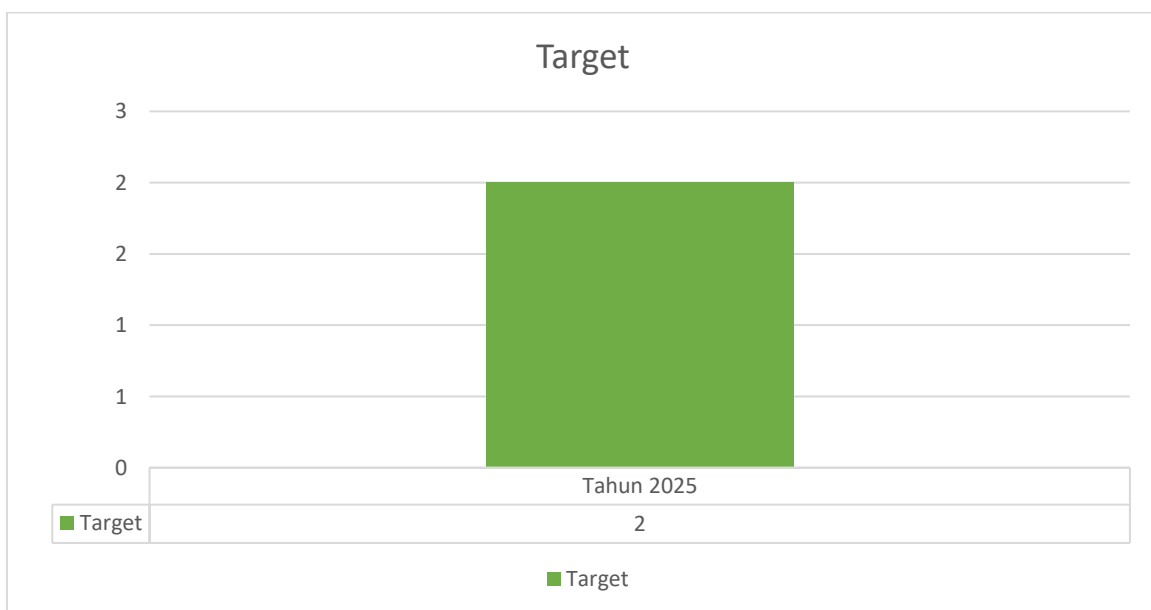
2. Peningkatan kompetensi SDM;
3. Perawatan dan penggantian alat secara berkala.

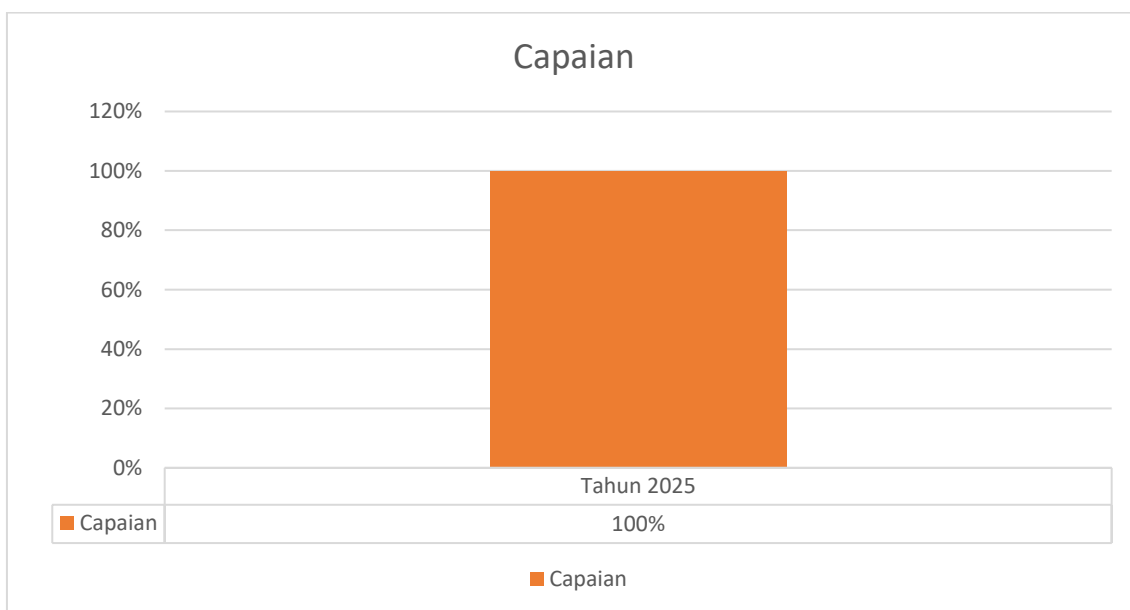
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

SK3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 3.2.2	2	2	100%	Tetap

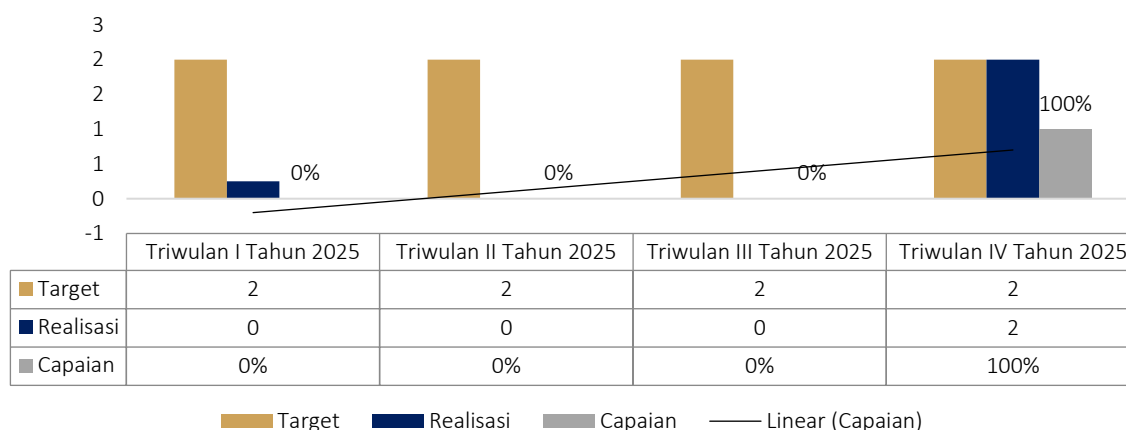




A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 2 kegiatan maka

capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.16** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 16 Perbandingan Realisasi Realisasi Kinerja Jumlah Alat Uji yang telah Dikalibrasi di UPUBKB Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan 3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3.3 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis;
2. IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman.

IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis

A.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Barat memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis.

Kebutuhan perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 7 (Tujuh) item perlengkapan jalan dengan satuan yang berbeda.

1. Alat Penerangan Jalan Tenaga Surya Lengan Tunggal;
2. Marka Jalan;
3. Pagar Pengaman Jalan;
4. Paku Jalan Bulat (Tempered);
5. Warning Light;
6. Rambu Lalu Lintas Jalan;
7. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan.

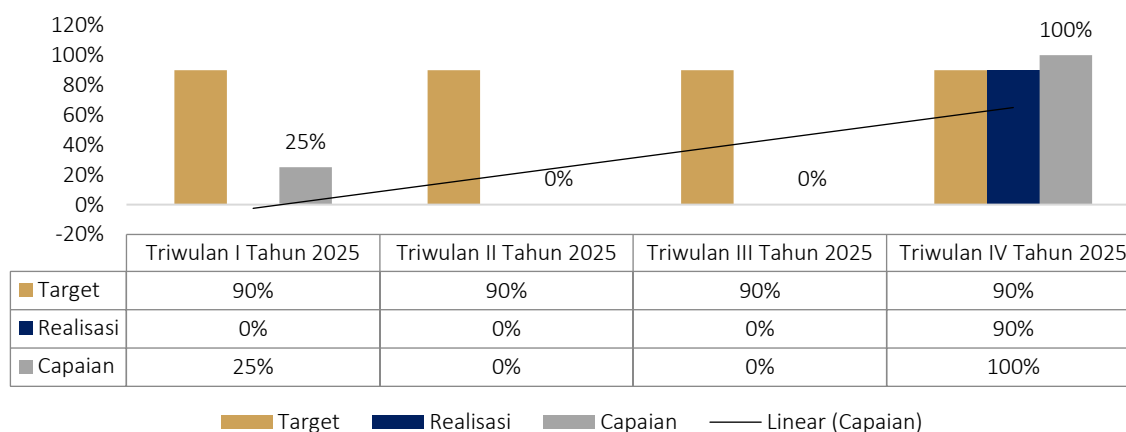
Capaian kinerja jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis tahun 2025 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 90%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.17** Grafik Capaian IKK Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis.



Gambar III. 17 Grafik Capaian IKK Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis

A.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan perlengkapan jalan BPTD Kelas II Kalimantan Barat telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis memiliki target 90%.



- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis antara lain:

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan tidak sesuai dengan kebutuhan.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis adalah 100%. Dimana hasil capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai terget dikali seratus persen.

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis yaitu yaitu Perlengkapan jalan (Prioritas Nasional) senilai Rp. 20.530.192.000;.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas Terminal Tipe-A;
2. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban Terminal Tipe-A;
3. Melaksanakan pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang telah terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis.

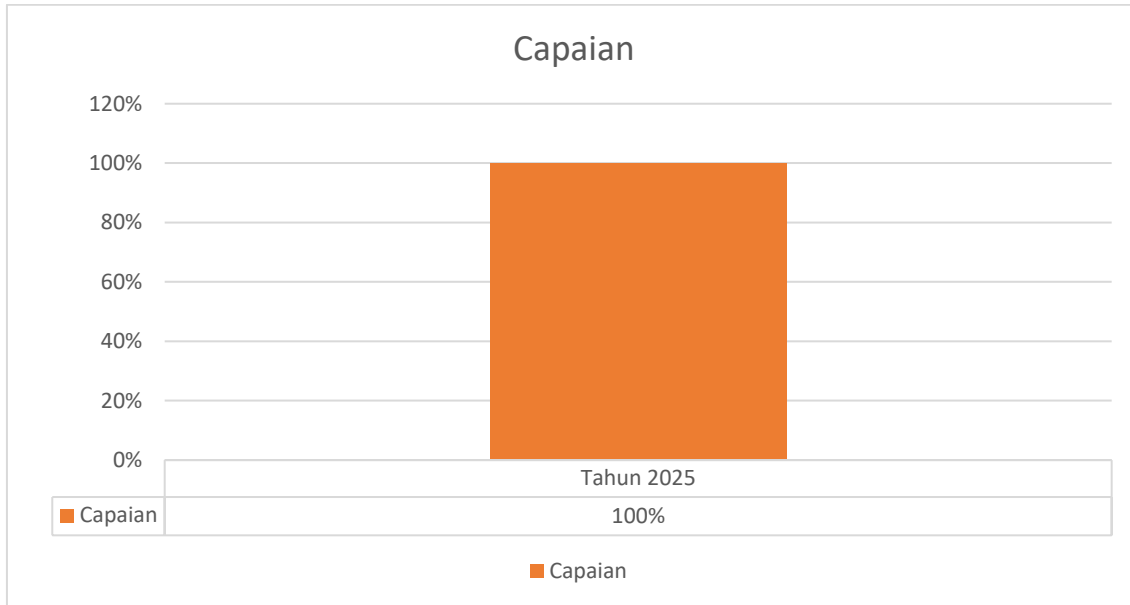
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis tahun 2025 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 10 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

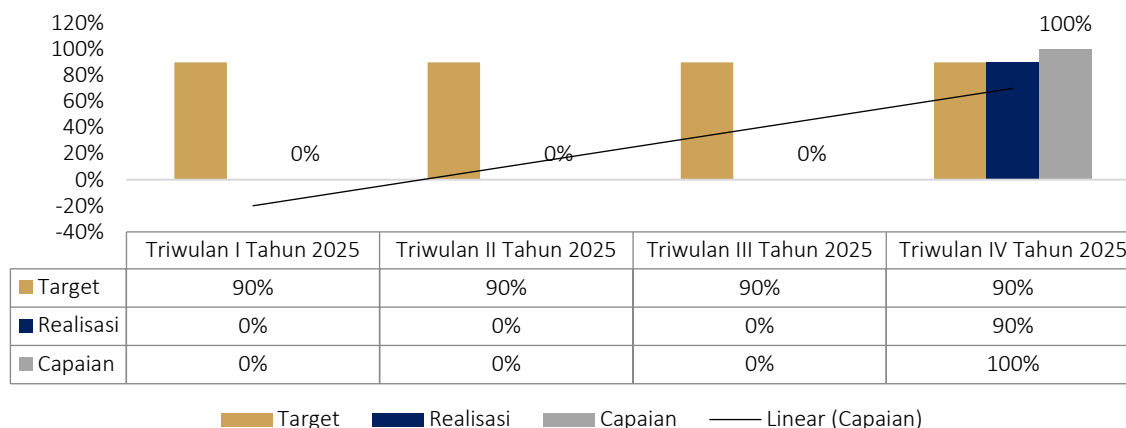
SK3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 3.3.1	90%	90%	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis tahun 2025 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.18** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

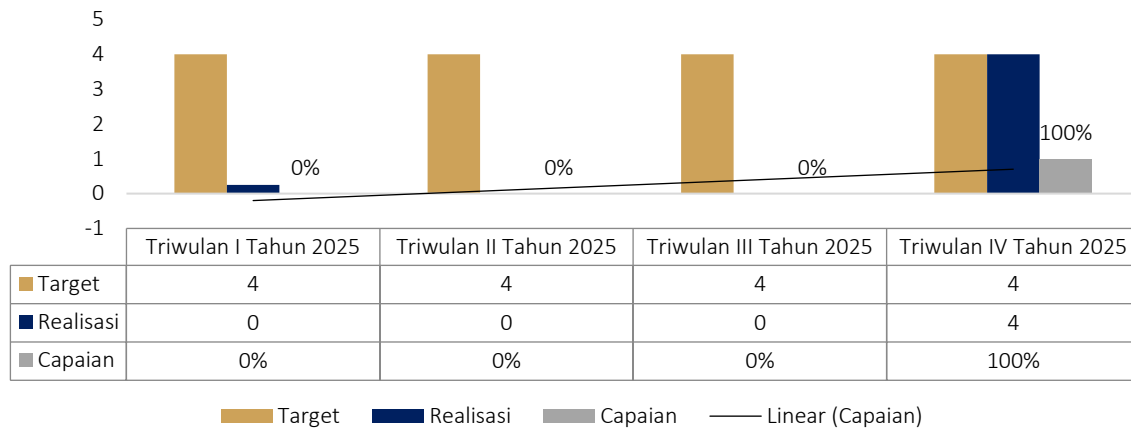
IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

A.1 Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman adalah ukuran kinerja yang menunjukkan kuantitas lokasi rawan kecelakaan yang telah dilakukan Tindakan Penanganan sesuai dengan pedoman teknis oleh BPTD Kelas II Kalimantan Barat. LRP sendiri mencakup daerah yang mempunyai potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang banyak dan dapat menghasilkan angka kecelakaan yang tinggi pada ruas jalan Capaian Kinerja Persentase.

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman tahun 2025 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.19** Grafik Capaian IKK Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman.



Gambar III. 19 Grafik Capaian IKK Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman Terhadap Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan memiliki target 4 Lokasi.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan dalam identifikasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan;



2. Tersedianya data kecelakaan yang akurat dan rinci pada lokasi rawan kecelakaan;
 3. Tersusunnya rencana penanganan yang sistematis dan terorganisir yang berdasaaan pada analisis data yang tepat dan sesuai dengan pedoman teknis
- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Lokasi LRK Yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antar intansi terkait;
 2. Tidak tepatnya identifikasi dari lokasi rawan kecelakaan sehingga data yang diperoleh kurang akurat;
 3. Kurang matangnya penyusunan rencana penanganan LRK.
- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Lokasi LRK Yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Capaian Kinerja
Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.
- Realisasi Anggaran
Adapun anggaran terkait Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman Tahun 2025 yaitu Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) senilai Rp. 1.000.000.000;-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan manajemen antar instansi terkait selaku pemangku kepentingan dalam mewujudkan keselamatan jalan untuk masyarakat;
2. Melakukan pelatihan pada staf teknis dan pengawas tentang cara untuk megidentifikasi, menganalisis dan melakukan perencanaan LRK.

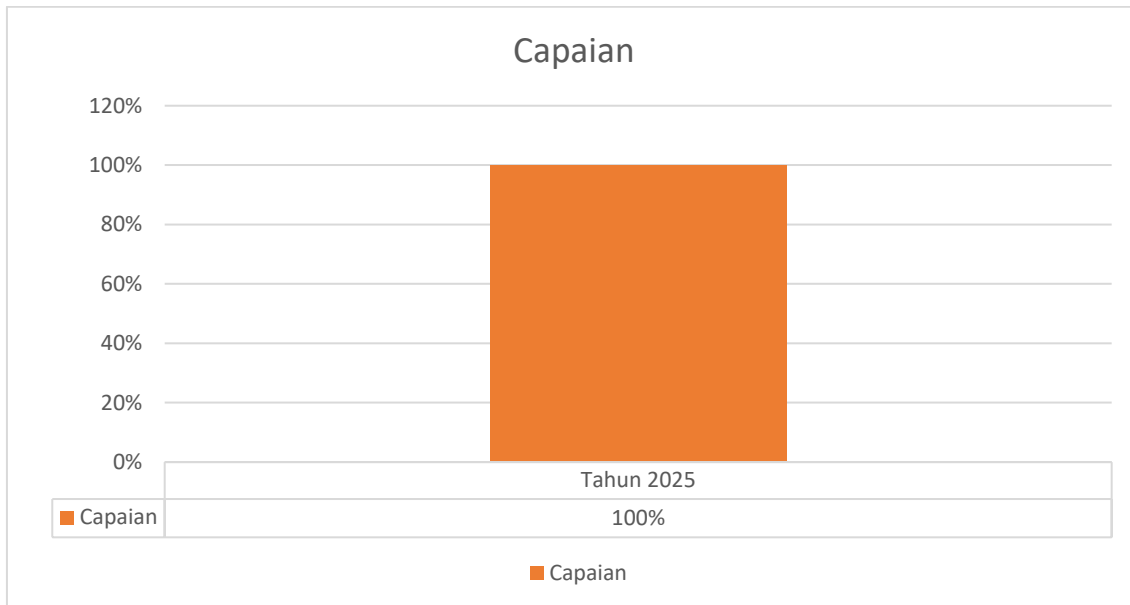
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2025 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 11 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

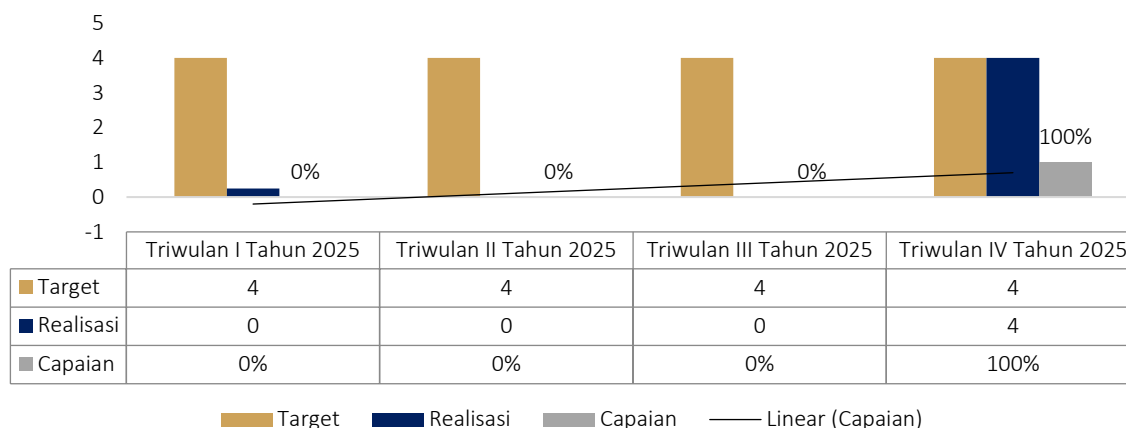
SK3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2025	IKK 3.3.2	4	4	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman tahun 2025 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.20** Perbandingan Realisasi Kinerja Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal perhubungan Darat maupun pada Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah dengan



mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memiliki nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)
2. IKK 4.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)
3. IKK 4.3 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)
4. IKK 4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)
5. IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
6. IKK 4.10 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)

IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)

A.1 Definisi Indikator Kinerja

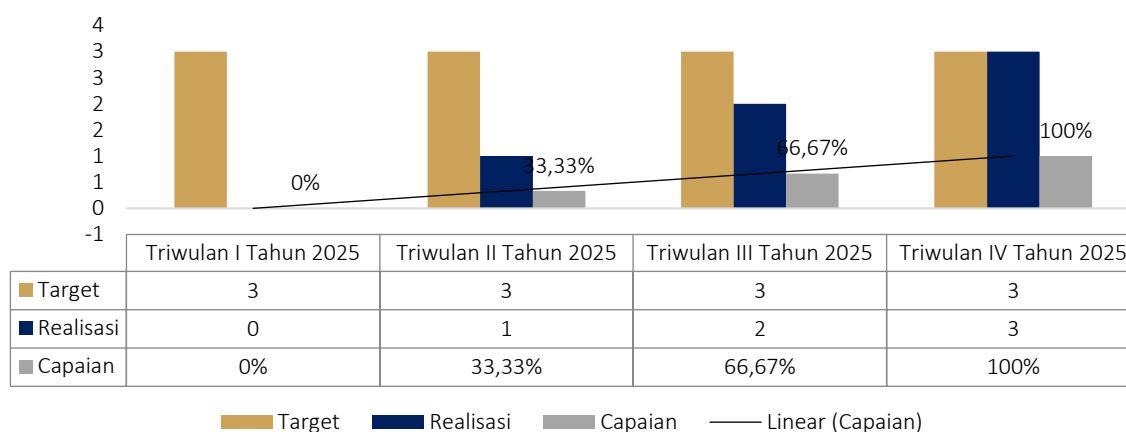
Kegiatan perencanaan pembangunan adalah proses sistematis, terencana dan terpadu yang dilakukan untuk menentukan arah, tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, daerah atau sektoral. Adapun pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yaitu:

1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan;
2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif;
3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) Tahun 2025 telah terlaksana sebanyak 3

kegiatan yaitu penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan dan Penyusunan RKKL Pagu Indikatif, untuk Penyusunan RKKL Pagu Alokasi masih tahap penyusunan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100% Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat. **Gambar III.21** Grafik Capaian IKK Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif).



Gambar III. 21 Grafik Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 9 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor



PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Pengelola Transportasi Darat.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) memiliki target sebesar 3 kegiatan yang diperoleh dari draft Renstra Tahun 2025-2029.

- Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) antara lain:

1. Ketersediaan dan kualitas data;
2. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan lain;
3. Ketersediaan anggaran.

- Faktor Kegagalan

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) antara lain:

1. Data tidak akurat atau tidak tersedia;
2. Lemahnya kapasitas SDM Perencana;
3. Rencana tidak realistis.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) yaitu senilai Rp. 0

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data;
2. Memperkuat kapasitas SDM Perencana;
3. Menjamin konsistensi dengan dokumen perencanaan lain.

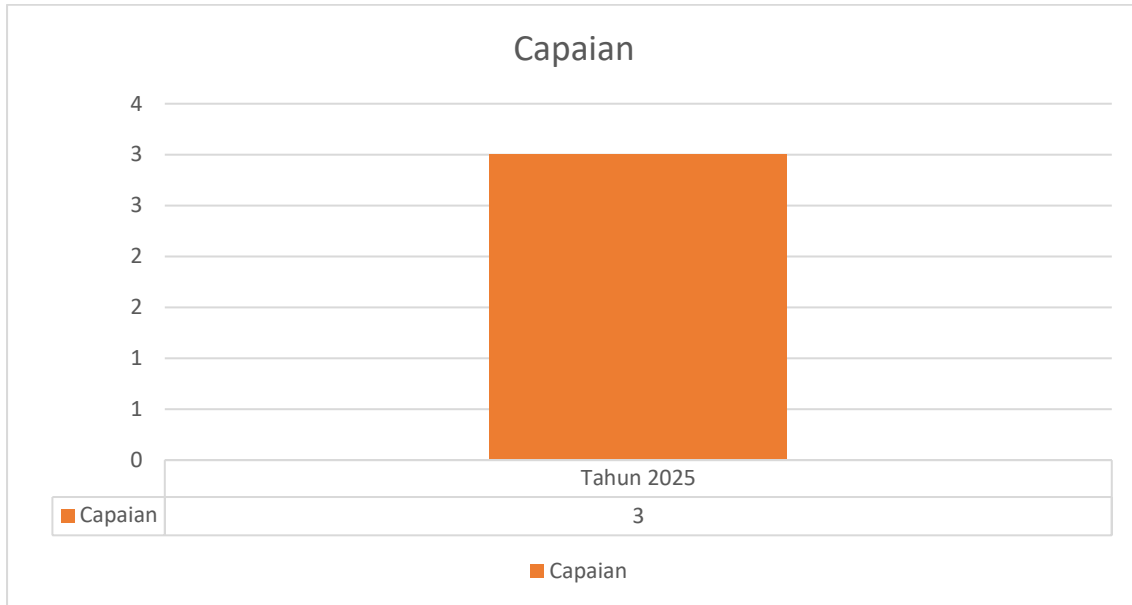
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) tahun 2025 sebesar 3 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 3 Kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III. 12 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

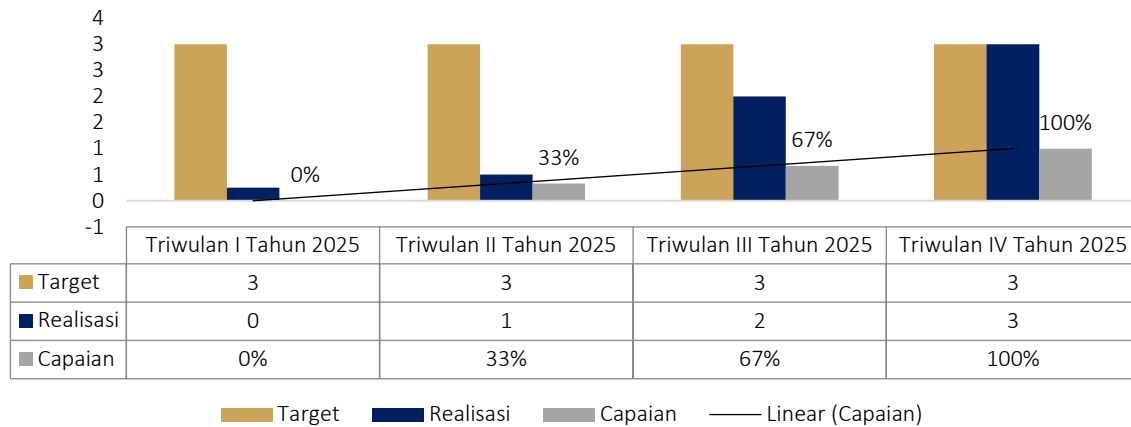
SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/ Turun
1	2026	IKK4.1	3	3	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) tahun 2025 sebesar 3 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 3 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.22** Perbandingan Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) Tahun 2025 terhadap Target Kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

IKK 4.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

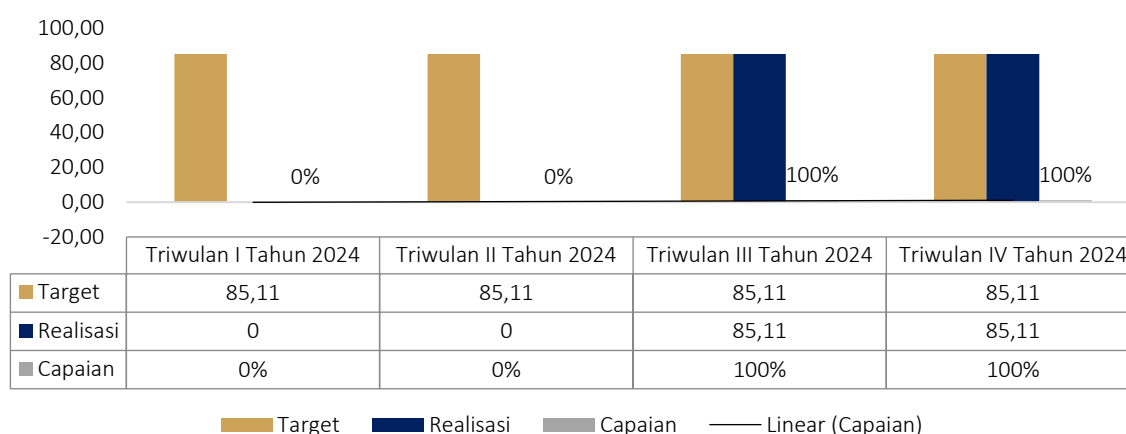
A.1 Definisi Indikator Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun pelaksanaan kegiatan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu penyusunan dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
3. Perjanjian Kinerja;
4. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
5. Monitoring Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
6. Dokumen Laporan Lainnya.

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025.

Realisasi kinerja indikator Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) tahun 2025 senilai 85,11 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2025 senilai 85,11 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.14 Grafik Capaian IKK Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP).



Gambar III. 23 Grafik Capaian IKK Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

A.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Trasnportasi Darat.



- Kronologi target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, indikator kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) memiliki target 85,11 nilai yang diperoleh dari Draft Renstra tahun 2025-2029.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian kegiatan terkait Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) antara lain:

1. Kualitas perencanaan kinerja;
2. SDM yang kompeten dan terlatih;
3. Sistem informasi kinerja yang efektif;
4. Monitoring dan evaluasi berkala.

- Faktor Kendala

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) antara lain:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang buruk;
2. SDM yang tidak memadai;
3. Sistem informasi kinerja yang lemah.

- Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai Realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 0;-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perbaikan perencanaan kinerja secara terintegrasi;
2. Tingkatkan kapasitas SDM;
3. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

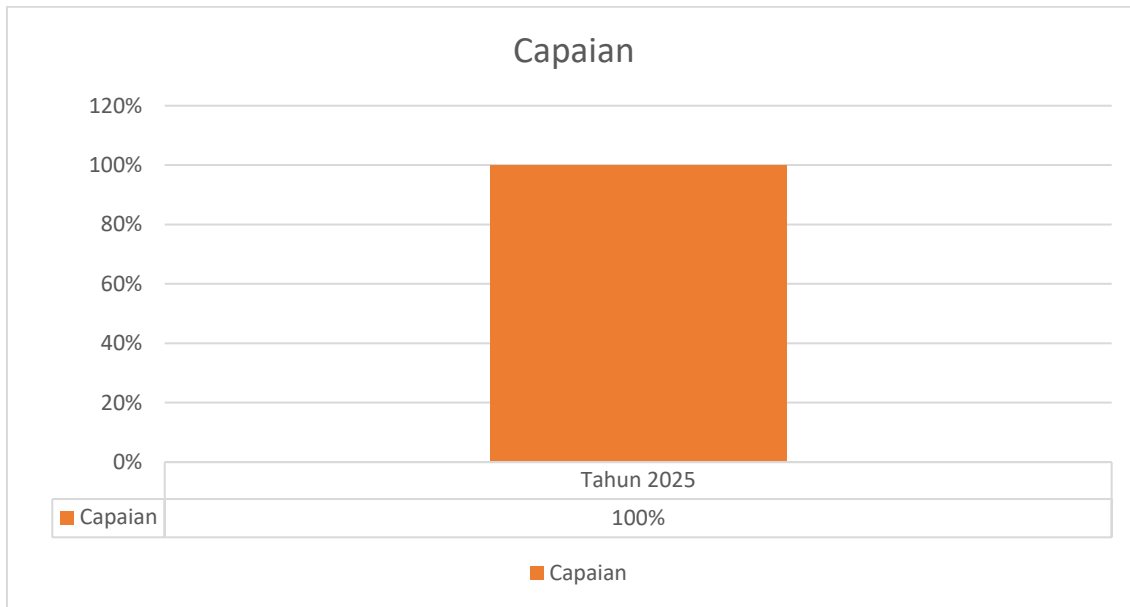
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) tahun 2025 senilai 85,11 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 senilai 85,11 maka capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III. 13 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada Tahun 2025

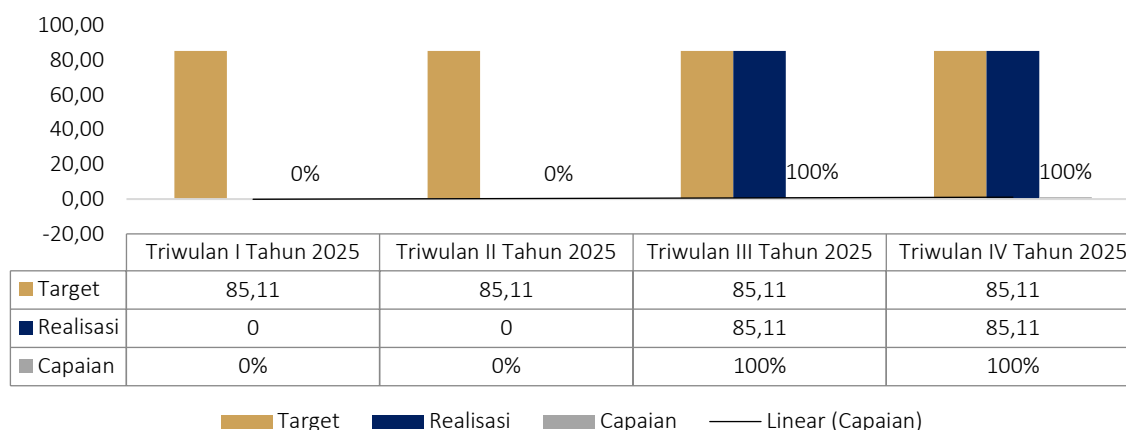
SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat					
No.	Tahun	IKP	Realisasi	Capaian(%)	Naik/Turun
1	2025	IKK4.2	85,11	85,11	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Realisasi kinerja Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) tahun 2025 senilai 85,11 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 senilai 85,11 maka capaiannya kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.24** Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

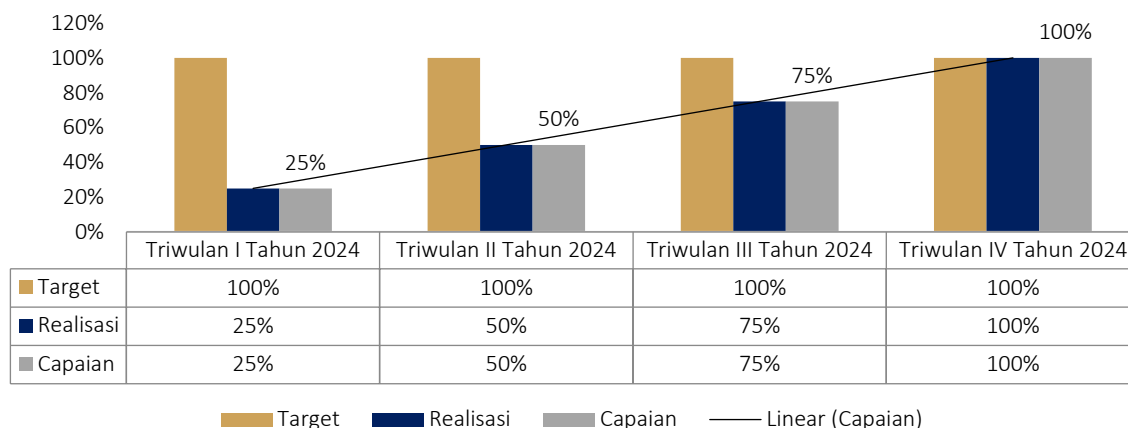
IKK 4.3 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)

A.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) merupakan proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, skuntabilitas dan kualitas dalam penggunaan anggaran negara oleh instansi pemerintah guna mendukung pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) tahun 2025 senilai 81,92 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 81,92, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.16 Grafik Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA).



Gambar III. 25 Grafik Capaian IKK Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (NILAI IKPA)

A.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) memiliki target 81,92 yang diperoleh dari Draft Renstra Tahun 2025-2029.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:



$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) antara lain:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan rencana aksi peningkatan IKPA;
2. Koordinasi internal yang efektif
3. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

- Faktor Kegagalan

Adapun faktor Kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) antara lain:

1. Kualitas SDM Pengelola Anggaran Rendah;
2. Frekuensi Revisi DIPA tinggi;
3. Tidak adanya rencana aksi peningkatan kinerja anggaran.

- Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) Tahun 2025 yaitu senilai RP. 0,-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capain di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Anggaran;



2. Perbaikan perencanaan anggaran dan penjadwalan kegiatan;
3. Pengendalian Revisi DIPA;
4. Penyusunan dan eksekusi rencana aksi peningkatan IKPA.

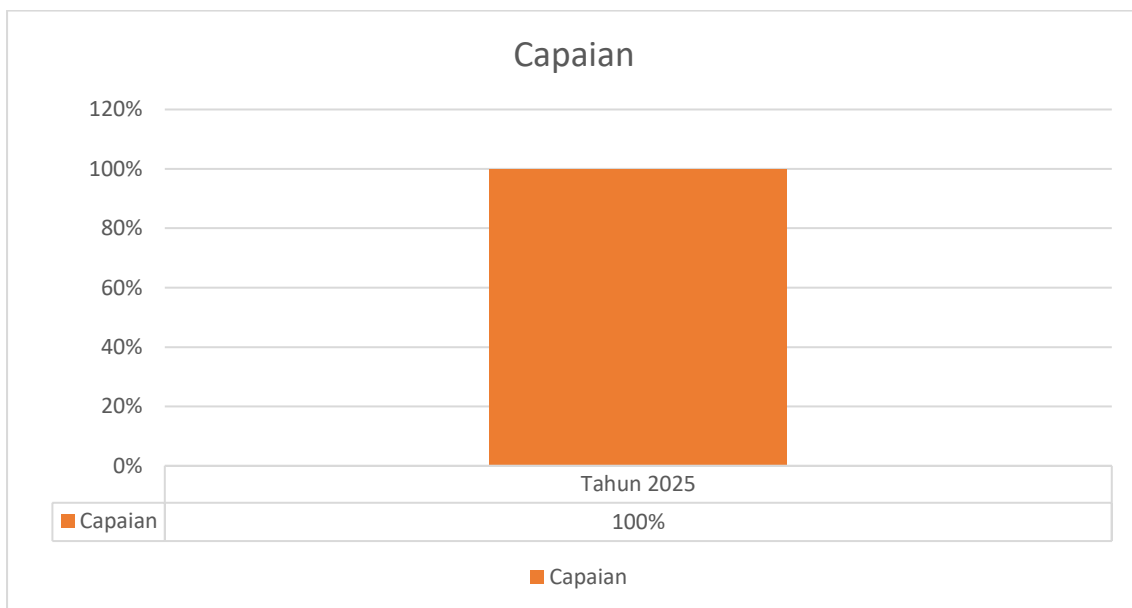
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) tahun 2025 senilai 81,92 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 senilai 81,92 maka capaian kinerja mencapai 100%. Untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat						
No	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/Turun
1	2025	IKK4.3	81,92	81,92	100%	Tetap

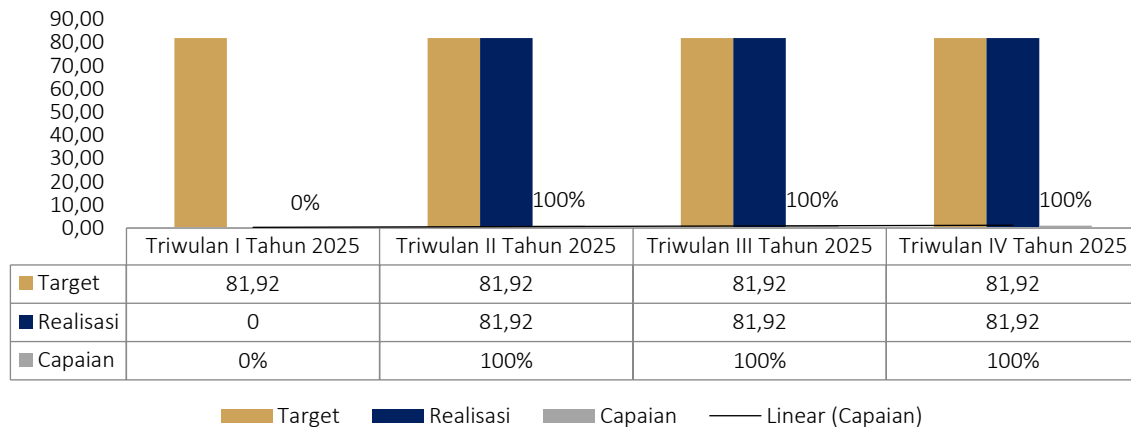




A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Realisasi kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) tahun 2025 senilai 81,92 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 100%

maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.26** Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

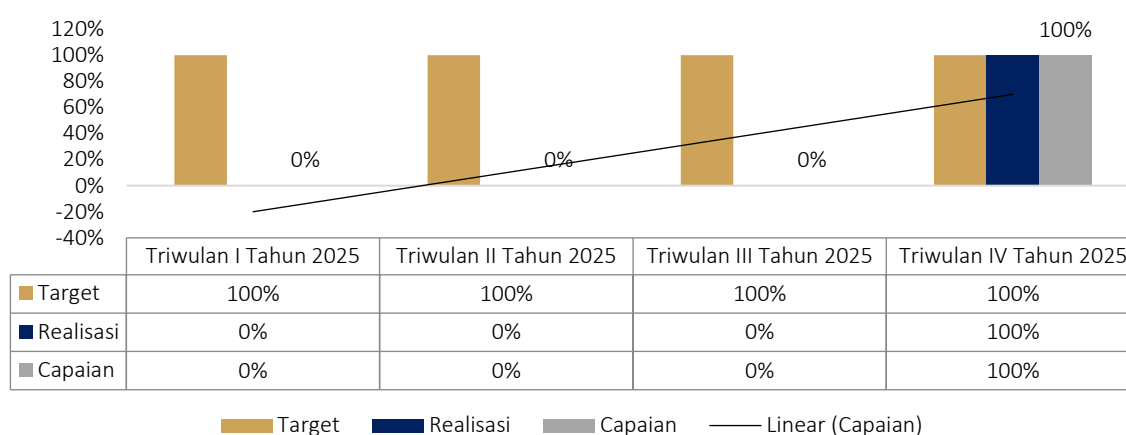
IKK 4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)

A.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan tingkat lanjut rekomendasi audit/pemeriksaan adalah proses tindak lanjut sistematis yang dilakukan oleh entitas yang diaudit terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor (seperti BPK, BPKP, Inspektorat atau APIP dan lainnya) dengan tujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut diimplementasikan secara efektif menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dan mencegah terulang penyimpangan atau kelemahan yang sama di masa mendatang.

A.2 Perbandingan realisasi dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) tahun 2025 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.27** Grafik Capaian IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses).



Gambar III. 27 Grafik Capaian IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) memiliki target 100% yang diperoleh dari Draft Renstra Tahun 2025-2029.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) antara lain:

1. Ketersediaan Tim dan PIC tindak lanjut yang kompeten;
2. Kualitas tindak lanjut yang sesuai substansi rekomendasi;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.

- Faktor Kegagalan

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) antara lain:

1. Ketersediaan Tim dan PIC tindak lanjut yang kompeten;
2. Kualitas tindak lanjut yang sesuai substansi rekomendasi;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.



- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator kinerja kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai Realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait indikator kinerja kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 0;-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

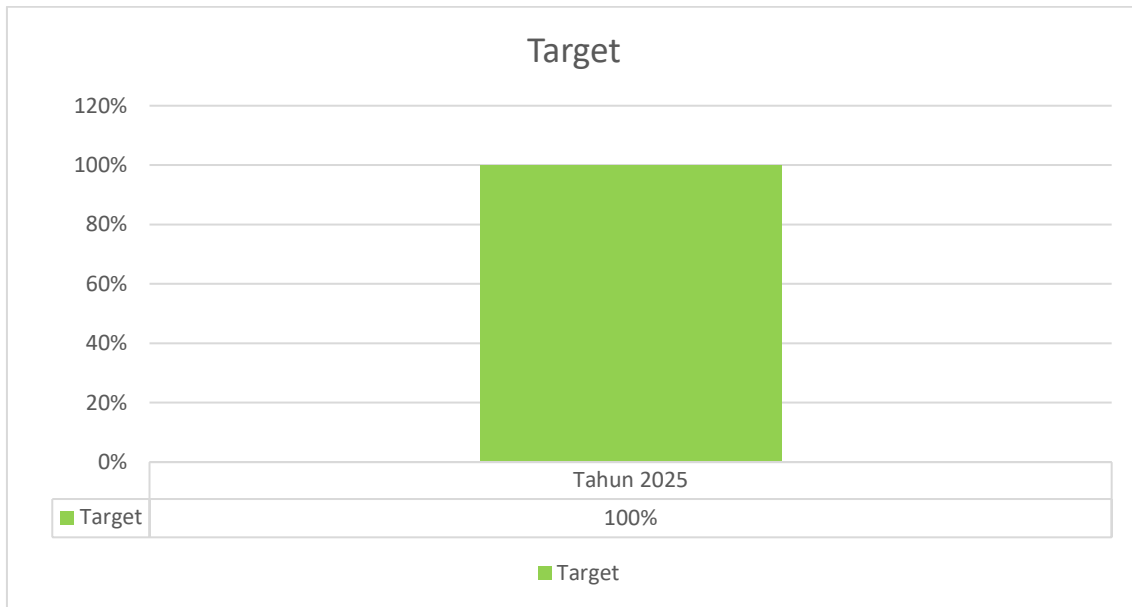
1. Pembentukan Tim tindak lanjut atau PIC khusus;
2. Audit internal ulang (Follow-up Review);
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.

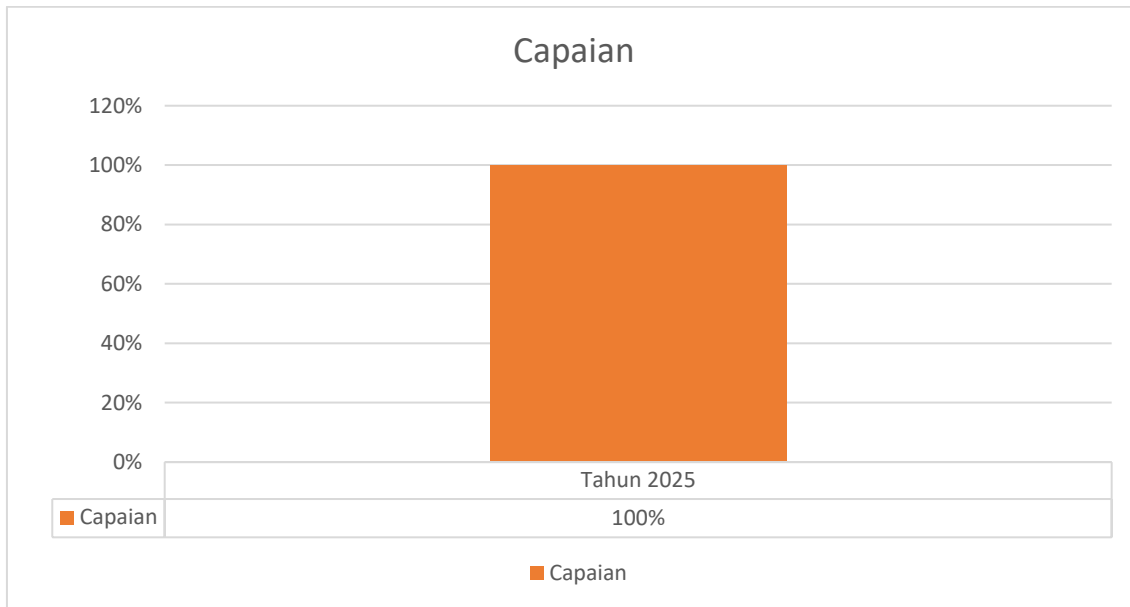
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) tahun 2025 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III. 15 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

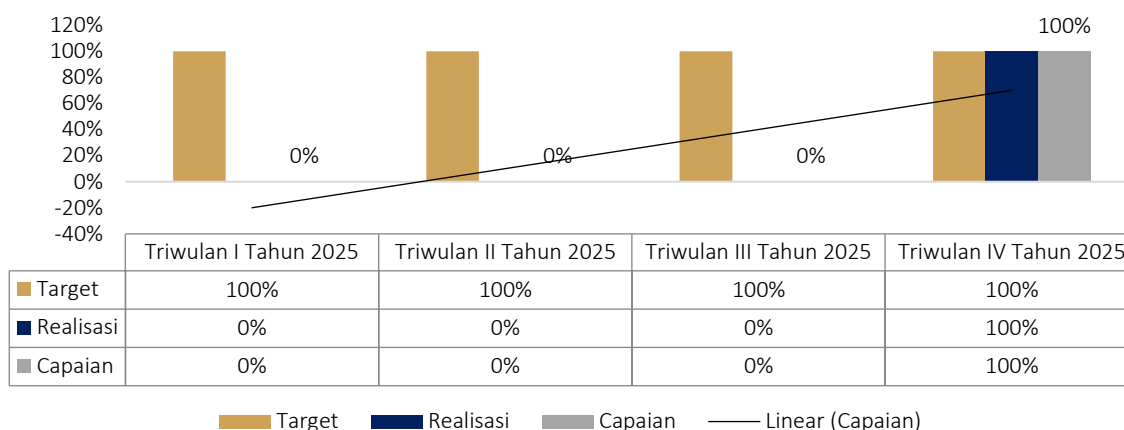
SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/Turun
1.	2025	IKK4.4	100%	100%	100%	Tetap





A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Realisasi kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) tahun 2025 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 100% maka capaiannya sebagai berikut:



Gambar III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

A.1 Definisi Indikator Kinerja

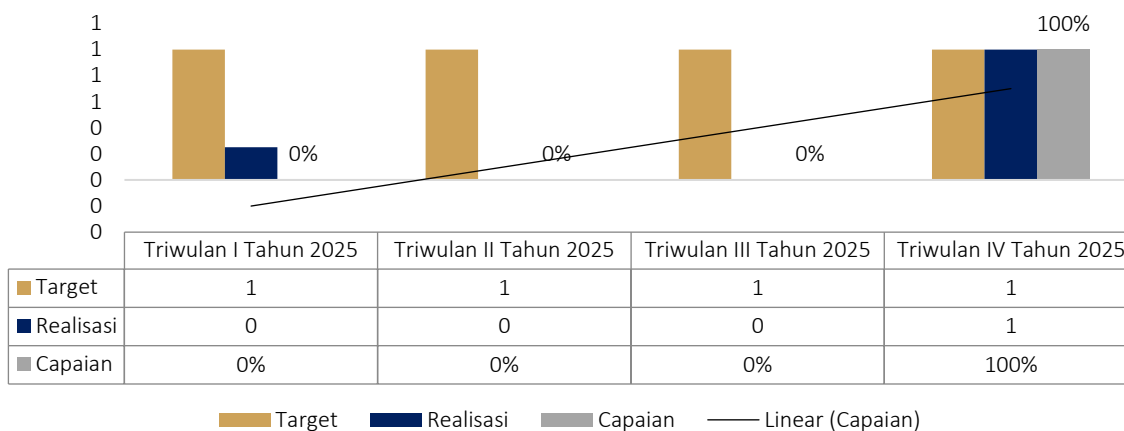
Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan rangkaian sistem, mekanisme dan proses yang dirancang untuk menjamin agar setiap tahap pengadaan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, kompetitif dan berintegritas tinggi sesuai dengan prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan kegiatan pada indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor);
2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).

A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target revisi II perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 1 kegiatan maka capaian kinerja

mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.21** Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.



Gambar III. 29 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

A.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia di Lingkungan Kemenhub;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Perhubunagn Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, indikator kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target 1 kegiatan yang diperoleh dari Draft Renstra Tahun 2025-2029.

- Realisasi Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:



$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Kompetensi dan pelatihan SDM;
2. Perencanaan terstruktur dan manajemen risiko;
3. Transparansi dan publikasi data pengadaan.

- Faktor Kegagalan

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas;
2. Korupsi, intervensi politik dan nepotisme;
3. SDM kurang kapasitas dan kompetensi;
4. Manajemen kontrak dan monitoring yang buruk.

- Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2025 yaitu ATK, Percetakan, Pengadaan dll senilai Rp. 424.852.000;-.

A.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang Akan Datang

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pelatihan intensif bagi PPK dan Tim Pengadaan Barang Jasa;
2. Transparansi ekstrim dan akuntabilitas;
3. Audit dan pengawasan terstruktur.

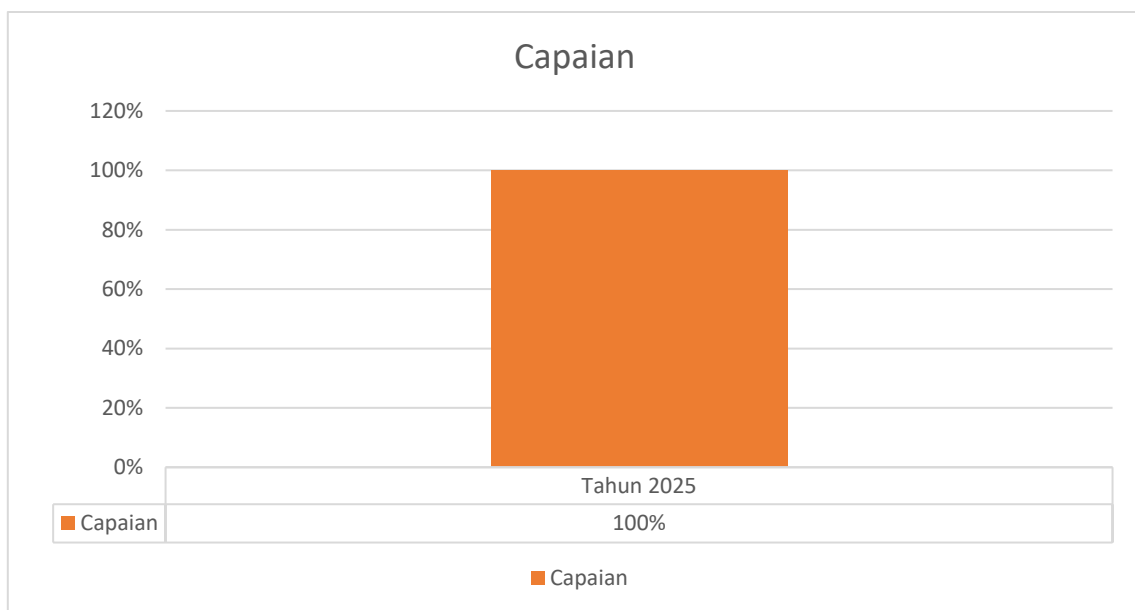
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) tahun 2025 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%, untuk rincian capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 16 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian pada tahun 2025

SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/Turun
1.	2025	IKK4.7	1	1	100%	Tetap

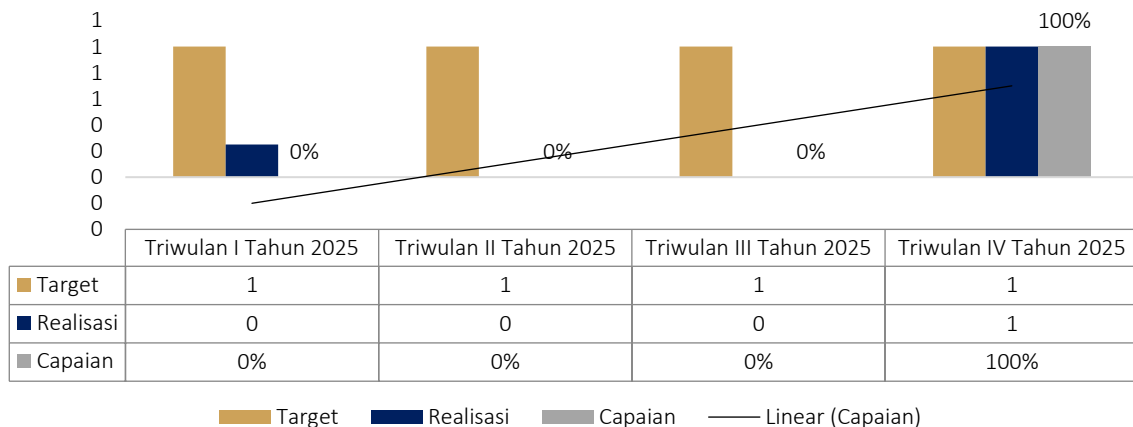




A.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Realisasi kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 1 Kegiatan. Jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai

100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.30** Perbandingan Realisasi Kinerja Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

IKK 4.10 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)

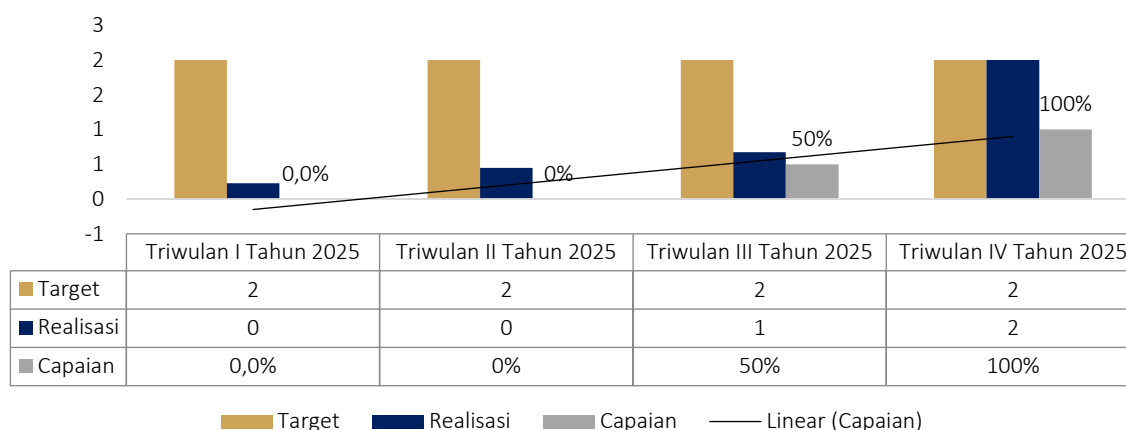
A.1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan pengembangan SDM unit kerja merupakan proses sistematis dan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap individu dalam organisasi baik untuk jabatan saat ini maupun untuk kebutuhan masa depan. Adapun pelaksanaan kegiatan pada Indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan terkait pengelolaan gaji dan tunjangan;
2. Kegiatan terkait peningkatan kompetensi SDM.

A.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025

Realisasi kinerja indikator kinerja kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) Tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.31** Grafik Capaian IKK Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor).



Gambar III. 31 Gambar Grafik Capaian IKK Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)

A.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomot PM 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenhub;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 14 Tahun 2022 tentang Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Bidang Transportasi Darat;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, indikator kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) memiliki target 2 kegiatan yang diperoleh dari Draft Renstra Tahun 2025-2029.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) antara lain:

1. Budaya organisasi yang mendukung pembelajaran;
2. SDM kompeten dan pelatihan yang relevan;
3. Perencanaan kompetensi dan analisis kebutuhan (TNA).

- **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator kinerja kegiatan Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya;
2. Ketidaktepatan analisis kebutuhan pelatihan (TNA);
3. Desain pelatihan pasif dan minim praktek.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) tahun 2025 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen.



- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) pada Tahun 2025 yaitu Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 17.952.595.000;-.

A.4. Upaya untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

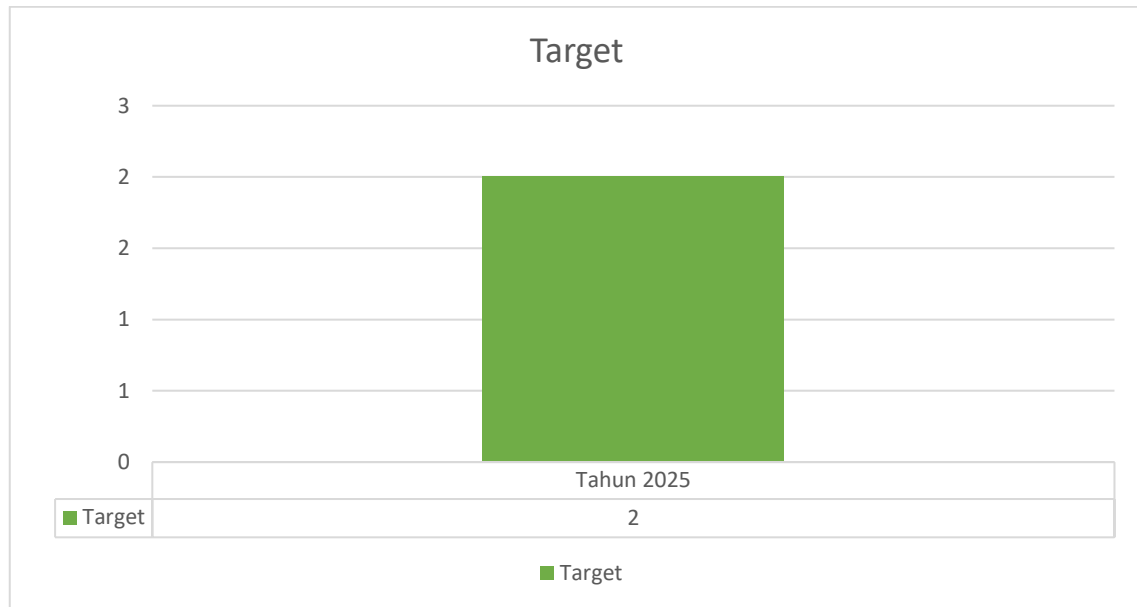
1. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi (TNA) yang akurat;
2. Merancang palatihan yang tepat sasaran dan beragam;
3. Membangun SDM yang kompeten dan berintegrasi.

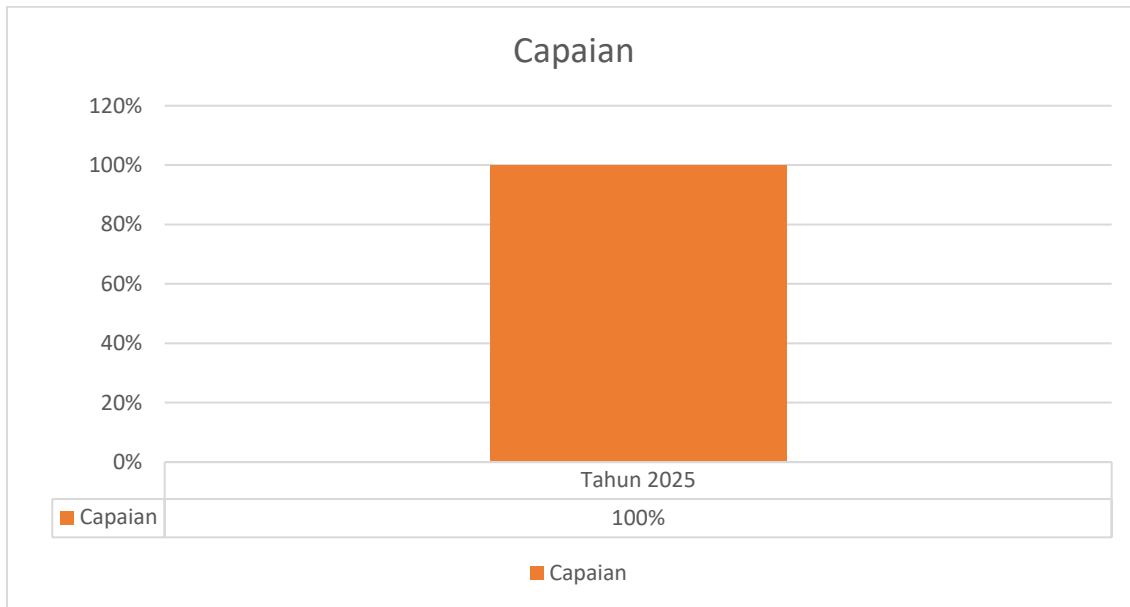
A.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 17 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Pada Tahun 2025

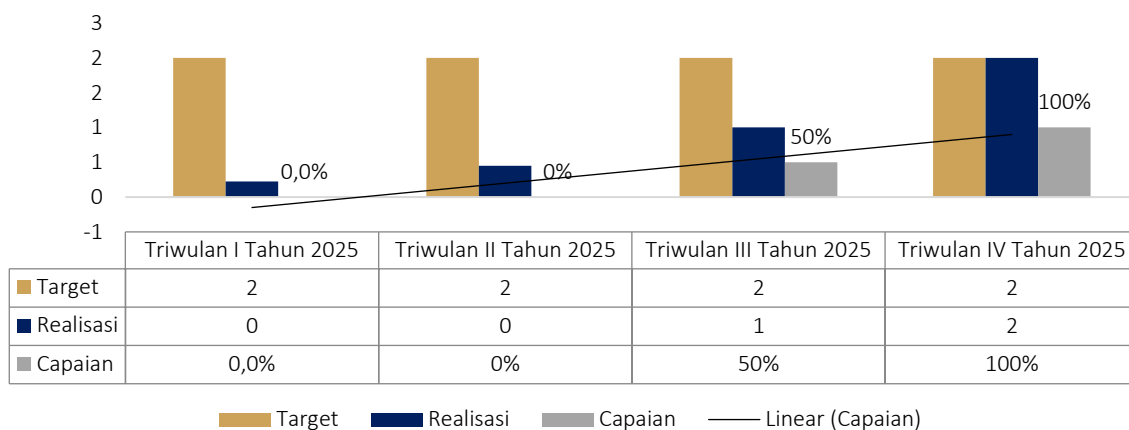
SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian(%)	Naik/Turun
1.	2025	IKK4.10	2	2	100%	Tetap





A.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Realisasi Persentase pelaksanaan Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029 sebesar 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.32** Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) Tahun 2025 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.



Gambar III. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) Tahun 2025 dalam Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

A. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar Rp.96.725.759.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 18 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

RM	Rp 87.281.693.000	90,24%
PNBP	Rp 9.444.066.000	9,76%
SBSN	Rp -	-
Total	Rp 96.725.759.000	100%

Tabel III. 19 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp 10.922.458.000	11,3%
Belanja Barang	Rp 65.326.121.000	67,54%
Belanja Modal	Rp 20.477.180.000	21,2%
Total	Rp 96.725.759.000	100%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu DIPA Ditjen Hubdat TA. 2025 akibat adanya Revisi DIPA di BPTD Kelas II Kalimantan Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp.6.493.978.000,-. Sehingga Total Pagu akhir DIPA BPTD Kelas II Kalimantan Barat pada Triwulan IV TA. 2024 adalah sebesar Rp. 103.219.737.000,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III. 20 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2025

RM	Rp 93.705.671.000	90,78%
PNBP	Rp 9.514.066.000	9,22%
SBSN	Rp -	-
Total	Rp 103.219.737.000	100%

Tabel III. 21 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2025

Belanja Pegawai	Rp 17.952.595.000	17,39%
Belanja Barang	Rp 62.319.433.000	60,38%
Belanja Modal	Rp 22.947.709.000	22,23%
Total	Rp 103.219.737.000	100%

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Kementerian Keuangan tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (DIPA Awal);
- b. Surat Kementerian Keuangan tanggal 22 Februari 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 1);
- c. Surat Kementerian Keuangan tanggal 24 Maret 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 2);
- d. Surat Kementerian Keuangan tanggal 22 April 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 3);
- e. Surat Kementerian Keuangan tanggal 1 Juli 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 4);
- f. Surat Kementerian Keuangan tanggal 11 Agustus 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 5);
- g. Surat Kementerian Keuangan tanggal 20 Agustus 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 6);
- h. Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 September 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 7);



- i. Surat Kementerian Keuangan tanggal 19 September 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 8);
- j. Surat Kementerian Keuangan tanggal 3 Oktober 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 9);
- k. Surat Kementerian Keuangan tanggal 13 Oktober 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 10);
- l. Surat Kementerian Keuangan tanggal 21 November 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 11);
- m. Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 November 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 12);
- n. Surat Kementerian Keuangan tanggal 8 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 13);
- o. Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Desember 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat TA. 2025 (Revisi 14);

B. Revisi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 14 (Empat Belas) kali revisi DIPA, maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

**Tabel III. 22** Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	87.281.693.000	9.444.066.000	0	96.725.759.000
REVISI KE-1	87.281.693.000	9.444.066.000	0	96.725.759.000
REVISI KE-2	87.281.693.000	9.444.066.000	0	96.725.759.000
REVISI KE-3	87.281.693.000	9.444.066.000	0	96.725.759.000
REVISI KE-4	87.281.693.000	9.444.066.000	0	96.725.759.000
REVISI KE-5	91.311.148.000	9.444.066.000	0	100.755.214.000
REVISI KE-6	91.311.148.000	9.444.066.000	0	100.755.214.000
REVISI KE-7	90.877.777.000	9.514.066.000	0	100.391.843.000
REVISI KE-8	90.877.777.000	9.514.066.000	0	100.391.843.000
REVISI KE-9	90.877.777.000	9.514.066.000	0	100.391.843.000
REVISI KE-10	94.450.651.000	9.514.066.000	0	103.964.717.000
REVISI KE-11	93.705.671.000	9.514.066.000	0	103.219.737.000
REVISI KE-12	93.705.671.000	9.514.066.000	0	103.219.737.000
REVISI KE-13	93.705.671.000	9.514.066.000	0	103.219.737.000
REVISI KE-14	93.705.671.000	9.514.066.000	0	103.219.737.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalbar

**Tabel III. 23** Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A 2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	10.922.458.0 00	65.326.121.0 00	20.477.180.0 00	96.725.759.00 0
REVISI KE-1	10.922.458.0 00	65.326.121.0 00	20.477.180.0 00	96.725.759.00 0
REVISI KE-2	10.922.458.0 00	65.326.121.0 00	20.477.180.0 00	96.725.759.00 0
REVISI KE-3	10.922.458.0 00	65.326.121.0 00	20.477.180.0 00	96.725.759.00 0
REVISI KE-4	10.922.458.0 00	65.326.121.0 00	20.477.180.0 00	96.725.759.00 0
REVISI KE-5	18.697.575.0 00	61.580.459.0 00	20.477.180.0 00	100.755.214.0 00
REVISI KE-6	18.697.575.0 00	61.580.459.0 00	20.477.180.0 00	100.755.214.0 00
REVISI KE-7	18.697.575.0 00	60.079.912.0 00	21.614.356.0 00	100.391.843.0 00
REVISI KE-8	18.697.575.0 00	60.079.912.0 00	21.614.356.0 00	100.391.843.0 00
REVISI KE-9	18.697.575.0 00	60.079.912.0 00	21.614.356.0 00	100.391.843.0 00
REVISI KE-10	18.697.575.0 00	62.319.433.0 00	22.947.709.0 00	103.964.717.0 00
REVISI KE-11	17.952.595.0 00	62.319.433.0 00	22.947.709.0 00	103.219.737.0 00
REVISI KE-12	17.952.595.0 00	62.319.433.0 00	22.947.709.0 00	103.219.737.0 00



REVI SI KE-13	17.952.595.0 00	62.319.433.0 00	22.947.709.0 00	103.219.737.0 00
REVI SI KE-14	17.952.595.0 00	62.319.433.0 00	22.947.709.0 00	103.219.737.0 00

**Tabel III. 24** Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A 2025

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalbar

	PAGU AWAL	PER UB AH AN	PAGU AKHIR	PERU BAHAN	PAGU AKHIR	PER UBAHAN	PAGU AKHIR	PERU BAHAN	PAGU AKHIR
			PER TRIWULAN I		PER TRIWULAN II		PER TRIWULAN III		PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	10.922.458.000	-	10.922.458.000	-	10.922.458.000	-	18.697.575.000	-	17.952.595.000
Belanja Barang	65.326.121.000	-	65.326.121.000	-	65.326.121.000	-	60.079.912.000	-	62.319.433.000
RM	87.281.693.000	-	87.281.693.000	-	87.281.693.000	-	90.877.777.000	-	93.705.671.000
PNBP	9.444.066.000	-	9.444.066.000	-	9.444.066.000	-	9.514.066.000	-	9.514.066.000
Belanja Modal	20.477.180.000	-	20.477.180.000	-	20.477.180.000	-	21.614.356.000	-	22.947.709.000
RM	87.281.693.000	-	87.281.693.000	-	87.281.693.000	-	90.877.777.000	-	93.705.671.000
PNBP	9.444.066.000	-	9.444.066.000	-	9.444.066.000	-	9.514.066.000	-	9.514.066.000
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	96.725.759.000	-	96.725.759.000	-	96.725.759.000	-	96.725.759.000	-	96.725.759.000

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

**Tabel III. 25** Rincian Program-Program Kegiatan DIPA TA 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		Pagu Per Triwulan III	Triwulan III		Pagu Per Triwulan IV	Triwulan IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
	BPTD Kalbar	96.725.759.000	96.725.759.000	5.776.286.286	5,97 %	96.725.759.000	17.356.911.780	17,94 %	100.391.843.000	32.680.216.520	32,55 %	103.219.737.000	74.850.855.961	72,52 %
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.158.332.000	77.158.332.000	2.231.385.225	2,89 %	77.158.332.000	9.673.401.932	12,54 %	73.418.959.000	18.303.826.328	24,93 %	76.991.833.000	54.531.771.369	70,83 %
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	28.018.111.000	28.018.111.000	0	0,00%	28.018.111.000	5.159.513.000	18,41 %	26.484.740.000	9.640.056.722	36,40 %	25.107.033.000	21.319.756.300	84,92 %
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	19.022.922.000	19.022.922.000	1.231.017.392	6,47%	19.022.922.000	2.618.021.142	13,76 %	17.879.604.000	4.904.375.208	27,43 %	17.879.604.000	8.737.710.445	48,87 %
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	23.440.258.000	23.440.258.000	802.721.980	3,42%	23.440.258.000	1.579.221.937	6,74%	21.477.574.000	3.220.312.345	14,99 %	26.428.155.000	23.625.669.112	89,40 %
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	6.677.041.000	6.677.041.000	197.645.853	2,96%	6.677.041.000	316.645.853	4,74%	7.577.041.000	539.082.053	7,11%	7.577.041.000	848.635.512	11,20 %
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	19.567.427.000	19.567.427.000	3.544.901.061	18,12 %	19.567.427.000	7.683.509.848	39,27 %	26.972.884.000	14.376.390.192	53,30 %	26.227.904.000	20.319.084.592	77,47 %
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	8.644.969.000	8.644.969.000	1.220.196.400	14,11 %	8.644.969.000	1.908.163.734	22,07 %	8.275.309.000	2.482.642.105	30,00 %	8.275.309.000	2.592.051.369	31,32 %



	Transportasi Darat													
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10.922.458.000	10.922.458.000	2.324.704.661	21,28 %	10.922.458.000	5.775.346.114	52,88 %	18.697.575.000	11.893.748.087	63,61 %	17.952.595.000	17.727.033.223	98,74 %

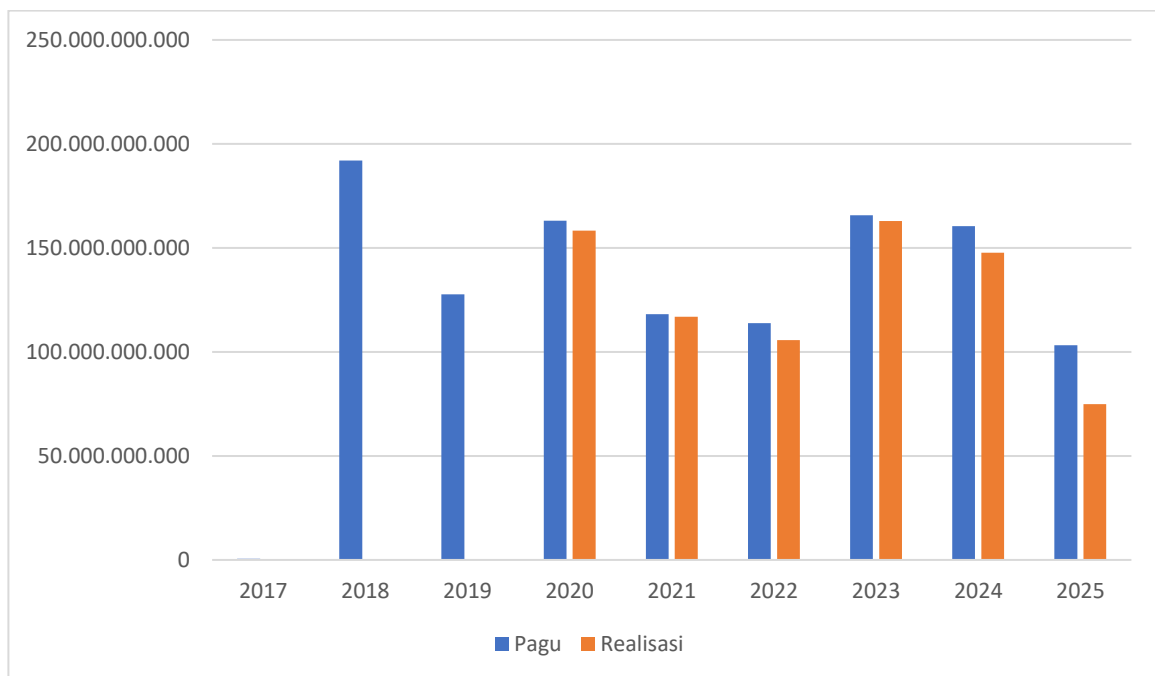
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalbar.

C. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 -2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 26 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2017	519.559.000	519.559.000	-	-
2	2018	156.372.998.000	192.019.691.000	-	-
3	2019	86.549.181.000	127.662.787.000	-	-
4	2020	133.169.543.000	163.051.872.000	158.250.394.569	97,06%
5	2021	216.242.808.000	118.140.491.000	116.919.896.085	98,97%
6	2022	156.882.164.000	113.810.793.000	105.711.842.035	92,88%
7	2023	185.772.410.000	165.631.402.000	162.966.039.218	98,39%
8	2024	159.552.003.000	160.511.224.000	147.761.661.559	92,05%
9	2025	96.725.759.000	103.219.737.000	74.850.855.961	72,52%



Gambar III. 33 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025



Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 158.250.394.569,- atau mencapai 97,06% dari pagu akhir Rp. 163.051.874.000,- pada tahun 2021 daya serap sebesar Rp. 116.919.896.085,- atau mencapai 98,97% dari pagu akhir Rp. 118.140.491.000,-. Pada tahun 2022 serapan anggaran sebesar Rp. 105.711.842.035,- atau mencapai 92,88% dari pagu akhir Rp. 113.810.793.000,-. pada tahun 2023 serapan sebesar Rp. 162.966.039.218,- atau mencapai 98,39% dari pagu akhir Rp. 165.631.402.000,-. pada tahun 2024 serapan sebesar Rp. 147.761.661.559,- atau mencapai 92,05% dari pagu akhir Rp. 160.511.224.000,-. serta pada tahun 2025 serapan sebesar Rp. 74.850.855.961 atau mencapai 72,52% dari pagu akhir Rp. 103.219.737.000,-.



III.3.2 Realisasi Anggaran

A. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi) :

Tabel III. 27 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
	BPTD Kalbar	96.725.759.000	96.725.759.000	5.776.286.286	5,97%	96.725.759.000	17.356.911.780	17,94%	100.391.843.000	32.680.216.520	32,55%	103.219.737.000	74.850.855.961	72,52%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.158.332.000	77.158.332.000	2.231.385.225	2,89%	77.158.332.000	9.673.401.932	12,54%	73.418.959.000	18.303.826.328	24,93%	76.991.833.000	54.531.771.369	70,83%
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	28.018.111.000	28.018.111.000	0	0,00%	28.018.111.000	5.159.513.000	18,41%	26.484.740.000	9.640.056.722	36,40%	25.107.033.000	21.319.756.300	84,92%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	19.022.922.000	19.022.922.000	1.231.017.392	6,47%	19.022.922.000	2.618.021.142	13,76%	17.879.604.000	4.904.375.208	27,43%	17.879.604.000	8.737.710.445	48,87%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	23.440.258.000	23.440.258.000	802.721.980	3,42%	23.440.258.000	1.579.221.937	6,74%	21.477.574.000	3.220.312.345	14,99%	26.428.155.000	23.625.669.112	89,40%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	6.677.041.000	6.677.041.000	197.645.853	2,96%	6.677.041.000	316.645.853	4,74%	7.577.041.000	539.082.053	7,11%	7.577.041.000	848.635.512	11,20%



WA	Program Dukungan Manajemen	19.567.427.000	19.567.427.000	3.544.901.061	18,12%	19.567.427.000	7.683.509.848	39,27%	26.972.884.000	14.376.390.192	53,30%	26.227.904.000	20.319.084.592	77,47%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	8.644.969.000	8.644.969.000	1.220.196.400	14,11%	8.644.969.000	1.908.163.734	22,07%	8.275.309.000	2.482.642.105	30,00%	8.275.309.000	2.592.051.369	31,32%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	10.922.458.000	10.922.458.000	2.324.704.661	21,28%	10.922.458.000	5.775.346.114	52,88%	18.697.575.000	11.893.748.087	63,61%	17.952.595.000	17.727.033.223	98,74%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 74.850.855.961,-** atau mencapai 72,52% dari pagu akhir **Rp. 103.219.737.000,-**.



B. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel III. 28 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

N O	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
1	Belanja Pegawai	10.922.458.000	2.324.704.661	21,28 %	10.922.458.000	5.775.346.114	52,88 %	18.697.575.000	11.893.748.087	63,61 %	17.952.595.000	17.727.033.223	98,74 %
2	Belanja Barang	65.326.121.000	3.451.581.625	5,28 %	65.326.121.000	11.581.565.666	17,73 %	60.079.912.000	18.014.300.206	29,98 %	62.319.433.000	41.033.089.326	65,84 %
3	Belanja Modal	20.477.180.000	-	0,00 %	20.477.180.000	-	0,00%	21.614.356.000	2.772.168.227	12,83 %	22.947.709.000	16.090.733.412	70,12 %
TOTAL		96.725.759.000	5.776.286.286	5,97 %	96.725.759.000	17.356.911.780	17,94 %	100.391.843.000	32.680.216.520	32,55 %	103.219.737.000	74.850.855.961	72,52 %

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja per tahun 2025 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan yang awalnya pada Triwulan I itu realisasinya 5,97% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 17,94% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 32,55% serta pada Triwulan IV yaitu mencapai 72,52%.

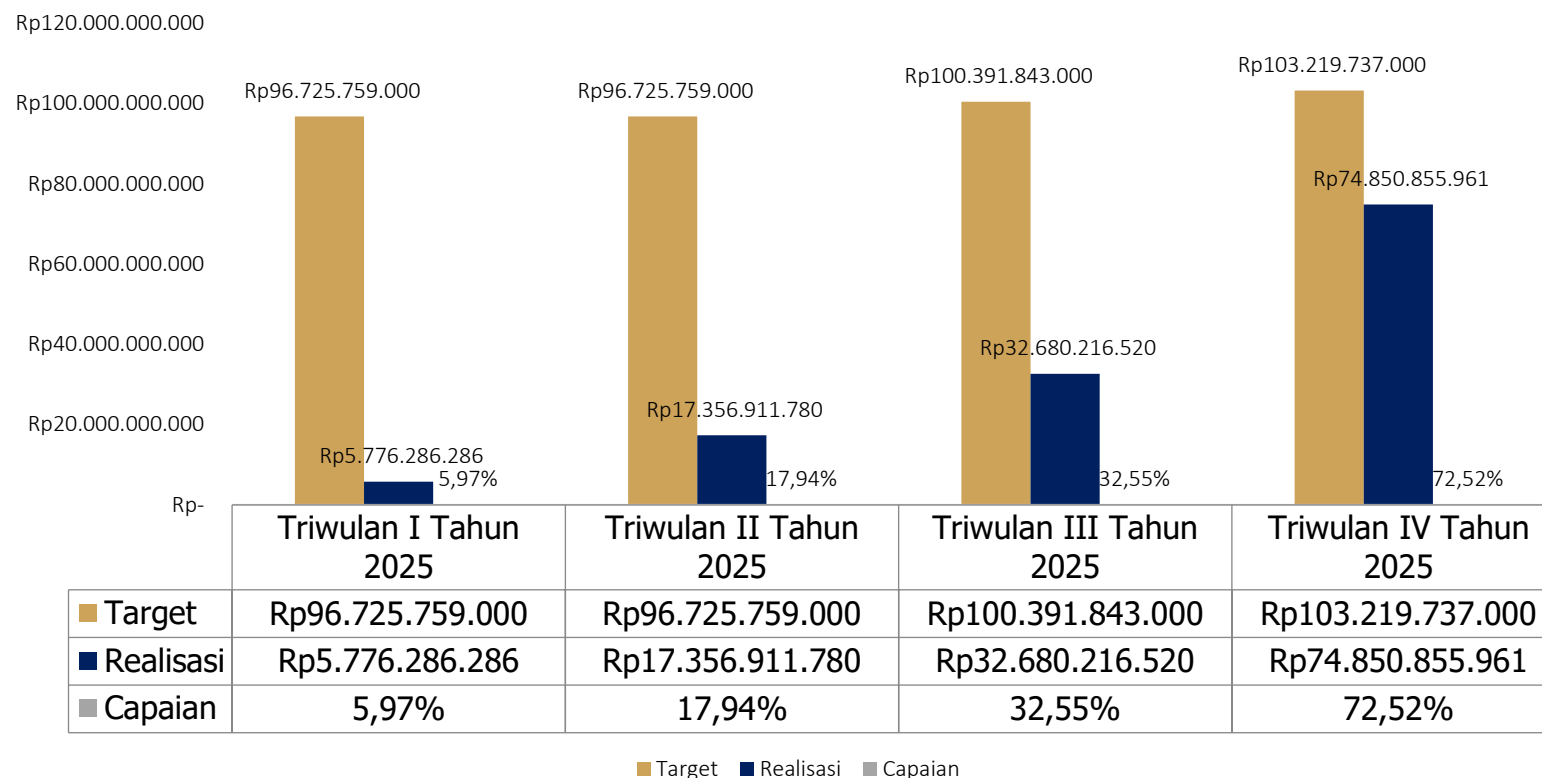


C. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 29 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana 2025

N O	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
			Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%
1	Rupiah Murni	87.281.693.000	5.776.286.286	6,62 %	87.281.693.000	17.356.911.780	17,94 %	91.796.563.000	31.754.086.520	34,59 %	93.705.671.000	71.611.412.831	76,42 %
2	PNBP	9.444.066.000	-	0,00 %	9.444.066.000	-	0,00%	8.595.280.000	926.130.000	10,77 %	9.514.066.000	3.239.443.130	34,05 %
3	SBSN	-	-	0,00 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	71.611.412.831	-
Total		96.725.759.000	5.776.286.286	5,97 %	96.725.759.000	17.356.911.780	17,94 %	100.391.843.000	32.680.216.520	32,55 %	103.219.737.000	74.850.855.961	72,52 %



Gambar III. 34 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana tahun 2025 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan yang awalnya pada Triwulan I itu realisasinya hanya sebesar 5,97% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 17,94% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 32,55% dan kemudian mengalami peningkatan Kembali pada Triwulan IV yaitu mencapai sebesar 72,52%.



D. Analisis Dana yang Tidak Terserap Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana dan sisa anggaran pada tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III. 30 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

N O	JENIS RUPIA H	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp	Rp	Rp
1	Belanja Pegawai	17.952.595.000	17.727.033.223	225.561.777
2	Belanja Barang	62.319.433.000	41.033.089.326	21.286.343.674
3	Belanja Modal	22.947.709.000	16.090.733.412	6.856.975.588
Total		103.219.737.000	74.850.855.961	28.368.881.039

Tabel III. 31 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp	Rp	Rp
1	Rupiah Murni	93.705.671.000	71.611.412.831	22.094.258.169
2	PNBP	9.514.066.000	3.239.443.130	6.274.622.870
3	SBSN	-	-	-
Total		103.219.737.000	74.850.855.961	28.368.881.039

**Tabel III. 32** Rincian Sisa Anggaran Tahun 2025

NO	SISA ANGGAR AN	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA ANGGARAN
		Rp	Rp	Rp
1	Kegiatan yang Tidak Terlaksana	-	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	-	-	-
3	Sisa Kontraktual	55.089.648.000	45.120.386.137	9.969.261.863
	a. Belanja Barang	33.529.039.000	29.029.652.725	4.499.386.275
	b. Belanja Modal	21.560.609.000	16.090.733.412	5.469.875.588
4	Sisa Non Kontraktual	30.177.494.000	12.003.436.601	18.174.057.399
	c. Belanja Barang	28.790.394.000	12.003.436.601	16.786.957.399
	d. Belanja Modal	1.387.100.000	0	1.387.100.000
5	Sisa Belanja Pegawai	17.952.595.000	17.727.033.223	225.561.777
Total				28.368.881.039



Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebesar Rp. 103.219.737.000,- (Seratus Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 74.850.855.961,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 72,52% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat adalah sebesar Rp. 28.368.881.039,- (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Tidak ada kegiatan yang terblokir;
3. Sisa kontraktual sebesar Rp.55.089.648.000,- (Lima Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - a. Sisa belanja modal sebesar Rp.21.560.609.000 berasal dari sisa kontrak yang sudah tidak dapat direalokasi dikarenakan mengacu pada PMK tentang tata cara revisi (untuk revisi DIPA antar sumber belanja dan jenis belanja merupakan wewenang DJA yang maksimal pengajuan hanya sampai 27 Desember), sedangkan sisa belanja modal baru diketahui saat akhir tahun;
 - b. Sisa belanja barang sebesar Rp.33.529.039.000 berasal dari beberapa pagu blokir;
4. Sisa non kontaktual sebesar Rp.30.177.494.000,- (Tiga Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - a. Sisa belanja modal sebesar Rp.1.387.100.000;-.
 - b. Sisa belanja barang sebesar Rp.28.790.394.000;-,- berasal dari sisa kegiatan operasional serta penunjang pada tiap satker;
5. Sisa sumber dana PNPB sebesar Rp. 6.274.622.870 berasal dari belanja modal di akhir tahun yang tidak dapat dilakukan optimalisasi;
6. Sisa sumber dan SBSN 0 rupiah karena realisasi mencapai 100%;
7. Sisa belanja pegawai Rp.225.561.777 berasal dari sisa belanja pegawai di akhir tahun yang tidak dapat dilakukan optimalisasi.



III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I – IV tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 33 Efisiensi Anggaran

NO	Sasaran Program		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian rata- rata kinerja sasaran	% capaian keuanga n	Efisiensi (Posisi Triwula n I)	% Capaian rata- rata kinerja sasaran	% capaian keuanga n	Efisiensi (Posisi Triwula n II)	% Capaian rata- rata kinerja sasaran	% capaian keuanga n	Efisiensi (Posisi Triwula n III)	% Capaian rata- rata kinerja sasaran	% capaian keuanga n	Efisiensi (Posisi Triwulan IV)
1	SK 1.1. 1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	29,92%	70,08%	100%	90,09%	9,91%
2	SK 1.2. 1	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	29,22%	70,78%	100%	96,93%	3,07%
3	SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	75%	47,71%	27,29%	83,33%	62,67%	20,665	91,66%	76,28%	15,38%	100%	85,52%	14,48%
4	SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	30,92%	69,08%	100%	47,30%	52,70%	100%	93,59%	6,41%	100%	97,86%	2,14%



		Sektor Transportasi ASDP												
5	SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	50%	50%
6	SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	4,63%	95,37%	100%	99,52%	0,48%
7	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	25%	12,95%	12,05%	50%	28,80%	21,20%	75%	66,25%	8,80%	100%	98,74%	1,26%
Rata-Rata			28,57%	9,54%	15,49%	47,62%	12,53%	13,51%	80,95%	33,86%	38,12%	100%	72,52%	27,48%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 72,52% menunjukan adanya efisensi anggaran sebesar 27,48%.



III.3.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan/kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain :

1. Masih kurangnya pemenuhan dalam sumber daya manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
3. Dalam kegiatan kontrak, faktor cuaca / faktor alam tidak menentu yang menjadikan kendala dalam pelaksanaanya.



BAB IV

Penutup

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini terdapat 16 (Enam Belas) Indikator Kinerja yang capaiannya telah/lebih dari target yang telah ditentukan yaitu, persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, Jumlah Terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi, Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan, Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A, Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP, Kualitas penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat dan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;



3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyebrangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

**Tabel IV. 1** Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut :

NO	Sasaran Kegiatan		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK 1.1.1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK. 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	6	6	100%	TERCAPAI	Akan melaksanakan kegiatan layanan angkutan jalan perintis sesuai Rencana Aksi.	KEPALA SEKSI LALIN
2	SK 1.2.1	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK. 1.2.1.A	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	1	1	100%	TERCAPAI		KEPALA SEKSI PRASARANA
3	SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK. 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	1	1	100%	TERCAPAI	1.Peningkatan fasilitas pelayanan penumpang; 2.Penguatan SDM; 3.Perbaikan Sarana dan Prasarana.	KEPALA SEKSI LALIN



NO	Sasaran Kegiatan		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK. 2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	Unit	4	4	4	100%	TERCAPAI	1.Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala; 2.Menjamin operasional UPPKB sesuai regulasi dan SPM; 3.Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	KEPALA SEKSI PRASARANA
			IKK. 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	24	24	24	100%	TERCAPAI	Kegiatan telah terlaksana.	KEPALA SEKSI PRASARANA
4	SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK.2.2. 2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Unit	2	2	2	100%	TERCAPAI		KEPALA SEKSI PRASARANA



NO	Sasaran Kegiatan		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
5	SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi	IKK.3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Laporan	48	48	48	100%	TERCAPAI	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemeriksa; 2. Mendukung kebijakan Zero ODOL dan keselamatan transportasi darat.	KEPALA SEKSI LALIN
		<i>Active dan Passive Safety</i>	IKK. 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	2	2	2	100%	TERCAPAI	1. Mendukung pengawasan dan pengendalian kendaraan bermuatan besar dan berpotensi ODOL; 2. Menjamin keabsahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.	KEPALA SEKSI LALIN
6	SK3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK. 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	%	90	90	90	100%	TERCAPAI		KEPALA SEKSI LALIN



NO	Sasaran Kegiatan		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK. 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penangan Sesuai Pedoman	Lokasi	4	4	4	100%	TERCAPAI		KEPALA SEKSI SARANA
8	SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK.4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	3	3	3	100%	TERCAPAI	1. Penajaman substansi kegiatan dan penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra; 2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	KASUBAG TU
			IKK.4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	1	1	1	100%	TERCAPAI	1. Revisi indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis Renstra;	KASUBAG TU



NO	Sasaran Kegiatan		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
											2. Revisi Indikator Kinerja agar didukung dengan manual IKU yang tepat dan jelas.	
			IKK.4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	1	1	1	100%	TERCAPAI	1. Menindaklanjuti temuan evaluasi, baik internal maupun eksternal; 2. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	KASUBAG TU
			IKK.4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	1	1	1	100%	TERCAPAI	Dokumentasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	KASUBAG TU



NO	Sasaran Kegiatan		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK.4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Meningkatkan serapan anggaran dan kualitas <i>output</i> pengadaan.	KASUBAG TU
			IKK.4.10	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	2	2	2	100%	TERCAPAI	1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM; 2. Meningkatkan dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi.	KASUBAG TU



Lampiran



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat





RENCANA KINERJA TAHUNAN
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Rencana Kinerja Tahunan
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	01 - 12 - 2024	
2.	Diperiksa	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kasubbag Tata Usaha	01 - 12 - 2024	
3.	Disetujui	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kasubbag Tata Usaha	01 - 12 - 2024	
4.	Disetujui	Iwan Sarwoko, S.Si.T., MT	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	01 - 12 - 2024	
5.	Disetujui	Dodi Frenky, S.Si.T, M.Si	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	01 - 12 - 2024	
6.	Disetujui	Sofyan Hidayat, S.E	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	01 - 12 - 2024	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan KeperintisanAngkutan Jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan PelayananKeperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP YangBeroperasi	Lokasi	11
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	100
		IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100
		IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang KeselamatanTransportasi Jalan	Orang	1000
		IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Pontianak, 01 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat



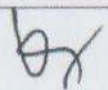
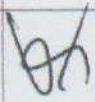
Ketut Suhartana, S.Si.T., M..T.
NIP. 19710619 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf Pelaksana	13 Januari 2025	
2.	Diperiksa	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kasubbag Tata Usaha	13 Januari 2025	
3.	Disetujui	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kasubbag Tata Usaha	13 Januari 2025	
4.	Disetujui	Iwan Sarwoko, S.Si.T., MT	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13 Januari 2025	
5.	Disetujui	Dodi Frenky, S.Si.T, M.Si	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	13 Januari 2025	
6.	Disetujui	Sofyan Hidayat, S.E	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13 Januari 2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 13 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

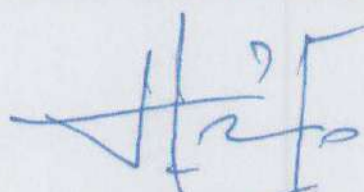
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	11
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100
		IKK2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90
3	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90
		IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100
		IKK3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi	Orang	1000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tentang Keselamatan Transportasi Jalan		
		IKK7.a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 28.018.111.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 19.022.922.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 23.440.258.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6.677.041.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 8.644.969.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 10.922.458.000

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Pontianak, 13 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat



KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001



RENCANA AKSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Rencana Aksi
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	13 Januari 2025	
2.	Diperiksa	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kasubbag Tata Usaha	13 Januari 2025	
3.	Disetujui	Lilik Hartanto, S.E., M.M.	Kasubbag Tata Usaha	13 Januari 2025	
4.	Disetujui	Iwan Sarwoko, S.Si.T., MT	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13 Januari 2025	
5.	Disetujui	Dodi Frenky, S.Si.T, M.Si	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	13 Januari 2025	
6.	Disetujui	Sofyan Hidayat, S.E	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13 Januari 2025	

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	3.610.134.000	Seksi LUSDPP
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Pemumpang Terminal Tipe-A Sel Ambawang dan Terminal Barang Internasional Entikong	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8.481.000.000	Seksi Prasarana JSDP
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan	%	100	Angkutan Penyebrangan Perintis (Prioritas Nasional)	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	21.407.977.000	Seksi LUSDPP
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1.946.642.000	Seksi Prasarana JSDP
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	508.786.000	Seksi Prasarana JSDP
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	832.350.000	Seksi Prasarana JSDP

SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	15.579.611.000	Seksi LUISDPP
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	6.663.504.000	Seksi LUISDPP
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1. Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan 2. Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	357.143.000	Seksi LUISDPP
		IKK7.a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	340.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transportasi Darat	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	6.677.041.000	Subbag Tata Usaha
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Program Dukungan Manajemen	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	19.567.427.000	Subbag Tata Usaha



Pontianak, 13 Januari 2025
KEPALA BRTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

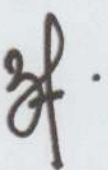
KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	20 Agustus 2025	
2.	Diperiksa	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	20 Agustus 2025	
3.	Disetujui	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	20 Agustus 2025	
4.	Disetujui	Dodi Frenky, S.Si.T. M.Si	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	20 Agustus 2025	
5.	Disetujui	Didik Setiyawan, M.Sc.	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	20 Agustus 2025	
6.	Disetujui	Agung Wibowo, SH	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	20 Agustus 2025	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

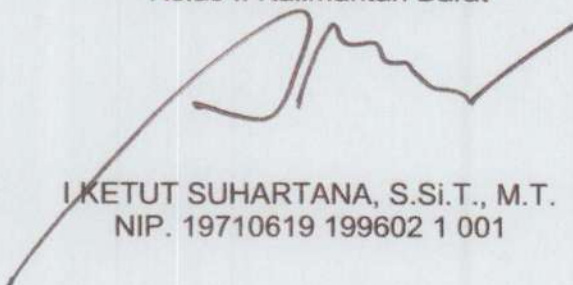
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat


Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si
- NIP. 19670131 202521 1 001

Pontianak, 20 Agustus 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat


I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2.	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1
3.	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM	Tahun	4
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	24
4.	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Tahun	2
5.	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	48

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
		Active dan Passive Safety	IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Kalbar	Paket	2
6.	SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	8
7.	SK 12	Meningatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	2400
			IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendamping Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	30
8.	IKP 3.3	Penurunan Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	7
9.	IKP 4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
			IKK4.3	Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 28.018.111.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 17.879.604.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 21.407.574.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6.677.041.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 8.075.309.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 18.697.575.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si
NIP. 19670131 202521 1 001

Pontianak, 20 Agustus 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat

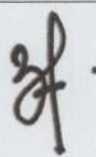
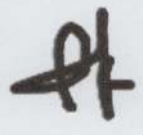

I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001



REVISI I RENCANA AKSI
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Rencana Aksi
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	20 Agustus 2025	
2.	Diperiksa	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	20 Agustus 2025	
3.	Disetujui	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	20 Agustus 2025	
4.	Disetujui	Dodi Frenky, S.Si.T, M.Si	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	20 Agustus 2025	
5.	Disetujui	Didik Setiyawan, M.Sc	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	20 Agustus 2025	
6.	Disetujui	Agung Wibowo, SH	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	20 Agustus 2025	

REVISI I RENCANA AKSI TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	Kegiatan layanan angkutan jalan pelintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ketapang - Simpang Siduk - Sukadana - Taluk Batang 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Lintas Timur - Nanga Raun 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sambas - Aruk 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sintang - Nanga Mau - Nanga Tebidah 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Terminal Sul Durian Sintang - Tempunak 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Jongkong - Selimbau	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3.337.415.000	Seksi LUSDP
SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Teluk Batang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.269.905.000	Seksi Prasarana JSDP	
SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	Pengoprasian dan pengelolaan Terminal Tipe A Sei Ambawang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.736.984.000	Seksi Prasarana JSDP	
		IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM	Tahun	4	1. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Siantan 2. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sosok 3. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sintang 4. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Satong	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.630.820.000	Seksi Prasarana JSDP	

		IKK 7.5	Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	24	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 2. Monitoring Pengendalian Pengendalian Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.736.950.000	Seksi Prasarana JSDP
SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Tahun	2	1. Peningkatan Pelabuhan Sungai Rasau Jaya Tahap IV 2. Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang Tahap IV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	956.806.000	Seksi Prasarana JSDP
SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	48	Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
		IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Kalbar	Paket	2	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Pontianak 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kota Singkawang 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Kubu Raya 4. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Mempawah 5. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Landak 6. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sekadau 7. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sanggau 8. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sambas 9. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Bengkayang 10. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Melawi 11. Kegiatan kalibrasi alat Uji Berkala Kab Sintang 1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	140.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP

SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1.000.000.000	Seksi LLISDP
SK 12	Meningatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	2400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2400	-	250.000.000	Seksi LLISDP
		IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAU Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendamping Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	30	Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAU di Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	107.143.000	Seksi LLISDP
IKP 3.3	Penurunan Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.1	Jumlah Peningkatan Jalan yang Dibangun dan Dioptimalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	15.579.611.000	Seksi LLISDP
IKP 4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Penyusunan Dokumen SAKIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.3	Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag Keuangan/TU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Subbag Tata Usaha

		IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.075.309.000	Subbag Tata Usaha
		IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor); 2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	318.602.000	Subbag Tata Usaha
		IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengelolaan Gaji Tunjangan Pegawai 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18.697.575.000	Subbag Tata Usaha



Pontianak, 20 Agustus 2025
KEPALA BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

1 KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP: 19710619 199602 1 001



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	27 November 2025	
2.	Diperiksa	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	27 November 2025	
3.	Disetujui	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	27 November 2025	
4.	Disetujui	Dodi Frenky, S.Si.T. M.Si	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	27 November 2025	
5.	Disetujui	Didik Setiyawan, M.Sc.	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	27 November 2025	
6.	Disetujui	Agung Wibowo, SH	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	27 November 2025	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si
NIP. 19670131 202521 1 001

Pontianak, 1 Desember 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat

I KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 1.2.1A	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1
3.	SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1
			IKK 2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	Unit	4
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	24
4.	SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Unit	2
5.	SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Laporan	48

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
		<i>Active dan Passive Safety</i>	IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	2
6.	SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	%	90
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4
7.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	3
			IKK4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	85,11
			IKK4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	81,92
			IKK4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	100
			IKK4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK4.10	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	2

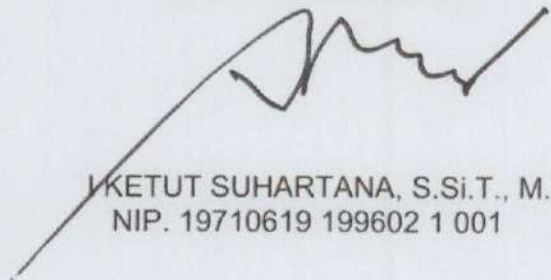
Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 25.107.033.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 17.879.604.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 26.428.155.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 7.577.041.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 8.275.309.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.952.595.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si
NIP. 19670131 202521 1 001

Pontianak, 1 Desember 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat



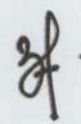
IKETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001



REVISI II RENCANA AKSI
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Rencana Aksi
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.	Staf	1 Desember 2025	
2.	Diperiksa	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	1 Desember 2025	
3.	Disetujui	Adi Tempo, A.Md	Plt. Kasubbag Tata Usaha	1 Desember 2025	
4.	Disetujui	Dodi Frenky, S.Si.T, M.Si	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	1 Desember 2025	
5.	Disetujui	Didik Setiyawan, M.Sc	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Desember 2025	
6.	Disetujui	Agung Wibowo, SH	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Desember 2025	

REVISI II RENCANA AKSI TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SK 1.1.1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ketapang - Simpang Siduk - Sukadana - Teluk Batang 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Lintas Timur - Nanga Raun 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sambas - Aruk 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sintang - Nanga Mau - Nanga Tebidah 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Terminal Sul Durian Sintang - Tempunak 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Jongkong - Selimbau	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1.959.715.000	Seksi LUJSDP
SK 1.2.1	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 1.2.1.A	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang Tahap IV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.269.905.000	Seksi Prasarana JSDP	
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Sel Ambawang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.881.984.000	Seksi Prasarana JSDP	
		IKK 2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	Unit	4	1. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Siantan 2. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sosok 3. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sintang 4. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Satong	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.630.820.000	Seksi Prasarana JSDP	

		IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	24	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 2. Monitoring Pengendalian Pengendalian Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.017.105.000	Seksi Prasarana JSDP
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Unit	2	1. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Sinteta (Hubdat) 2. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Teluk Batang 3. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Rasau Jaya (Hubdat)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	930.651.000	Seksi Prasarana JSDP
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Laporan	48	Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKS	Kegiatan	2	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Pontianak 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kota Singkawang 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Kubu Raya 4. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Mempawah 5. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Landak 6. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sekadau 7. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sanggau 8. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sambas 9. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Bengkayang 10. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Melawi 11. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sintang 1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	410.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP

SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90%	20.530.192.000	Seksi LUSOP
		IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1.000.000.000	Seksi LUSDP
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	85,11	Penyusunan Dokumen SAKIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,11	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit. Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	81,92	Kegiatan terkait dengan subbag Keuangan/TU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	81,92	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	100	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	0	Subbag Tata Usaha
		IKK4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor); 2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	439.852.000	Subbag Tata Usaha

		IKK4.10	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengelolaan Gaji Tunjangan Pegawai 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17.952.595.000	Subbag Tata Usaha
--	--	---------	---	----------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-------------------



Pontianak, 1 Desember 2025
KEPALA BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

JANUARI 2025

[illegible]

			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	0	0%	1.918.352.000	0%	0,00	0	0%	0%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat 3. Melakukan Mc 0 pada Pembangunan Halte Sungai Suka Ramai kabupaten Ketapang 4. Melakukan Mutual Check (MC 0) Pembangunan Halte Sungai Kendawang Kiri dan Halte Sungai Keramat Jaya di Kab. Ketapang 5. Melakukan Penyusunan Data Profil Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 6. Menghadiri Zoom Virtual Meeting Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai Menhadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) dan Sinkronisasi Reviu Rencana	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	0	0%	212.500.000	0%	0,00	0	0%	0%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelolaa dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	0	0%	437.675.000	0%	0	0	0%	0%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) & Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) 4. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)		90	0	0%	13.510.000.000	0%	0	0	0%	0%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diijen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diijen Perhubungan Darat	100	7,50	750,00%	6.376.149.000	750,00%	8	25.181.051	750,00%	0,39%	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin

			JKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1. Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) 2. Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0	0%	250.000.000	0%	0	0	0%	0%	Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan November s.d Desember 2024	Seksi Lalin
			IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	0	0%	340.000.000	0%	0	0	0%	0%	Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala Kendaraan bermotor	Seksi Sarana
4	SK5	Meningkatnya Kualitas penyelenggara an Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggara n Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transporatsi Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	100	7,5	7,5%	4.113.951.000	7,5%	7,5	16.042.212	7,5%	0,39%	1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat 5. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 6. Melakukan Pengawasan Gakum 7. Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 8. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Cek Fisik Rancang Bangun	Kasubbag TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggara n Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Program Dukungan Manajemen	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2. Gaji dan Tunjangan	100	7,5	7,5%	19.177.427.000	7,5%	7,5	3.112.392	7,5%	0,02%	1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana veautifikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan manajemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNP) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kasubbag TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

FEBRUARI 2025

FEBRUARI 2025																			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2		% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)	
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0	0%	3.610.134.000	0%	0	0	0%	0%	1. Akan diberikan atau disediakan subsidi angkutan jalan perintis (prioritas Nasional) bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 6. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum	Seksi Lalin
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe-A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	16,66	16,66%	3.197.985.000	16,66%	16,66	305.061.587	16,66%	9,53%	1. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal penumpang Tipe A untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 2. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal Barang untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus (Dedicated Line) terminal barang internasional entikong di Jakarta	Seksi Prasarana
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyebrangan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyebrangan	100	0	0%	21.407.977.000	0%	0	0	0%	0%	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyebrangan 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 5. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 6. Melaksanakan konsultasi teknis rencana revitalisasi terkait angkutan sungai di Direktorat TSDP	Seksi Lalin

			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	16,66	16,66%	956.129.000	16,66%	16,66	133.151.321	16,66%	13,93%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat 3. Melakukan Mc 0 pada Pembangunan Halte Sungai Suka Ramai kabupaten Ketapang 4. Melakukan Mutual Check (MC 0) Pembangunan Halte Sungai Kendawang Kiri dan Halte Sungai Keramat Jaya di Kab. Ketapang 5. Melakukan Penyusunan Data Profil Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 6. Menghadiri Zoom Virtual Meeting Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai Menhadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) dan Sinkronisasi Reviu	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	16,66	16,66%	1.920.000	16,66%	16,66	1.920.000	16,66%	100%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelolaa dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	15	15%	20.763.000	15%	15	20.759.656	15%	99,98%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) & Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) 4. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) 4. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	90	0	0%	13.510.000.000	0%	0	0	0%	0,00%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	100	16,66	16,66%	3.537.842.000	16,66%	16,66	264.509.351	16,66%	7,48%	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1. Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) 2. Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%	Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan November s.d Desember 2024	Seksi Lalin

			IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%		Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala Kendaraan bermotor	Seksi Sarana
4	SK5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transporatsi Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	100	16,66	16,66%	197.661.000	16,66%	16,66	197.645.853	16,66%	99,99%		1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat 5. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 6. Melakukan Pengawasan Gakum 7. Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 8. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Cek Fisik Rancang Bangun	Kasubbag TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Program Dukungan Manajemen	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2. Gaji dan Tunjangan	100	16,66	16,66%	13.383.626.000	16,66%	16,66	1.532.985.843	16,66%	11,45%		1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana veautifikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan manajemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNPN) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kasubbag TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

MARET 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3		% CAPAIAN BULAN-3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)	
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0	0%	3.610.134.000	0%	0	0	0%	0%	1. Akan diberikan atau disediakan subsidi angkutan jalan perintis (prioritas Nasional) bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 6. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum	Seksi Lalin
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe-A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	25	25%	8.481.000.000	25%	25	1.269.921.471	25%	14,97%	1. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal penumpang Tipe A untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 2. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal Barang untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus (Dedicated Line) terminal barang internasional entikong di jakarta	Seksi Prasarana
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyebrangan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyebrangan	100	25	25%	21.407.977.000	25%	25	0	25%	0%	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyebrangan 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 5. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 6. Melaksanakan konsultasi teknis rencana revitalisasi terkait angkutan sungai di Direktorat TSDP	Seksi Lalin

			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	22,5	22,5%	1.946.642.000	22,5%	22,5	38.296.000	22,5%	1,96%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat 3. Melakukan Mc 0 pada Pembangunan Halte Sungai Suka Ramai kabupaten Ketapang 4. Melakukan Mutual Check (MC 0) Pembangunan Halte Sungai Kendawang Kiri dan Halte Sungai Keramat Jaya di Kab. Ketapang 5. Melakukan Penyusunan Data Profil Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 6. Menghadiri Zoom Virtual Meeting Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai Menhadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) dan Sinkronisasi Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	22,5	22,5%	377.000.000	22,5%	22,5	1.920.000	22,5%	0,50%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelolaa dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	25	25%	832.350.000	25%	25	20.759.656	25%	2,49%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) & Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) 4. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)		90	25	25%	15.579.611.000	25%	25	0	25%	0%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin

			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	100	25	25%	6.663.504.000	25%	25	1.033.964.980	25%	15,51%		Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1. Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) 2. Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0	0%	357.143.000	0%	0	0	0%	0%		Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan November s.d Desember 2024	Seksi Lalin
			IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	0	0%	340.000.000	0%	0	0	0%	0%		Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala Kendaraan bermotor	Seksi Sarana
4	SK5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan n Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	100	25	25%	6.677.041.000	25%	25	197.645.853	25%	2,96%		1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat 5. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 6. Melakukan Pengawasan Gakum 7. Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 8. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Cek Fisik Rancang Bangun	Kasubbag TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Program Dukungan Manajemen	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2. Gaji dan Tunjangan	100	25	25%	19.567.427.000	25%	25	4.387.869.769	25%	22,42%		1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana veaotifikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan manajemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNP) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kasubbag TU



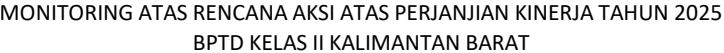
MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

Apr-25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-4				REALISASI BULAN-4		% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN							
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)				
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0,00	0%	3.610.134.000	0%	0	0	0%	0%	1. Akan diberikan atau disediakan subsidi angkutan jalan perintis (prioritas Nasional) bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 6. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum	Seksi Lalin			
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi			Lokasi	2		1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	33,33	33,33%	8.481.000.000	33,33%	33,33	2.109.136.533	33,33%	24,86%	1. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal penumpang Tipe A untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 2. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal Barang untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus (Dedicated Line) terminal barang internasional entikong di jakarta	Seksi Prasarana
			IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan						Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyeberangan		%	100	100	33,33	33,33%	21.407.977.000	33,33%	33,33	1.746.239.000	33,33%

			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	33,33	33,33%	1.946.642.000	33,33%	33,33	255.206.921	33,33%	13,11%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat 3. Melakukan Mc 0 pada Pembangunan Halte Sungai Suka Ramai kabupaten Ketapang 4. Melakukan Mutual Check (MC 0) Pembangunan Halte Sungai Kendawang Kiri dan Halte Sungai Keramat Jaya di Kab. Ketapang 5. Melakukan Penyusunan Data Profil Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 6. Menghadiri Zoom Virtual Meeting Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai Menhadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) dan Sinkronisasi Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	33,33	33%	377.000.000	33,33%	33,33	1.920.000	33,33%	0,50%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Darat	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengeloa dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	30	30%	832.350.000	30%	30	20.759.656	30%	2,49%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana

3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	Perengkapan Jalan (Prioritas Nasional) & Pemeliharaan Perengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	1. Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan Prioritas Nasional 2. Bantuan Teknis Perengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) 4. Pemeliharaan Perengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	90	30	30%	15.579.611.000	30%	30	0	30%	0%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin
			IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	100	33,33	33,33%	6.663.504.000	33,33%	33,33	1.066.731.702	33,33%	16,01%	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1. Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) 2. Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0	0%	357.143.000	0%	0	0	0%	0%	Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan November s.d Desember 2024	Seksi Lalin
			IKK7.a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	0	0%	340.000.000	0%	0	0	0%	0%	Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala Kendaraan bermotor	Seksi Sarana
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	100	33,33	33,33%	6.677.041.000	33,33%	33,33	316.645.853	33,33%	4,74%	1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat 5. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 6. Melakukan Pengawasan Gakum 7. Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 8. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Cek Fisik Rancang Bangun	Kasubbag TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Program Dukungan Manajemen	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2. Gaji dan Tunjangan	100	33,33	33,33%	19.567.427.000	33,33%	33,33	4.456.549.739	33,33%	22,77%	1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana veautifikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan manajemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNPN) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kasubbag TU



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
										Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
										Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0	0%	3.610.134.000	0%	0	0	0%	0%		1. Akan diberikan atau disediakan subsidi angkutan jalan perintis (prioritas Nasional) bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 6. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum	Seksi Lalin
		IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	41,66	41,66%	8.476.820.000	41,66%	41,66	1.730.305.628	41,66%	20,41%		1. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal penumpang Tipe A untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 2. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal Barang untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus (Dedicated Line) terminal barang internasional entikong di jakarta	Seksi Prasarana	
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyebrangan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyebrangan	100	41,66	41,66%	21.407.977.000	41,66%	41,66	2.006.177.000	41,66%	9,37%		1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 5. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 6. Melaksanakan konsultasi teknis rencana revitalisasi terkait angkutan sungai di Direktorat TSDP	Seksi Lalin	

			IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	41,66	41,66%	1.950.822.000	41,66%	41,66	293.502.921	41,66%	15,04%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat 3. Melakukan Mc 0 pada Pembangunan Halte Sungai Suka Ramai kabupaten Ketapang 4. Melakukan Mutual Check (MC 0) Pembangunan Halte Sungai Kendawang Kiri dan Halte Sungai Keramat Jaya di Kab. Ketapang 5. Melakukan Penyusunan Data Profil Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 6. Menghadiri Zoom Virtual Meeting Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Pembangunan Infrastruktur Transportasi Sungai Menhadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) dan Sinkronisasi Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	41,66	41,66%	377.000.000	41,66%	41,66	1.920.000	41,66%	0,50%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Seksi Prasarana
			IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelola dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	37,5	37,5%	832.350.000	37,5%	37,5	20.759.656	37,5%	2,49%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) & Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	90	37,5	37,5%	15.579.611.000	37,5%	37,5	0	37,5%	0%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	100	41,66	41,66%	6.663.504.000	41,66%	41,66	1.324.388.233	41,66%	19,87%	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin
			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1. Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) 2. Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0	0%	357.143.000	0%	0	0	0%	0%	Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan November s.d Desember 2024	Seksi Lalin
			IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	0	0%	340.000.000	0%	0	0	0%	0%	Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala Kendaraan bermotor	Seksi Sarana

4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transporatsi Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	100	41,66	41,66%	6.677.041.000	41,66%	41,66	316.645.853	41,66%	4,74%	1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat 5. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 6. Melakukan Pengawasan Gakum 7. Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 8. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Cek Fisik Rancang Bangun	Kasubbag TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Program Dukungan Manajemen	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2. Gaji dan Tunjangan	100	41,66	41,66%	19.567.427.000	41,66%	41,66	5.419.844.151	41,66%	27,69%	1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana veautifikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan managemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNP) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kasubbag TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

JUNI 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan		Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0	0%	3.610.134.000	0%	0	0	0%	0%	1. Akan diberikan atau disediakan subsidi angkutan jalan perintis (prioritas Nasional) bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 6. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum	Seksi Lalin
			IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe-A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	50	50%	8.476.820.000	50%	50	2.310.656.698	50%	27,25%	1. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal penumpang Tipe A untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 2. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal Barang untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus (Dedicated Line) terminal barang internasional entikong di jakarta	Seksi Prasarana
			IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	Layanan Angkutan Penyebrangan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyebrangan	100	50	50%	21.407.977.000	50%	50	5.159.513.000	50%	24,1%	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 5. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 6. Melaksanakan konsultasi teknis rencana revitalisasi terkait angkutan sungai di Direktorat TSDP	Seksi Lalin
			IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	Operasional Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	50	50%	1.950.822.000	50%	50	331.798.921	50%	17,00%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Seksi Prasarana

2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	50	50%	377.000.000	50%	50	0	50%	0%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Seksi Prasarana
			IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelola dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	45	45%	832.350.000	45%	45	20.759.656	45%	2,49%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) & Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) 4. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	90	45	45%	15.579.611.000	45%	45	0	45%	0%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	100	50	50%	6.663.504.000	50%	50	3.708.574.017	50,0%	55,65%	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin
			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1. Pelan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) 2. Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0	0%	357.143.000	0%	0	0	0%	0%	Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan November s.d Desember 2024	Seksi Lalin
			IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	0	0%	340.000.000	0%	0	0	0%	0%	Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala Kendaraan bermotor	Seksi Sarana
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	100	50	50%	6.677.041.000	50%	50	316.645.853	50%	4,74%	1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat 5. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 6. Melakukan Pengawasan Gakum 7. Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 8. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Cek Fisik Rancang Bangun	Kasubbag TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Program Dukungan Manajemen	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2. Gaji dan Tunjangan	100	50	50%	19.567.427.000	50%	50	7.686.509.848	50%	39,28%	1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana verifikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan manajemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNPN) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kasubbag TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

JULI 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7		% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)	
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0	0%	3.610.134.000	0%	0	240.334.588	0%	6,65%	1. Akan diberikan atau disediakan subsidi angkutan jalan perintis (prioritas Nasional) bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 6. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum	Seksi Lalin
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	58,33	58,33%	8.476.820.000	58,33%	58,33	2.500.729.334	58,33%	29,50%	1. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal penumpang Tipe A untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 2. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal Barang untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus (Dedicated Line) terminal barang internasional entikong di jakarta	Seksi Prasarana
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyebrangan	100	58,33	58,33%	21.407.977.000	58,33%	58,33	7.916.503.000	58,33%	36,97%	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 5. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 6. Melaksanakan konsultasi teknis rencana revitalisasi terkait angkutan sungai di Direktorat TSDP	Seksi Lalin

			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	58,33	58,33%	1.950.822.000	58,33%	58,33	336.918.040	58,33%	17,27%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat 3. Melakukan MC 0 pada Pembangunan Halte Sungai Suka Ramai kabupaten Ketapang 4. Melakukan Mutual Check (MC 0) Pembangunan Halte Sungai Kendawang Kiri dan Halte Sungai Keramat Jaya di Kab. Ketapang 5. Melakukan Penyusunan Data Profil Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 6. Menghadiri Zoom Virtual Meeting Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai Menhadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) dan Sinkronisasi Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RUPN)	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	58,33	58,33%	377.000.000	58,33%	58,33	1.920.000	58,33%	0,50%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Seksi Prasarana
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	52,5	52,5%	832.350.000	52,5%	52,5	20.759.656	52,5%	2,49%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	90	52,5	52,5%	15.579.611.000	52,5%	52,5	0	52,5%	0,00%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	100	58,33	58,33%	6.663.504.000	58,33%	58,33	1.652.170.496	58,33%	24,79%	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0,00	0%	357.143.000	0%	0	0	0	0	Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan November s.d Desember 2024	Seksi Lalin
			IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi 2. Pemeliharaan Alat PKB Kelling	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	100	0,00	0,00%	340.000.000	0,00%	0	0	0,00%	0	Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala kendaraan bermotor	Seksi Sarana

4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transporatsi Darat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100	58,33	58,33%	6.677.041.000	58,33%	58,33	316.645.853	58,33%	4,74%	1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan	Kasubbag TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	100	58,33	58,33%	19.567.427.000	58,33%	58,33	7.790.568.380	58,33%	39,81%	1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana veautfikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan managemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNPN) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kasubbag TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

AGUSTUS 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)	
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	100	0	0%	3.610.134.000	0%	0	240.334.588	0%	6,65%	1. Akan diberikan atau disediakan subsidi angkutan jalan perintis (prioritas Nasional) bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan umum 6. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan umum	Seksi Lalin
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A 2. Operasional Terminal Barang	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	2	66,66	####	7.992.010.000	####	66,66	2.772.201.480	66,66%	34,68%	1. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal penumpang Tipe A untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 2. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap operasional Terminal Barang untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa Terminal 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus (Dedicated Line) terminal barang internasional entikong di Jakarta	Seksi Prasarana	
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) 7 Keperintisan	Layanan Angkutan Penyebrangan	100	66,66	####	21.407.977.000	####	66,66	7.916.503.000	66,66%	36,97%	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan 2. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 3. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 4. Menyusun rencana pengawasan tarif angkutan penyeberangan 5. Melakukan verifikasi hasil pengawasan tarif angkutan penyeberangan 6. Melaksanakan konsultasi teknis rencana revitalisasi terkait angkutan sungai di Direktorat TSDP	Seksi Lalin	

			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	11	66,66	####	1.292.314.000	####	66,66	342.461.940	66,66%	26,49%	1. Melaksanakan Monitoring secara berkala mengenai pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan 2. Melakukan Konsultasi Teknis Rencana Revitalisasi Teknis Angkutan Sungai di Direktorat TSDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat 3. Melakukan Mc 0 pada Pembangunan Halte Sungai Suka Ramai kabupaten Ketapang 4. Melakukan Mutual Check (MC 0) Pembangunan Halte Sungai Kendawang Kiri dan Halte Sungai Keramat Jaya di Kab. Ketapang 5. Melakukan Penyusunan Data Profil Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 6. Menghadiri Zoom Virtual Meeting Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai Menhadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) dan Sinkronisasi Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	100	66,66	####	377.000.000	####	66,66	1.920.000	66,66%	0,50%	1. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan yang diberikan oleh staf pegawai Terminal kepada penumpang di Terminal Tipe A ALBN Sei Ambawang 2. Menghadiri Undangan Rapat Focus Group Discussion dengan Tema Evaluasi Tipologi Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	90	60	60%	832.350.000	60%	60	20.759.656	60%	2,49%	Melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	90	60	60%	15.579.611.000	60%	60	0	60%	0%	1. Melaksanakan Monitoring dan pengawasan terhadap perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. 2. Melakukan survey kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan yang telah di ajukan oleh Pemerintah Daerah.	Seksi Lalin
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100	Operasional UPPKB	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	100	66,66	####	4.630.820.000	####	66,66	2.154.883.001	66,66%	46,53%	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Harian (pelanggaran) pada UPPKB	Seksi Lalin

			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi	1000	0	0%	357.143.000	0%	0	0	0%	0%	Akan dilaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sekitar Bulan Oktober s.d November 2025	Seksi Lalin
			IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi 2. Pemeliharaan Alat PKB Keliling	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	100	0	0%	340.000.000	0%	0	0	0%	0%	Melaksanakan pegawai terhadap pemeliharaan peralatan mesin standarisasi alat uji berkala Kendaraan bermotor	Seksi Sarana
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100	66,66	####	6.677.041.000	####	66,66	345.675.853	66,66%	5,17%	1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegawai dengan memberikan surat perintah tugas ke daerah (Satuan Pelayanan dibawah tanggung jawab BPTD Kelas II Kalimantan Barat) 2. Melakukan Penyusunan Bahan dan RKA 3. Melakukan penyusunan SAKIP, LKIP, dan Profil BPTD 4. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat 5. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat 6. Melakukan Pengawasan Gakum 7. Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 8. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Cek Fisik Rancang Bangun	Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	100	66,66	####	26.772.884.000	####	66,66	13.838.925.392	66,66%	51,69%	1. Melaksanakan kegiatan penyampaian kegiatan koordinasi rencana veautifikasi gedung terminal sei ambawang BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2. Melaksanakan managemen pembayaran Gaji Pegawai (PPNPN) dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pembayaran Tunjangan kinerja Pegawai (PNS dan CPNS) BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

Sep-25

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
										VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)
1	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	Kegiatan layanan angkutan jalan peintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ketapang - Simpang Siduk _ Sukadana - Teluk Batang 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Lintas Timur - Nanga Raun 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sambas - Aruk 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sintang - Nanga Mau - Nanga Tebidah 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Terminal Sui Durian Sintang - Tempunak 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Jongkong - Selimbau	Terlayani Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Tercapainya target trayek kegiatan layanan angkutan jalan perintis	6	100%	3.337.416.000	83,33%	6	240.334.588	83,33%	7,20%	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis telah terlaksana dan telah mencapai realisasi dari target sebesar 6 Trayek	Akan melaksanakan kegiatan layanan angkutan jalan perintis sesuai Rencana Aksi	Seksi ILLSDP
2	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang tahap IV		1	1	100%	3.269.905.000	0%	0	0	0%	0%			Seksi Prasarana ISDP
3	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	Pengoprasian dan pengelolaan Terminal Tipe A Sei Ambawang	Melaksanakan Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Sesuai SPM	1	100%	3.736.984.000	83,33%	1	1.837.520.590	83,33%	49,17%	Kegiatan Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A sesuai SPM telah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu dilaksanakan perawatan pada beberapa bagian gedung.	1. Peningkatan fasilitas pelayanan penumpang; 2. Penguatan SDM; 3. Perbaikan Sarana dan Prasarana	Seksi Prasarana ISDP

			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM	Tahun	4	1. Pengoprasian dan Pegelolan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Siantan 2. Pengoprasian dan Pegelolan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sosok 3. Pengoprasian dan Pegelolan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sintang 4. Pengoprasian dan Pegelolan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Satong	Melaksanakan Pengoprasian dan Pegelolan Layanan Fasilitas Penimbangan KB pada UPPKB Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pegelolan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB sesuai SPM	4	100%	4.630.820.000	83,33%	4	2.154.983.001	83,33%	46,53%	1. Evaluasi Pelayanan Operasional; 2. Evaluasi Sarana dan Prasarana	1. Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala; 2. Menjamin operasional UPPKB sesuai regulasi dan SPM; 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	Seksi Prasarana JSDP
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	24	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	Melaksanakan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Terlaksananya Monitoring Evaluasi guna Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu: 1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	24	100%	2.245.736.000	83,33%	24	47.848.024	83,33%	2,57%	Agar pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Pelayanan Tugas dan Pokok kedepan dapat lebih baik	Kegiatan telah terlaksana	Seksi Prasarana JSDP
4	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Tahun	2	1. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Sinteta 2. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Rasau Jaya.			2	100%	956.806.000	83,33%	2	304.790.940	83,33%	31,85%			Seksi Prasarana JSDP
5	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	48	Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	48	100%	70.000.000	0%	48	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemeriksa; 2. Mendukung kebijakan Zero ODOL dan keselamatan transportasi darat.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Kalbar	Paket	2	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Pontianak 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kota Singkawang. 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Kubu Raya 4. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Mempawah 5. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Landak 6. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sekadau 7. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sanggau 8. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sambas 9. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Bengkayang 10. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Melawi 11. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sintang	Melaksanakan Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai Rencana Aksi	2	100%	410.000.000	0%	2	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Mendukung pengawasan dan pengendalian kendaraan bermuatan besar dan berpotensi ODOL; 2. Menjamin keabsahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP

							1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibras Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Menjamin Akurasi Pengukuran; 2. Meningkatkan Keandalan Alat; 3. Mendukung Keselamatan Lalu Lintas; 4. Memenuhi Standar dan Peraturan; 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan; 6. Mendukung Pengawasan Emisi; 7. Menunjang Penerapan Sistem Mutu.									Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	Rencana Kegiatan Tersebut akan terlaksana pada bulan November	
6	SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	8				8	100%	1.000.000.000	0%	8	0	100%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LLISDP
7	SK 12	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	2400	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Kalimantan Barat		2400	100%	0	0%	2400	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LLISDP
			IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendamping Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	30	Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Kalimantan Barat (SALUD) Kegiatan bertujuan menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini pada anak-anak. Ini dilakukan agar mereka menjadi generasi pengguna jalan yang disiplin, bertanggung jawab dan memahami aturan lalu lintas.		30	100%	0	0%	30	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	Kegiatan telah berjalan dengan baik dan akan terus dilaksanakan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini	Seksi LLISDP
8	IKP 3.3	Penurunan Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlangkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	7	Pengadaan dan Pemasangan Perlangkapan Jalan Prioritas Nasional			7	100%	15.579.611.000	0%	7	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LLISDP
9	IKP 4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	Melaksanakan Penyusunan Dokumen RKKL Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi		3	100%	0	0%	3	0	100%	0%	Pentingnya peyempurnaan kegiatan dan proses peyusunan RKKL di tahun anggaran berikutnya	1. Penajaman Substansi kegiatan dan penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra; 2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Penyusunan Dokumen SAKIP	Melaksanakan Penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025		1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Masih ditemukan kendala dikarenakan belum ada manual indikator kinerja terbaru pada Dokumen SAKIP Tahun 2025	1. Revisi indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis Renstra; 2. Revisi indikator kinerja agar didukung dengan manual IKU yang tepat dan jelas.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SPIP dan Dokumen Manajemen Risiko		2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	Sebagian pegawai belum memahami konsep dasar SPIP dan Manajemen Risiko, sehingga penyusunan dokumen masih tergantung pada lini kecil.	1. Meningkatkan maturitas SPIP; 2. Mewujudkan pengelolaan risiko yang terstruktur, terdokumentasi dan terintegrasi.	Subbag Tata Usaha

				IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag Keuangan/TU	Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas II Kalimantan Barat	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Monitoring Capaian Output via OM-SPAN / SMART DIA.	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	1. Menindaklanjuti temuan evaluasi baik internal maupun eksternal; 2. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	Subbag Tata Usaha
				IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Melaksanakan Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko	Laporan Dokumen Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Kualitas Tindak Lanjut	Dokumentasi output lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	Subbag Tata Usaha
				IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	Melaksanakan Kegiatan terkait pengelolaa BMN/Aset dan Penatausahaan BMN	1. Laporan SIMAK-BMN Sesuai Ketentuan; 2. KIB sesuai SIMAK-BMN.	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	Mengukur keakuratan data dan laporan BMN.	1. Menjamin keakuratan dan kelengkapan data BMN; 2. Memperkuat pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan BMN.	Subbag Tata Usaha
				IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	Melaksanakan Kegiatan HUMAS dan PPID	1. Pengelolaan media sosial dan website resmi; 2. Penyediaan dan pengelolaan akses informasi publik.	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	1. Posting kurang rutin dan engagement rendah; 2. Materi terbatas dan kurang variatif	1. Peningkatan frekuensi dan kualitas konten informasi publik; 2. Permintaan informasi ditangani cepat dan tepat.	Subbag Tata Usaha
				IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan Layanan Perkantoran	Melaksanakan Kegiatan Layanan Perkantoran	Terlaksananya Dokumen arsip yang terdigitalisasi	1	83,33%	8.275.309.000	83,33%	1	2.420.809.305	83,33%	29%	Risiko kehilangan atau kebocoran data	1. Melakukan backup dan pengamanan arsip digital secara berkala; 2. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan digitalisasi.	Subbag Tata Usaha
				IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) 2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	Melaksanakan Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK)	Pengelolaan data Penyedia barang/jasa yang sesuai ketentuan	1	83,33%	318.602.000	83,33%	1	32.553.075	83,33%	10,21%	Identifikasi hambatan, penyimpangan atau risiko dalam tata kelola pengadaan barang jasa	Meningkatkan serapan anggaran dan kualitas output pengadaan.	Subbag Tata Usaha
				IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengeloaan Gaji Tunjangan Pegawai 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	Melaksanakan Kegiatan terkait Pengembangan SDM	1. Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai 2. Mengikuti kegiatan pada ASN Berpijar	2	83,33%	18.697.575.000	83,33%	2	11.418.116.087	83,33%	61,06%	Memastikan bahwa program pengembangan SDM tepat sasaran, relevan dan berdampak langsung.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM; 2. Meningkatkan dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi.	Subbag Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

OKTOBER 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-10		% CAPAIAN BULAN-10		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)		
1	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ketapang - Simpang Siduk _ Sukadana - Teluk Batang 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Lintas Timur - Nanga Raun 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sambas - Aruk 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sintang - Nanga Mau - Nanga Tebidah 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Terminal Sui Durian Sintang - Tempunak 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Jongkong - Selimbau	Terlayani Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Tercapainya target trayek kegiatan layanan angkutan jalan perintis	6	100%	1.959.715.000	83,33%	6	586.377.722	83,33%	29,92%	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis telah terlaksana dan telah mencapai realisasi dari target sebesar 6 Trayek	Akan melaksanakan kegiatan layanan angkutan jalan perintis sesuai Rencana Aksi	Seksi LUSDP
2	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang tahap IV		1	100%	5.325.375.000	0%	0	926.130.000	0%	17,39%			Seksi Prasarana JSDP	
3	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	Pengoprasian dan pengelolaan Terminal Tipe A Sei Ambawang	Melaksanakan Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Sesuai SPM	1	100%	3.881.984.000	83,33%	1	2.499.674.370	83,33%	64,39%	Kegiatan Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A sesuai SPM telah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu dilaksanakan perawatan pada beberapa bagian gedung.	1. Peningkatan fasilitas pelayanan penumpang; 2. Penguatan SDM; 3. Perbaikan Sarana dan Prasarana	Seksi Prasarana JSDP

			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM	Tahun	4	1. Pengoprasian dan Pegelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Siantan 2. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sosok 3. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sintang 4. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Satong	Melaksanakan Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB pada UPPKB Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB sesuai SPM	4	100%	4.630.820.000	83,33%	4	2.413.278.572	83,33%	52,11%	1. Evaluasi Pelayanan Operasional; 2. Evaluasi Sarana dan Prasarana	1. Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala; 2. Menjamin operasional UPPKB sesuai regulasi dan SPM; 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	Seksi Prasarana JSDP
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	24	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	Melaksanakan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Terlaksananya Monitoring Evaluasi guna Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu: 1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	24	100%	3.017.105.000	83,33%	24	47.848.024	83,33%	1,58%	Agar pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok kedepan dapat lebih baik	Kegiatan telah terlaksana	Seksi Prasarana JSDP
4	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Tahun	2	1. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Sintete; 2. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Rasau Jaya.			2	100%	1.055.297.000	83,33%	2	663.833.777	83,33%	62,90%			Seksi Prasarana JSDP
5	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	48	Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	48	100%	70.000.000	0%	48	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemeriksaan; 2. Mendukung kebijakan Zero ODOL dan keselamatan transportasi darat.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Kalbar	Paket	2	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Pontianak 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kota Singkawang 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Kubu Raya 4. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Mempawah 5. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Landak 6. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sekadau 7. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sanggau 8. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sambas 9. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Bengkayang 10. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Melawi 11. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab Sintang	Melaksanakan Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai Rencana Aksi	2	100%	410.000.000	0%	2	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Mendukung pengawasan dan pengendalian kendaraan bermuatan besar dan berpotensi ODOL; 2. Menjamin keabsahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP

							1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Menjamin Akurasi Pengukuran; 2. Meningkatkan Keandalan Alat; 3. Mendukung Keselamatan Lalu Lintas; 4. Memenuhi Standar dan Peraturan; 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan; 6. Mendukung Pengawasan Emisi; 7. Menunjang Penerapan Sistem Mutu.									Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	Rencana Kegiatan Tersebut akan terlaksana pada bulan November	
6	SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	8				8	100%	1.000.000.000	0%	8	608.570.151	100%	61%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LUSDP
7	SK 12	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	2400	Pelaksanaan Pekan Keselamaan Jalan di Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan Pekan Keselamaan Jalan di Provinsi Kalimantan Barat		2400	100%	250.000.000	0%	2400	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LUSDP
			IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendamping Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	30	Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Kalimantan Barat (SALUD)	Kegiatan bertujuan menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini pada anak-anak. Ini dilakukan agar mereka menjadi generasi pengguna jalan yang disiplin, bertanggung jawab dan memahami aturan lalu lintas.	30	100%	107.143.000	0%	30	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	Kegiatan telah berjalan dengan baik dan akan terus dilaksanakan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini	Seksi LUSDP
8	IKP 3.3	Penurunan Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	7	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional			7	100%	18.460.581.000	0%	7	7.165.323.198	0%	38,81%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LUSDP
9	IKP 4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	Melaksanakan Penyusunan Dokumen RKKL Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang tersusun secara sistematis dan rinci menurut klasifikasi agar dapat menghasilkan anggaran yang realistis dan efektif	3	100%	0	0%	3	0	100%	0%	Pentingnya peyempurnaan proses peyusunan RKKL di tahun anggaran berikutnya	1. Penajaman Substansi kegiatan dan penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra; 2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Penyusunan Dokumen SAKIP	Melaksanakan Penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025	1. Dokumen Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029; 2. Dokumen IKU; 3. Dokumen RKT; 4. Dokumen Perjanjian Kinerja; 5. Dokumen Rencana Aksi; 6. Dokumen LMCK; 7. Dokumen LKIP; 8. Dokumen Monitoring Renaksi Atas PK; 9. Dokumen Lainnya yang diperlukan.	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Masih ditemukan kendala dikarenakan belum ada manual indikator kinerja terbaru pada Dokumen SAKIP Tahun 2025	1. Revisi Indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis Renstra; 2. Revisi Indikator kinerja agar didukung dengan manual IKU yang tepat dan jelas.	Subbag Tata Usaha

			IKK4.3	Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SPIP dan Dokumen Manajemen Risiko	1. Laporan Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP; 2. Matriks Risiko (Identifikasi Risiko, Dampak, Kemungkinan, Level Risiko, Mitigasi); 3. Dokumen Prosedur Operasional Standar yang mengatur proses SPIP dan Manajemen Risiko.	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	Sebagian pegawai belum memahami konsep dasar SPIP dan Manajemen Risiko, sehingga penyusunan dokumen masih tergantung pada lini kecil.	1. Meningkatkan maturitas SPIP; 2. Mewujudkan pengelolaan risiko yang terstruktur, terdokumentasi dan terintegrasi.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag Keuangan/TU	Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas II Kalimantan Barat	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Monitoring Capaian Output via OM-SPAN / SMART DIA.	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	1. Menindaklanjuti temuan evaluasi baik internal maupun eksternal; 2. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Melaksanakan Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko	Laporan Dokumen Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Kualitas Tindak Lanjut	Dokumentasi output lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	Subbag Tata Usaha
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	Melaksanakan Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset dan Penatausahaan BMN	1. Laporan SIMAK-BMN Sesuai Ketentuan; 2. KIB sesuai SIMAK-BMN.	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	Mengukur keakuratan data dan laporan BMN.	1. Menjamin keakuratan dan kelengkapan data BMN; 2. Memperkuat pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan BMN.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	Melaksanakan Kegiatan HUMAS dan PPID	1. Pengelolaan media sosial dan website resmi; 2. Penyediaan dan pengelolaan akses informasi publik.	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	1. Posting kurang rutin dan engagement rendah; 2. Materi terbatas dan kurang variatif	1. Peningkatan frekuensi dan kualitas konten informasi publik; 2. Permintaan informasi ditangani cepat dan tepat.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan Layanan Perkantoran	Melaksanakan Kegiatan Layanan Perkantoran	Terlaksananya Dokumen arsip yang terdigitalisasi	1	83,33%	8.275.309.000	83,33%	1	2.528.236.319	83,33%	31%	Risiko kehilangan atau kebocoran data	1. Melakukan backup dan pengamanan arsip digital secara berkala; 2. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan digitalisasi.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) 2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	Melaksanakan Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK)	Pengelolaan data Penyedia barang/jasa yang sesuai ketentuan	1	83,33%	424.852.000	83,33%	1	53.337.694	83,33%	12,55%	Identifikasi hambatan, penyimpangan atau risiko dalam tata kelola pengadaan barang jasa	Meningkatkan serapan anggaran dan kualitas output pengadaan.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengelolaan Gaji Tunjangan Pegawai 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	Melaksanakan Kegiatan terkait Pengembangan SDM	1. Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai 2. Mengikuti kegiatan pada ASN Berpijar	2	83,33%	18.697.575.000	83,33%	2	13.834.454.406	83,33%	73,99%	Memastikan bahwa program pengembangan SDM tepat sasaran, relevan dan berdampak langsung.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM; 2. Meningkatkan dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi.	Subbag Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nov-25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)		
1	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ketapang - Simpang Siduk _ Sukadana - Teluk Batang 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Lintas Timur - Nanga Raun 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sambas - Aruk 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sintang - Nanga Mau - Nanga Tebidah 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Terminal Sul Durian Sintang - Tempunak 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Jongkong - Selimbau	Terlayani Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Tercapainya target trayek kegiatan layanan angkutan jalan perintis	6	100%	1.959.715.000	83,33%	6	955.401.275	83,33%	48,75%	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis telah terlaksana dan telah mencapai realisasi dari target sebesar 6 Trayek	Akan melaksanakan kegiatan layanan angkutan jalan perintis sesuai Rencana Aksi	Seksi LUSDP
2	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang tahap IV		1	100%	3.269.905.000	0%	0	2.114.663.500	0%	64,67%			Seksi Prasarana JSOP	
3	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	Pengoprasian dan pengelolaan Terminal Tipe A Sei Ambawang	Melaksanakan Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Sesuai SPM	1	100%	4.007.876.000	83,33%	1	2.976.917.432	83,33%	74,27%	Kegiatan Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A sesuai SPM telah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu dilaksanakan perawatan pada beberapa bagian gedung.	1. Peningkatan fasilitas pelayanan penumpang; 2. Penguatan SDM; 3. Perbaikan Sarana dan Prasarana	Seksi Prasarana JSOP
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM	Tahun	4	1. Pengoprasian dan Pegelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Siantan 2. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sosok 3. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sintang 4. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Satong	Melaksanakan Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB pada UPPKB Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB sesuai SPM	4	100%	4.630.820.000	83,33%	4	2.692.726.220	83,33%	58,14%	1. Evaluasi Pelayanan Operasional; 2. Evaluasi Sarana dan Prasarana	1. Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala; 2. Menjamin operasional UPPKB sesuai regulasi dan SPM; 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	Seksi Prasarana JSOP

			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	24	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	Melaksanakan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Terlaksananya Monitoring Evaluasi guna Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu: 1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	24	100%	3.017.105.000	83,33%	24	47.848.024	83,33%	1,58%	Agar pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok kedepan dapat lebih baik	Kegiatan telah terlaksana	Seksi Prasarana JSDP
4	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Tahun	2	1. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Sintete; 2. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Teluk Batang (Hubdat) 2. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Rasau Jaya.			2	100%	930.651.000	83,33%	2	685.438.909	83,33%	73,65%			Seksi Prasarana JSDP
5	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	48	Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	48	100%	70.000.000	0%	48	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemeriksa; 2. Mendukung kebijakan Zero ODOL dan keselamatan transportasi darat.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Kalbar	Paket	2	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Pontianak 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kota Singkawang 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Kubu Raya 4. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Mempawah 5. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Landak 6. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sekadau 7. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sanggau 8. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sambas 9. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Bengkayang 10. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Melawi 11. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab Sintang	Melaksanakan Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai Rencana Aksi	2	100%	410.000.000	0%	2	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Mendukung pengawasan dan pengendalian kendaraan bermuatan besar dan berpotensi ODOL; 2. Menjamin keabsahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
							1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Menjamin Akurasi Pengukuran; 2. Meningkatkan Keandalan Alat; 3. Mendukung Keselamatan Lalu Lintas; 4. Memenuhi Standar dan Peraturan; 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan; 6. Mendukung Pengawasan Emisi; 7. Menunjang Penerapan Sistem Mutu.									Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	Rencana Kegiatan Tersebut akan terlaksana pada bulan November	

6	SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	8			8	100%	1.000.000.000	0%	8	608.570.151	100%	61%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LLISDP
7	SK 12	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	2400	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Kalimantan Barat	2400	100%	250.000.000	0%	2400	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LLISDP
			IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendamping Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	30	Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Kalimantan Barat (SALUD) Kegiatan bertujuan menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini pada anak-anak. Ini dilakukan agar mereka menjadi generasi pengguna jalan yang disiplin, bertanggung jawab dan memahami aturan lalu lintas.	30	100%	107.143.000	0%	30	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran Kegiatan telah berjalan dengan baik dan akan terus dilaksanakan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini		Seksi LLISDP
8	IKP 3.3	Penurunan Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	7	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional		7	100%	20.530.192.000	0%	7	8.495.340.775	0%	41,37%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LLISDP
9	IKP 4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	Melaksanakan Penyusunan Dokumen RKKL Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi	3	100%	0	0%	3	0	100%	0%	Pentingnya peyempurnaan proses penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra; 2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	1. Penajaman Substansi kegiatan dan penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra; 2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Penyusunan Dokumen SAKIP	Melaksanakan Penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Masih ditemukan kendala dikarenakan belum ada manual indikator kinerja terbaru pada Dokumen SAKIP Tahun 2025	1. Revisi Indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis Renstra; 2. Revisi Indikator kinerja agar didukung dengan manual IKU yang tepat dan jelas.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SPIP dan Dokumen Manajemen Risiko	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	Sebagian pegawai belum memahami konsep dasar SPIP dan Manajemen Risiko, sehingga penyusunan dokumen masih tergantung pada lini kecil.	1. Meningkatkan maturitas SPIP; 2. Mewujudkan pengelolaan risiko yang terstruktur terdokumentasi dan terintegrasi.	Subbag Tata Usaha

			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag Keuangan/TU	Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas II Kalimantan Barat	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Monitoring Capaian Output via OM-SPAN / SMART DJA.	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	1. Menindaklanjuti temuan evaluasi baik internal maupun eksternal; 2. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Melaksanakan Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Risiko	Laporan Dokumen Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Risiko	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%	Kualitas Tindak Lanjut	Dokumentasi output lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	Subbag Tata Usaha
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	Melaksanakan Kegiatan terkait pengelolaa BMN/Aset dan Penatausahaan BMN	1. Laporan SIMAK-BMN Sesuai Ketentuan; 2. KIB sesuai SIMAK-BMN.	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	Mengukur keakuratan data dan laporan BMN.	1. Menjamin keakuratan dan kelengkapan data BMN; 2. Memperkuat pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan BMN.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	Melaksanakan Kegiatan HUMAS dan PPID	1. Pengelolaan media sosial dan website resmi; 2. Penyediaan dan pengelolaan akses informasi publik.	2	100%	0	0%	2	0	100%	0%	1. Posting kurang rutin dan engagement rendah; 2. Materi terbatas dan kurang variatif	1. Peningkatan frekuensi dan kualitas konten informasi publik; 2. Permintaan informasi ditangani cepat dan tepat.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan Layanan Perkantoran	Melaksanakan Kegiatan Layanan Perkantoran	Terlaksananya Dokumen arsip yang terdigitalisasi	1	83,33%	8.275.309.000	83,33%	1	2.590.990.657	83,33%	31,30%	Risiko kehilangan atau kebocoran data	1. Melakukan backup dan pengamanan arsip digital secara berkala; 2. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan digitalisasi.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) 2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	Melaksanakan Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK)	Pengelolaan data Penyedia barang/jasa yang sesuai ketentuan	1	83,33%	439.852.000	83,33%	1	86.657.592	83,33%	19,70%	Identifikasi hambatan, penyimpangan atau risiko dalam tata kelola pengadaan barang jasa	Menigkatkan serapan anggaran dan kualitas output pengadaan.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengeloaan Gaji Tunjangan Pegawai 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	Melaksanakan Kegiatan terkait Pengembangan SDM	1. Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai 2. Mengikuti kegiatan pada ASN Berpijar	2	83,33%	17.952.595.000	83,33%	2	15.765.422.033	83,33%	87,81%	Memastikan bahwa program pengembangan SDM tepat sasaran, relevan dan berdampak langsung.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM; 2. Meningkatkan dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi.	Subbag Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DESEMBER 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN-12				REALISASI BULAN-12		% CAPAIAN BULAN-12		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(34)	(35)	(36)	
1	SK 1.1.1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ketapang Simpang Siduk - Sukadana - Teluk Batang 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Lintas Timur - Nanga Raun 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sambas - Aruk 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sintang - Nanga Mau - Nanga Tebidah 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Terminal Sui Durian Sintang - Tempunak 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Putussibau - Jongkong - Selimbau	Terlayani Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Tercapainya target trayek kegiatan layanan angkutan jalan perintis	6	100%	1.959.715.000	100%	6	1.959.455.900	100%	99,98%	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis telah terlaksana dan telah mencapai realisasi dari target sebesar 6 Trayek	Akan melaksanakan kegiatan layanan angkutan jalan perintis sesuai Rencana Aksi	Seksi LLSDP
2	SK 1.2.1	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 1.2.1A	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang tahap IV		1	100%	5.325.375.000	100%	1	3.169.443.130	100%	59,51%			Seksi Prasarana JSDP	
3	SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	1	Pengoprasian dan pengelolaan Terminal Tipe A Sei Ambawang	Melaksanakan Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Sesuai SPM	1	100%	4.050.056.000	100%	1	3.763.245.352	100%	92,91%	Kegiatan Pengoprasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A sesuai SPM telah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu dilaksanakan perawatan pada beberapa bagian gedung.	1. Peningkatan fasilitas pelayanan penumpang; 2. Penguatan SDM; 3. Perbaikan Sarana dan Prasarana	Seksi Prasarana JSDP
			IKK 2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang Ditingkatkan Pelayannya untuk Memenuhi SPM	Unit	4	1. Pengoprasian dan Pegelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Siantan 2. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sosok 3. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Sintang 4. Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Satong	Melaksanakan Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB pada UPPKB Sesuai SPM	Terlaksananya Pengoprasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB sesuai SPM	4	100%	4.630.820.000	100%	4	3.215.950.215	100%	69,44%	1. Evaluasi Pelayanan Operasional; 2. Evaluasi Sarana dan Prasarana	1. Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala; 2. Menjamin operasional UPPKB sesuai regulasi dan SPM; 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	Seksi Prasarana JSDP

			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	24	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3 Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	Melaksanakan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Terlaksananya Monitoring Evaluasi guna Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu: 1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	24	100%	3.017.105.000	100%	24	47.848.024	100%	1,58%	Agar pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok kedepan dapat lebih baik	Kegiatan telah terlaksana	Seksi Prasarana JSDP
4	SK 2.2	Meningkatnya I Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Unit	2	1. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Sintete; 2. Operasional Pelabuhan Penyebrangan Rasau Jaya.			2	100%	865.860.000	100%	2	663.338.023	100%	76,61%			Seksi Prasarana JSDP
5	SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Laporan	48	Kegiatan Pemeliharaan Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	48	100%	70.000.000	0%	48	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemeriksa; 2. Mendukung kebijakan Zero ODOL dan keselamatan transportasi darat.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang Telah Dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	2	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Pontianak 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kota Singkawang 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Kubu Raya 4. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Mempawah 5. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Landak 6. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sekadau 7. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sanggau 8. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Sambas 9. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Bengkayang 10. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab. Melawi 11. Kegiatan Kalibrasi alat Uji Berkala Kab Sintang	Melaksanakan Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai Rencana Aksi	2	100%	410.000.000	100%	2	70.000.000	100%	17,07%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	1. Mendukung pengawasan dan pengendalian kendaraan bermuatan besar dan berpotensi ODOL; 2. Menjamin keabsahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan JSDP
							1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	1. Menjamin Akurasi Pengukuran; 2. Meningkatkan Keandalan Alat; 3. Mendukung Keselamatan Lalu Lintas; 4. Memenuhi Standar dan Peraturan; 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan; 6. Mendukung Pengawasan Emisi; 7. Menunjang Penerapan Sistem Mutu.							Anggaran kegiatan tersebut akan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran	Rencana Kegiatan tersebut akan terlaksana pada bulan November			

6	SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	%	90	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)			90	100%	20.530.192.000	0%	90	20.132.548.706	100%	98,06%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran		Seksi LLUSD
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4	1. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) Ruas Tanjung - Batas Kota Sanggau 2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) Ruas Kembayan - Tanjung 3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) Ruas Balai karangan - Kembayan 4. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) Ruas Sidas -Tanjung (Moling, Tanjung, Sosok II)			4		1.000.000.000		4	976.581.770		97,65%			
7	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	Melaksanakan Penyusunan Dokumen RKKL Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang tersusun secara sistematis dan rinci menurut klasifikasi agar dapat menghasilkan anggaran yang realistis dan efektif	3	100%	0	100%	3	0	100%	100%	Pentingnya peyempurnaan proses penyusunan RKKL di tahun anggaran berikutnya	1. Penajaman Substansi kegiatan dan penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra; 2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	85,11	Penyusunan Dokumen SAKIP	Melaksanakan Penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025	1. Dokumen Renstra BPTD Kelas II Kalimantan Barat 2025-2029; 2. Dokumen IKU; 3. Dokumen RKT; 4. Dokumen Perjanjian Kinerja; 5. Dokumen Rencana Aksi; 6. Dokumen LMCK; 7. Dokumen LKIP; 8. Dokumen Monitoring Renaksi Atas PK; 9. Dokumen Lainnya yang diperlukan.	85,11	100%	0	100%	85,11	0	100%	100%	Masih ditemukan kendala dikarenakan belum ada manual indikator kinerja terbaru pada Dokumen SAKIP Tahun 2025	1. Revisi indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis Renstra; 2. Revisi indikator kinerja agar didukung dengan manual IKU yang tepat dan jelas.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	81,92	Kegiatan terkait dengan subbag Keuangan/TU	Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas II Kalimantan Barat	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Monitoring Capaian Output via OM-SPAN / SMART DIA.	81,92	100%	0	100%	81,92	0	100%	100%	Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	1. Menindaklanjuti temuan evaluasi baik internal maupun eksternal; 2. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor)	%	100	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Melaksanakan Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektoral Jenderal Berbasis Resiko	Laporan Dokumen Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektoral Jenderal Berbasis Resiko	100	100%	0	100%	100	0	100%	100%	Kualitas Tindak Lanjut	Dokumentasi output lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	Subbag Tata Usaha

			IKK4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) 2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	Melaksanakan Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK)	Pengelolaan data Penyedia barang/jasa yang sesuai ketentuan	1	100%	424.852.000	100%	1	125.195.391	100%	29,46%	Identifikasi hambatan, penyimpangan atau risiko dalam tata kelola pengadaan barang jasa	Meningkatkan serapan anggaran dan kualitas output pengadaan.	Subbag Tata Usaha
			IKK4.10	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengeloaan Gaji Tunjangan Pegawai 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	Melaksanakan Kegiatan terkait Pengembangan SDM	1. Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai 2. Mengikuti kegiatan pada ASN Berpijar	2	100%	17.952.595.000	100%	2	17.917.327.223	100%	99,80%	Memastikan bahwa program pengembangan SDM tepat sasaran, relevan dan berdampak langsung.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM; 2. Meningkatkan dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi.	Subbag Tata Usaha